

Dr. Basuki, M.Ag

# MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRAS



Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A (Guru Besar UIN Malang)



universitas islam negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo - Jawa Timur - Indonesia

# MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH

Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Dr. Basuki, M.Ag



Judul Boku:

Mengenal Profil Sek lah/Madrasah:

Berdasarkan PP. 19 Tahun 2005 tenta 1g Standar Nasional Pendidikan

Penul: Dr. Basuki, A.Ag.

Edito: Retno Widyanin rum, M.Pd.

> Design Sampul: Thaf

Tata Let ik: Zidan A<sub>1</sub> ilio

Cetakan Perta na, 2012

ISBN: 978-602 1312-30-0

Penerb ::
STAIN Po | RESS

Jl. Pramuka No. 1 6 Ponorogo
Telp. (0352) -81277
email: stain\_popres:@yahoo.com

Dicetal: Nadi Press Yo. yakarta Telp. (0274) (382748 Email: Kantornadi@gmail.com

#### Sanksi Pelanggarar. Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayai (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-man ng paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (sata juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling panyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hesil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 80 000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### KATA PENGANTAR

Permasalahan utama pendidikan adalah disparitas mutu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan (1) ketersedia-an pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraannya, (2) prasarana sarana belajar yang belum tersedia, dan bilapun tersedia belum didayagunakan secara optimal, (3) pendana-an pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif; dan penyebaran sekolah yang belum merata, ditandai dengan belum meratanya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, seperti masih terdapatnya kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin, kota dan desa, laki-laki dan perempuan, antar wilayah.

Dua permasalahan tersebut di atas menjadi bertambah parah karena tidak didukung dengan komponen-komponen utama pendidikan seperti kurikulum, sumberdaya manusia pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.

Belajar dari kondisi tersebut, solusi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah menerbitkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin dalam rumusan Visi dan Misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar ber-

kembang menjadi manusia yang perkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantanga: zaman yang selalu berubah. Sedangkan misinya adalah: (1) p engupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan mempiroleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indon sia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki day; saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) neningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masy rakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia di i sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat Elajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas pro es pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepr padian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan lan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembuc yaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

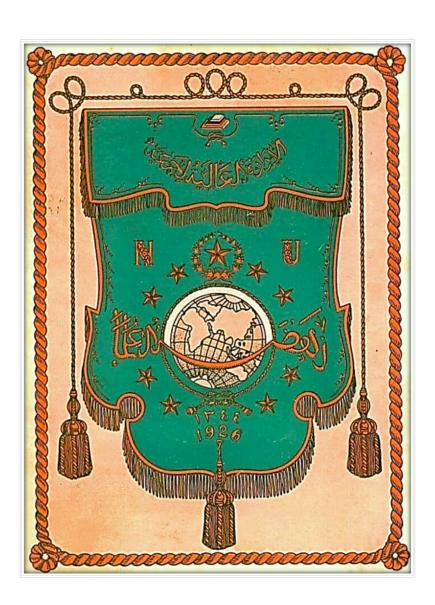
Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Standar nasional pendidikan sebagai penjabaran Visi dan Misi pendidikan nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sundar Nasional Pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional, dan keunggulan lokal.

Melalui kegiatan PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) ini, mahasiswa dituntut untuk mengenal lebih dekat profil sekolah/madrasah dengan cara mengisi instrumen pencapaian depalan standar nasional pendidikan sebagaimana telah disusun seraca siatematis dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan pemerhati atau peneliti pendidikan pada umumnya. Amin.

Malang, 25 Agustus 2010.

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.



## BAB I PENDAHULUAN

# A. Pentingnya Mengenal Sekolah/Madrasah Efektif Berstandar Nasional

Masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini sedang menapak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang mencakup dua aspek. *Pertama*, mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan dengan membangun kembali masyarakat dan bangsa yang demokratis. *Kedua*, mempersiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat baru. <sup>1</sup> Krisis yang melanda kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia telah melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut masyarakat baru Indonesia. Keterkaitan antara pendidikan, kebudayaan, serta seluruh kehidupan masyarakat, menuntut paradigma baru pendidikan kita di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>H.A.R. Tilaar. M.Sc. Ed, *Paradigama Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 164.

<sup>2</sup>Ada keprihatinan yang perlu ditanggapi dan direspon secara serius di negeri kita berkenaan dengan pendidikan. Tampaknya pendidikan belum dianggap sebagai salah satu faktor pokok penyebab terpuruknya bangsa ini, terbukti bahwa tudingantudingan sebagian besar pengamat, apalagi para politisi hanya diarahkan pada ekonomi dan politik. Pendidikan seolah-olah bukan bagian pokok penyebab nyaris ambruknya negeri ini. Realitas ini menunjukkan kapasitas dan wawasan bangsa ini, masih belum bisa berfikir jauh ke depan, artinya kapasitas dan wawasan kita masih (hanya) berkutat pada kondisi kekinian saja, sehingga solusi dan pemecahan problem juga melulu bersifat teknis pragmatis, tidak strategis jangka panjang. Untuk itu, orientasi tentang pendidikan yang selama ini hanya menjadi masalah individual lembaga pendidikan formal semisal sekolah atau madrasah semata, adalah tidak benar. Sebab pendidikan juga menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian "sekolah" tidak hanya diartikan secara formal-institusional, melainkan juga berada dimana-

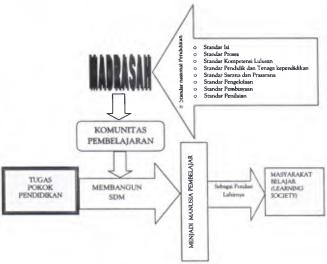
Paradigma baru pendidikan ersebut di antaranya adalah menuntut reposisi sekolah seba ai salah satu wadah mentransformasikan potensi atau sumi er daya peserta didik menjadi manusia pembelajar (on becomir ; a learner) sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar (learn ng society) Indonesia

Proses mentransformasikan potensi atau sumber daya manusia menjadi manusia pembelajar (on becoming a learner) merupakan pekerjaan pendidikan yang paling khas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan termal, mempunyai potensi untuk melahirkan manusia-manusia pembelajar. Dalam mentrasformasikan potensi atau sumber daya peserta didik menjadi manusia pembelajar (on becoming a learner), sekolah harus menjadi pelopor komunitas pembelajar.<sup>3</sup>

Dengan demikian tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menjadi "komunitas pembelaja: ' yang mampu membangun "manusia pembelajar" sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar (learning society) di Indoensia, sebagaimana pada gambar berikut:

mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga semua aspek dalam kehidupan tersebut menjadi sa ana dan media pembelajaran. Suasana seperti inilah yang memberikan iklim konduaf bagi lahirnya manusia pembelajar (on becoming a learner) sebagai pondasi lahirnya masyarakat belajar (leraning society) di Indonesia. Lihat Indra Djati Sidi, Menuju Nasyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Jakarta: Paramadina, 2001). p. 3-10.

<sup>3</sup>Yaitu komunitas yang mampu membat gun manusia pembelajar (orang-orang yang menempatkan perbuatan belajar sebag. bagian dari kehidupan dan kebutuhan hidupnya). Lihat dalam Prof. Dr. Sudarwar Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 18.



Pemahaman secara komprehensif tentang sekolah/madrasah sebagai sebuah sistem adalah suatu keniscayaan bagi setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa yang akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan kependidikan (PPLK).

Sebagai sebuah system, sekolah/madrasah memiliki komponen inti yang terdiri dari input, process dan out-put. Selain itu juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan dan outcome. Dengan demikian, pendekatan contex-input-process-product-outcome (CIPP dan Outcome) menjadi pendekatan sistem sekolah. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat menetapkan keberhasilan pada input-process-output dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-komponen sistem tersebut.

Dalam konteks ini, sekolah/madrasah dapat dikatakan efektif, apabila telah memenuhi standar nasional pendidikan, sebagaimana tersirat dalam PP RI NO. 19 TAHUN 2005 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN, yaitu:

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

- kompetensi tamatan, tompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelaja an, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 2. Standar proses adalah s andar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidik an untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3. Standar kompetensi lulusar adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4. Standar pendidik dan ter aga kependidikan adalah kriteria pendidikan praja atan dan kelayakan fisik maupun mental, serta per didikan dalam jabatan.
- 5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat ber creasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termas uk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 6. Standarpengelolaan adalah sundarnasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- 8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitar dengan mekanisme,

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Salah satu implikasi dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah Pemerintah berkepentingan untuk melakukan pemetaan sekolah/madrasah dengan melakukan pengkategorian sekolah khususnya di SMA berdasarkan tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Pengkategorian sekolah/madrasah dilakukan dalam Sekolah/Madrasah kategori standar, Sekolah/Madrasah Katagori mandiri, Sekolah/ Madrasah Bertaraf internasional, dan Sekolah/Madrasah Keunggulan Lokal.4

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa peserta PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) harus memahami secara benar indikator pencapaian masing-masing strandar nasional pendidikan sebagaimana tersirat dalam PP No. 19 Tahun 2005.

Di samping itu, yang harus difahami oleh setiap praktisi pendidikan dan mahasiswa peserta PPLK (Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan) adalah pemahaman tentang sekolah/madrasah efektif. Sekolah/madrasah efektif akan dapat terwujud apabila sekolah/madrasah tersebut mampu menjadi "komunitas pembelajar secara professional". Dan ini bisa terwujud apabila semua warga sekolah selalu berusaha untuk:

- 1. Mengejar dan mengembangkan kepandaian atau keahlian secara terus-menerus sesuai dengan bidang/ tugasnya;
- 2. Komitmen terhadap kualitas;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Lihat dalam Program Implementasi Sekolah Kategori Mandiri yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Tahun 2007

- 3. Memiliki dan mengen bangkan rasa tanggungjwab moral, sosial, intelektu al dan spiritual; serta
- 4. Memiliki dan mengembangkan rasa kesejawatan dan/atau *teamwork* yang cer las, dinamis dan kompak.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh gambara yang jelas tentang komunitas pembelajar yang profesional per u difahami beberapa karakteristik masyarakat belajar.<sup>6</sup> Bel erapa Karakteristik tersebut adalah:

- 1. Masing-masing anggot harus memiliki kesamaan pengertian dan komiti en terhadap visi, misi dan nilai-nilai yang telah d sepakati untuk diperjuang-kan secara bersama-san a.
- 2. Perlunya pengkajian sicara kolektif, dalam arti semua warga madrasah merupakan regu-regu atau kelompok belajar yang compak dan dinamis dalam mencapai visi, misi dan nilai-nilai yang disepakati, yang dalam prosesnya dapat melalui empat tahapan, yaitu public reflection shared meaning, joint planning dan coordinated action.
- 3. Adanya kerjasama tim sec ara kolaboratif belajar, bukan hanya siswa yang belajar, etapi kepala madrasah, para staf, guru dan tenaga-ten: 3a lainnya juga belajar.
- 4. Berorientasi pada tindaka i nyata dan eksperimentasi, bukan sekedar bicara
- 5. Adanya upaya perbaikan secara terus-menerus dan tidak boleh cepat puas ternadap hasil-hasil yang telah dicapainya

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 197

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Lihat dalam catatan-catatan Hasil Studi Dr.Muhaimin, MA pada "School Management Training" di Kanada, bulan Oktober-Desember 2000. atau lihat dalam: Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendid an Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 198-200

6. Beroirentasi pada hasil. Ini terkait dengan visi, misi dan nilai-nilai yang terlah disepakati.

Dari gambaran di atas, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa yang menjadi landasan bergerak dalam pengelolaan sekolah/madrasah menuju sekolah efektif adalah pernyataan bahwa "semua anak dapat belajar". Hal ini mengisyaratkan pada kita bahwa sekolah merupakan wahana yang menyediakan tempat yang terbaik bagi peserta didik untuk belajar "a place for better learning", artinya bahwa semua upaya manajemen dan kepemimpinan yang terjadi di sekolah diarahkan bagi usaha membuat seluruh peserta didik belajar (on becoming a learner).

B. Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Permendiknas terkait dengan Sistem Pendidikan di Indonesia

Dalam buku ini, tim penyusun melampirkan beberapa salinan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Permendiknas terkait dengan Sistem Pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
- 5. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Aan Komariah & Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 33.

- 7. Permendiknas No. 23 Juhun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- 8. Permendiknas No. 24 Tal un 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Tompetensi Lulusan
- 9. Permendiknas No. 41 Tihun 2007 tentang Standar Proses
- 10. Permendiknas No. 12 T hun 2007 tentang Standar Pengawas
- 11. Permendiknas No. 13 T hun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
- 12. Permendiknas No. 16 T hun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik d n Kompetensi Guru
- 13. Permendiknas No. 24 T hun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Se olah/Madrasah
- 14. Permendiknas No. 25 T hun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Se kolah/Madrasah
- 15. Permendiknas No. 26 Thun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sckolah/Madrasah
- Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pandidikan
- 17. Permendiknas No. 19 Ta nun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
- 18. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Lini
- 19. Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Pendidikan
- Permendiknas No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
- 21. Permendiknas No. 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

- 22. Permendiknas No. 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
- 23. Permendiknas No. 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
- 24. Permendiknas No. 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah
- C. Outline laporan Kegiatan Mahasiswa dalam Mengenal Profil Sekolah/Madrasah Berdasarkan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Laporan Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan tentang latihan mengenal pengelolaan sekolah/madrasah, dibuat secara kelompok/kolektif, dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN

### BABI : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Fokus Kegiatan Mahasiswa Untuk Mengenal Profil Sekolah/Madrasah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

#### E. Sitematika Per ilisan Laporan

BAB II SEJARAH SINGFAT SEKOLAH/

MADRASAH

BAB III : PROFIL SEKOLA H/MADRASAH

A. Standar Isi

B. Standar Proses

C. Standar Kompetensi Lulusan

D. Standar Pendid kan dan Tenaga Kependidikan

E. Standar Sarana dan Prasarana

F. Standar Pengel laan

G. Standar Pembi: 'aan Pendidikan

H. Standar Penilai n Pendidikan

#### BABIV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

### DAFTAR INFORMAN DAFTAR LAMPIRAN

Lamp. 1 : Denah Lokasi Sekolah/Madrasah
Struktu Organisasi Sekolah/

Lamp. 2 Madras 1

Lamp. 3 Pembag in Tugas Pimpinan Sekolah/

Madras 1

Lamp. 4 : Struktu Kurikulum Sekolah/

Madras: 1

Lamp. 5 : Contoh Prota, Promes, Silabus dan

RPP

Lamp. 6 : Format Laporan Hasil Belajar

Lamp. 7 : Daftar Guru

Lamp. 8 : Daftar K ryawan

Lamp.	9	:	Daftar Sarana dan Prasarana
Lamp.	10	:	Foto Wajah Depan Sekolah/Madrasah
Lamp.	11	:	Daftar Prestasi yang pernah diraih Madrasah/Sekolah selama 3 tahun terakhir



# JAM'IYYAH NAHDLATUL 'ULAMA RANTING MANGUNSUMAN

SIMAN - PONOROGO - JAWA TIMUR

https://prnu-mangunsuman.or.id

# BAB II INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH DASAR (SD) MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), yang meliputi :

- Komponen standar isi: instrumen nomor 1—18
- Komponen standar proses: instrumen nomor 19—29
- Komponen standar kompetensi lulusan : instrumen nomor 30—46
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan: instrumen no. 47—65
- Komponen standar sarana dan prasarana : instrumen nomor 66—90
- Komponen standar pengelolaan : instrumen nomor 91—110
- Komponen standar pembiayaan : instrumen nomor 111—135
- Komponen standar penilaian : instrumen nomor 136—157

Dalam rangka mengenal pro fil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah menca i informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pil ak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 11 Tahun 2009.

### A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
	Sekolah/Madrasah melaksanak n kuri-	
1.	kulum berdasarkan muatan kurikulum	
	Tingkat Satuan Pendidikan (KT P).	
	Sekolah/Madrasahmengembant can kuri-	
2	kulum dengan melibatkan pihak terkait	
2.	berpedoman pada panduan per zusunan	
	kurikulum yang disusun oleh BS VP.	
	Sekolah/Madrasah mengen pangkan	
3.	kurikulum dengan menggunakan prinsip pengembangan KTSP	
	Sekolah/Madrasahmelaksanakani engem-	
4.	bangan kurikulum melalui mekanisme	
	penyusunan KTSP.	
	Sekolah/Madrasah melaksanak n kuri-	
5.	kulum dalam bentuk pengaja an ber-	
	dasarkan prinsip pelaksanaan kutikulum	
	Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata	
	pelajaran muatan lokal dengan melibatkan	
	pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2)	
6.	guru, (3) komite sekolah/madrasah atau	
0.	penyelenggara lembaga pendidikan, (4)	
	dinas pendidikan kabupaten/ko:a atau	
	Kandepag, dan (5) instansi to kait di	
	daerah.	
	Sekolah/Madrasah melaksanakan program	
7.	pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler	
9.	Sekolah/Madrasahmenjabarkanstan dar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran.	
10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
11.	Guru mengalokasikan waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada siswa maksimal 40% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran	
12.	Pengembangan KTSP dilaksanakan dengan mengacu kepada: (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta (4) memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah	
13.	Sekolah/Madrasah mengembangan silabus mata pelajaran dengan menggunakan 7 langkah pada Panduan Penyusunan KTSP	
14.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diajarkan	
15.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP	
16.	Sekolah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
17.	Sekolah/Madrasah menentukar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan memperhatikan unsur: (1) kar cteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi satuan pendidik n	
18.	Sekolah/Madrasah menjadwalan awal tahun pelajaran, minggu efekaf, pem- belajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliai.	

# B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
19.	Setiap mata pelajaran memi ki RPP yang dijabarkan dari silabus	
20.	RPP disusun dengan mempert tikan 6 prinsip penyusunan.	
21.	Sekolah/Madrasah melaksanaka i proses pembelajaran dengan memen hi per- syaratan yang ditentukan.	
22.	Proses pembelajaran di ekolah/ madrasah dilaksanakan sesua: dengan langkah-langkah pembelajaran	
23.	Sekolah/Madrasah melaksanak n pembelajaran melalui pendekatan tematik untuk kelas I — III.	
24.	Sekolah/Madrasah melaksanak n pem- belajaran melalui pendekatan mata pelajaran untuk kelas IV — VI	
25.	Pemantauan proses pembelajara: dilaku- kan oleh kepala sekolah/madras h men- cakup tahap perencanaan, ta ap pe- laksanaan, dan tahap penilai n hasil pembelajaran.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
26.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatih- an, dan konsultasi	
27.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tindak lanjut.	
28.	Kepala sekolah/madrasah menyampai- kan hasil pengawasan proses pem- belajaran kepada pemangku kepenting- an.	
29	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil peng- awasan proses pembelajaran.	

## C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
30.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan ber- pikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.	
32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan menge- nali gejala alam dan sosial.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif melalui pemanfaatar sumber belajar berupa; (1) bahan ajat (2) buku teks, (3) perpustakaan, (4) labaratorium, dan (5) internet.	
34.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kegemar n mem- baca dan menulis.	
35.	Siswa memperoleh pengalam n belajar yang menunjukkan kecintaa: dan ke- pedulian terhadap lingkung n sosial dan fisik.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni da budaya lokal	
37.	Dalam satu tahun terakhir, siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya	
38.	Dalam setahun terakhir siswa mem- peroleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan ke- banggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.	
39.	Siswa memperoleh pengalam: 1 belajar yang menunjukkan kebiasa: 1 hidup bersih, sehat, bugar, aman lan me- manfaatkan waktu luang.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tanap per- kembangan anak.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, tolong- menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.	
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan me- mecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan keterampilan menyi- mak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.	
46.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UASBN.	

### D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KE-**PENDIDIKAN**

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
47.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum.	
48.	Guru agama, guru pendidikan jasmani, dan guru kesenian mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	
49.	Guru memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pem- belajaran.	
50.	Guru memiliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
51.	Guru berkomunikasi secar efektif, empatik, dan santun denga sesama pendidik, tenaga kependidik n, orang tua, dan masyarakat	
52.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalan an tugas mengajar dan tugas lainnya.	
53.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputu an (SK) sebagai kepala sekolah/madra ah.	
54.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik minimu: Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D V).	
55.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurar -kurang- nya 5 tahun.	
56.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kompetensi kepribadian	
57.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
58.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang di- tunjukkan antara lain denga adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa	
59.	Kepala sekolah/madrasah nemiliki kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah,berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan nemiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
60.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.	
61.	Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
62.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
63.	Tenaga perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
64.	Tenaga perpustakaan memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan	
65	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus, yaitu: (1) penjaga sekolah/madrasah, (2) tukang kebun, (3) tenaga kebersihan, (4) pengemudi, dan (5) pesuruh	

### E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
66.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa.	
67.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
68.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
69.	Sekolah/Madrasah herada di kasi yang sesuai dengan peruntukan, memiliki status hak atas tanah, ijin per anfaatan dari pemegang hak atas tanah dan ijin mendirikan bangunan	
70.	Lantai sekolah/madrasah emenuhi ketentuan luas minimal sesu i dengan rasio jumlah siswa dan lantai edung.	
71.	Bangunan sekola /madrasah memiliki struktur yang stabil dan ko oh serta dilengkapi dengan sistem pe cegahan bahaya kebakaran dan petir.	
72.	Seko ah/Madrasah memilik sanitasi di dalam dan di luar bangu an yang dapat memenuhi kebutuhai (1) air bersih, (2) saluran air kotor dan/atau air limbah, (3) tempat sampa <sup>1</sup> , dan (4) saluran air hujan.	
73.	Bangunan sekola /madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
74.	Bangunan seko al /madrasal memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.	
75.	Sekolah/Madrasah memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesua dengan peruntukannya	
76.	Sekolah/Madrasah nelakukan pemeliharaan secara berk la baik pemeliharaan ringan maup n berat terhadap bangunan sekolah/madrasah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
77.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana sesuai dengan ketentuan: (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi	
78.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
79.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
80.	Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.	
81.	Sekolah/Madrasah memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
82.	Sekolah/Madrasah memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan sarana laboratorium IPA lengkap.	
83.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
84.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
85.	Sekolah/madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan	
86.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
87.	Sekolah/Madrasah memilik jamban dengan jumlah, ukuran, dan arana se- suai ketentuan	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana suai ke- tentuan.	
89.	Sekolah/Madrasah memilil ruang sirkulasi dengan luas dan kalitas se- suai ketentuan	
90.	Sekolah/Madrasah memilik tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

# E. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
91.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembag:	
92.	Sekolah/Madrasah telah metumuskan dan menetapkan misi lembag	
93.	Sekolah/Madrasah telah metumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan urasan tugas	
97.	Seko ah/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	
98.	Seko ah/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan	
99.	Seko ah/Madrasah melaksanakan ke- giatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
100.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pen- dayagunaan pendidik dan tenaga ke- pendidikan	
101.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	
102.	Sekolah/Madrasah mengelola pem- biayaan pendidikan	
103.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif	
104.	Sekolah/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
105.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan	
106.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiatan evaluasi diri.	
107.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	
108.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi	
109.	Kepala Sekolah/Madrasah melaksana- kan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepemimpinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan	
110.	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan	

## G. STANDAR PEMBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
111.	Sekolah/Madrasah memilik catatan tahunan berupa dokumen inve tasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.	
112.	Sekolah/Madrasah mem elanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan birdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).	
113.	Sekolah/Madrasah memili modal kerja sebesar yang tertua g dalam RKA-S/M untuk membiay seluruh kebutuhan pendidikan	
114.	Sekolah/Madrasah memba ar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lair pendidik pada tahun berjalan.	
115.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan.	
116.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk satu tahun terakhir.	
117.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir	
118.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tuli: untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir	
119.	Sekolah/Madrasah membelanja an biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran sela 1a satu tahun terakhir	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
120.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.	
121.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapa selama satu tahun terakhir.	
122.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir	
123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ ujian selama satu tahun terakhir.	
124.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir	
125.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung untuk satu tahun terakhir.	
126.	Biaya operasi sekolah digunakan untuk: (1) kesejahteraan warga sekolah/ madrasah, (2) pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana pra- sarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan ketatausahaan	
127.	Sekolah/Madrasah memungut biaya pendidikan.	
128.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang setiap awal tahun pelajaran	
129.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
130.	Sekolah/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.	
131.	Pengambilan keputusan sekolah madrasah untuk menarik atau tidak menarik dana dari masyarakat dilakuk n dengan melibatkan unsur: (1) per elenggara pendidikan/ yayasan, (2) kepa i sekolah/ madrasah, (3) komite sekolah nadrasah, (4) perwakilan guru, dan (5) erwakilan tenaga kependidikan.	
132.	Pengelolaan dana dilakuk 1 secara sistematis, transparan, efi en, dan akuntabel	
133.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebi jai dasar dalam penyusunan RKA-S/M	
134.	Sekolah/Madrasah memiliki embukuan biaya operasional.	
135.	Sekolah/Madrasah membua laporan pertanggungjawaban pengel laan ke- uangan dan menyampaikann a kepada pemerintah atau yayasan	

# H. STANDAR PENILAIAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
136.	Guru menginformasikan ancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada iswa pada semester yang berjalan.	
137.	Teknik penilaian yang ada peda silabus telah sesuai dengan indikator pencapai- an kompetensi dasar (KD).	
138.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai den; in bentuk dan teknik penilaian.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian	
140.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa	
141.	Guru mengembalikan hasil pemeriksa- an pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
142.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
143.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa	
144.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	
145.	Guru melaporkan hasil penilaian ke- pribadian siswa kepada guru Pendidik- an Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
146.	ekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas	
147.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat	
148.	Sekolah/madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
149.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
150.	Sekolah/Madrasah melapor an hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.	
151.	Sekolah/Madrasah melaporkan pen- capaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota.	
152.	Sekolah/Madrasah menentukan kelulusan siswa dari satuan pendidikan	
153	Sekolah/Madrasah menentukar nilai ratarata sebagai kriteria kelulusan UASBN.	
154.	Sekolah/Madrasah menentu an nilai minimal mata pelajaran sebag i kriteria kelulusan UASBN.	
155.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Erstandar Nasional (SKHUASBN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).	
156	Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telak lulus	
157.	Sekolah/Madrasah menerin i siswa baru dengan menggunakan berbagai pertimbangan	

## NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Fermendiknas No. 11 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

# BAB III INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MADRASAH TSNANAWIYAH (MTS) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), yang meliputi :

- Komponen standar isi: Instrumen no. 1 17.
- Komponen standar proses : Instrumen no. 18 29.
- Komponen standar kompetensi lulusan : Instrumen no. 30 — 49.
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan
   Instrumen no. 50 75.
- Komponen standar sarana dan prasarana: Instrumen no. 76 103.
- Komponen standar pengelolaan : Instrumen no. 104 123.
- Komponen standar pembiayaan : Instrumen no. 124 — 148.
- Komponen standar penilaian : Instrumen no. 149 169.

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta P LK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait urutuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2009.

#### A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Seko ah/Madrasah melaksana an kuri- kulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).	
2.	Seko ah/Madrasah menger bangkan kurikulum bersama-sama pih < terkait berpedoman pada panduan per yusunan kurikulum yang disusun oleh ESNP.	
3.	Seko ah/Madrasah mengembang- kan kurikulum dengan mengunakan prinsip pengembangan KTSP	
4.	Se o ah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSI <sup>3</sup>	
5.	Seko ah/Madrasah melaksana an kuri- kulum dalam bentuk pengajaran ber- dasarkan prinsip pelaksanaan kurikulum	
6.	Seko ah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan local dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.	
7.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikul	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan layanan konseling.	
9.	Sekolah/Madrasah menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam indikator-indikator untuk setiap mata pelajaran	
10.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
11.	Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.	
12.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/ Kandepag	
13.	Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus mata pelajaran dengan meng- gunakan 7 langkah pengembangan silabus.	
14	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.	
15.	Sekolah/Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran melalui rapat dewan guru.	
16.	Sekolah/Madrasah menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata pelajaran, dan (3) kondisi sekolah/madrasah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
17.	Sekolah/Madrasah menja wa kan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimi iki.	

# B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
18.	kan silabus secara mandiri a u cara lainnya berdasarkan standar isi standar kompetensi lulusan, dan anduan penyusunan KTSP.	
19.	Setiapmata pelajaran memiliki Fencana Pelaksanaan Pembelajaran (RF2) yang dijabarkan dari silabus.	
20.	Dokumen RPP disusun ok guru berdasarkan prinsip keterkait n dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kon petensi, penilaian, dan sumber bahan.	
21.	Dalam mengembangkan KTSl? guru menyusun RPP.	
22.	Sekolah/Madrasah me aksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.	
23.	Proses pembe ajaran di seko ah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah- langkah pembelajaran	
24.	Sekolah/Madrasah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
25.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/ madrasah mencakup tiga tahapan yaitu: (1) tahap perencanaan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap penilaian hasil pembelajaran.	
26.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan empat cara yaitu: (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) pelatihan, dan (4) konsultasi	
27.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah,denganmemperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tidak lanjut.	
28.	Kepalasekolah/madrasahmenyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan	
29.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil peng- awasan proses pembelajaran.	

# C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
30.	siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
32.	Siswa memperoleh pengalamai belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahua lebih lanjut dari berbagai sumber belaja selama satu tahun pelajaran terakhir	
33.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lin kungan secara produktif dan bertanggun jawab	
34.	Siswa memperoleh pengalama meng- ekspresikan diri melalui kegia in seni dan budaya	
35.	Siswa mempero eh pengalaman be ajar melalui jenis kegiatan pada kelompok mata pelajaran kewarganegar in dan kepribadian.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawa	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial	
38.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk men- dapatkan hasil yang terbaik	
39.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.	
40.	Siswa memperoleh peng tlaman belajar untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
41.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.	
42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.	
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok	
46.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis	
47.	Siswa memperoleh pengalaman ke- terampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
48.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya.	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dan mampu menguasai penge- tahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	

## D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KE-**PENDIDIKAN**

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
50.	Guru memiliki kualifikasi kademik minimum diploma empat (Γ IV) atau sarjana (S1).	
51.	Ouru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendid kannya	
52.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalan an tugas mengajar dan tugas lainnya	
53.	Guru merencanakan, mela sanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	
54.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.	
55.	Guru berkomunikasi secat efektif dengan sesama guru, teraga ke- pendidikan, orangtua, dan masyarakat.	
56.	Guru menguasai materi pelajaran yang diajarkan serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.	
57.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kualifikasi Akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).	
58.	Kepa a seko ah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputusan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah	
59.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 tahun pada waktu di- angkat sebagai kepala sekolah	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
60.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjuk- kan dengan keberhasilan mengelola siswa.	
61.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang di- tunjukkan dengan adanya kegiatan ke- wirausahaan sebagai sumber belajar siswa seperti: (1) koperasi siswa, (2) Pe- ternakan/perikanan, (3) pertanian/per- kebunan, (4) kantin sekolah, (5) unit produksi dan lain-lain	
62.	Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring	
63.	Kepala Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal D-III.	
64.	Kepala tenaga administrasi pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.	
65.	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat	
66.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya	
67.	Kepala perpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S dari jalur pendidikan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi.	
68.	Kepala perpustakaan pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.	
69.	Tenaga perpustakaan memiliki kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugasnya sebagai tenaga perpustakaan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
70.	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi akademik minin il D-IV atau SI dari jalur guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/tekr si	
71.	Kepala laboratorium pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal	
72.	Kepala laboratorium minimal me- miliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	
73.	Teknisi laboratorium memiliki kualifikasi akademik Minimal D-II yang relevan dengan peralatan lab ratorium	
74.	Laboran memiliki kualifikasi kademik minimal D-I.	
75.	Sekolah/Madrasah memiliki petugas layanan khusus	

# E. STANDAR SARANA PI ASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
76.	Lahan sekolah/madrasah remenuhi ketentuan luas minimal.	
77.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
78.	Lahan sekolah/ma trasah berada di okasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	
79.	Sekolah/Madrasah berada di kasi yang sesuai dengan peruntukannya memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
80.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
80.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta di- lengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
82.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	
83.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
84.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.	
85.	Sekolah/Madrasah memiliki izin men- dirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya.	
86.	Sekolah/Madrasahmelakukanpemelihara- an terhadap bangunan secara berkala.	
87.	Sekolah/Madrasah memiliki prasarana yang lengkap	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.	
89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
90.	Sekolah/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
91.	Sekolah/Madrasah memantaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
92.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium IPA yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	1

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
93.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
94.	Seko ah/Madrasah memiliki uang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki huang tata usaha dengan luas dan saraha sesuai ketentuan	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah nadrasah dengan luas dan perlengkap 1 sesuai ketentuan	
97.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarar a sesuai ketentuan	
98.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang UKS/M dengan dengan luas dar sarana sesuai ketentuan.	
99.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan lus dan sarana sesuai ketentuan	
100.	Seko ah/Madrasah memiliki ji nban dengan jumlah, ukuran, dan urana sesuai ketentuan	
101.	Seko ah/Madrasah memiliki g lang dengan luas dan sarana sesuai ke- tentuan.	
102.	Seko ah/Madrasah memiliki rang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.	
103.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

## F. STANDAR PENGELOLAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
104.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga, selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan perkembangan serta tantangan di masyarakat.	
105.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi	
106.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga	
107.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah	
108.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
109.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.	
110.	Sekolah/Madrasah melaksanakan ke- giatan sesuai dengan rencana kerja tahunan.	
111.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan.	
112.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kegiat- an pengembangan kurikulum dan pem- belajaran	
113.	Sekolah/Madrasah melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
114.	Sekolah/Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
115.	Seko ah/Madrasa menge a pembiayaan pendidikan.	
116.	Seko ah/Madrasah menciptaka asuasana, iklim, dan lingkungan pembela aran yang kondusif.	
117.	Seko ah/Madrasah masyarakat dan membangun emitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
118.	Sekolah/Madrasah mela sanakan program pengawasan yang lisosiali-sasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.	
119.	Sekolah/Madrasah melai sanakan kegiatan evaluasi progran kerja sekolah/madrasah.	
120.	Sekolah/Madrasah melak anakan evaluasi kinerja pendidik da tenaga kependidikan.	
121.	Seko ah/Madrasah mempersiapkan unsur-unsur pelaksanaan akreditasi	
123.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan.	
124.	Seko ah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

# G. STANDAR PEBIAYAAN

NO	I	NDIKATOI	3	KONDISI NYATA
125.	Se ko ah/Madi Kerja dan Ang (RKA-S/M) stakeholders.	garan Seko	lsun Rencana lah/Madrasah mel batkan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
126.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investas sarana dan prasarana secara menyeluruh	
127.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S/M	
128.	Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA- S/M membiayai seluruh kebutuhan pendidikan.	
129.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain pendidik.	
130.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan lain tenaga kependidikan	
131.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran	
132.	Sekolah/Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan.	
133.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	
134.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	
135.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
136.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan biaya kegiatan rapat.	
137.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya transpor dan perjalanan dinas.	
138	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa.	
140.	Sekolah/Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung.	
141.	Sumbangan pendidikan atau lana dari masyarakat dikelola secara stematis, transparan dan dilaporkat kepada komite sekolah/madrasah.	
142.	Penetapan uang sekolah nadrasah mempertimbangkan ke ampuan ekonomi orangtua siswa	
143.	Sekolah/Madrasah meksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
144.	Se kolah/Madrasah melal ukan pungutan biaya personal lain samping uang sekolah/madrasah.	
145.	Pengambilan keputusan dalam enetapan besarnya dana yang digali dari u asyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (kepala sekolah/madrasah melibatkan komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan tenaga kep ndidikan, perwakilan siswa dan pen elenggara pendidikan/yayasan untuk swasta).	
146.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara transparan, dan akuntubel yang ditunjukkan oleh adanya RKA /M.	
147.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan seba ai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
148.	Sekolah/Madrasah memiliki pem- bukuan biaya operasional	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
149	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan ke- uangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	

## H. STANDAR PENILAIAN

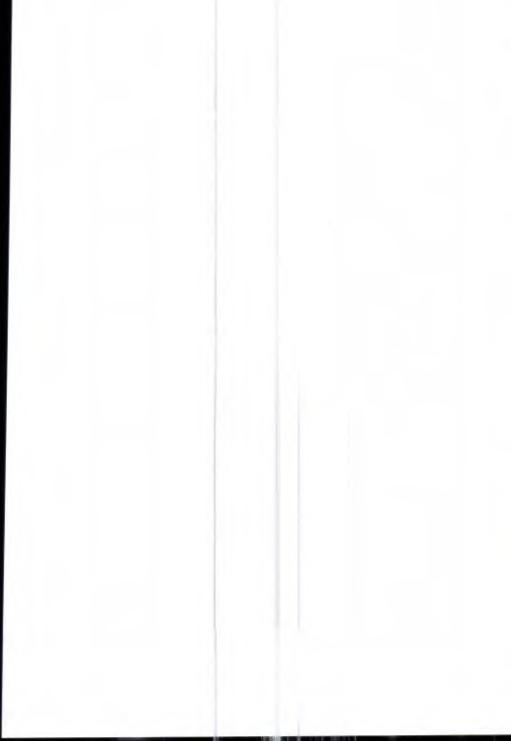
NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
150.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.	
151.	Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapai- an KD.	
152.	Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian	
153.	Guru menggunakan berbagai teknik penilaian.	
154.	Guru mengolah/menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	
155.	Guru mengembalikan hasil pemeriksa- an pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
156.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
157.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa	
158.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
159.	Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada gur pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semeser	
160.	Seko ah/Madrasah mengkoc dinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas	
161.	Seko ah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.	
162.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajar n agama dan akhlak mulia, kewarganes raan dan kepribadian, estetika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehata	
163.	Sekolah/Madrasah melaporkun hasil penilaian setiap akhir semest kepada semua orangtua/wali siswa.	
164.	Seko ah/Madrasah melapork n pen- capaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota.	
165.	Seko ah/Madrasah menentukan ke- lulusan siswa melalui rapat dewan guru sesuai kriteria kelulusan	
166.	Sekolah/Madrasah menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).	
167.	Sekolah/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
168.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.	
169.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan tahun terakhir	
170.	Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UN tahun terakhir.	

#### NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas No. 12 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.



# BAB IV INSTRUMEN MENGENAL SEKOLAH/ MADRASAH SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MADRASAH ALIYAH (MA) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), yang meliputi:

- Komponen standar isi: instrumen no. 1-15.
- Komponen standar proses : instrumen no. 16-25.
- Komponen standar kompetensi lulusan : instrumen no. 26-50.
- Komponen standar pendidik & tenaga kependidikan: instrumen no. 51-70.
- Komponen standar sarana dan prasarana: instrumen no. 71-100.
- Komponen standar pengelolaan: instrumen no. 101-120.
- Komponen standar pembiayaan: instrumen no. 121-145.
- Komponen standar penilaian : instrumen no. 146-165

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peserta PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah mencari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-pihak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 52 Tahun 2008.

## A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Sekolah/Madrasa meksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pindidikan (KTSP).	
2.	Seko ah/Madrasah menger bangkan kurikulum bersama-sama pihak terkait berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh B: NP.	
3,	Seko ah/Madrasah mengen bangkan kurikulum melalui me canisme penyusunan KTSP.	
4.	Sekolah/Madrasah me ai sanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta penday gunaan kondisi sosial dan budaya.	
5.	Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.	
6.	Seko ah/Madrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.	
7.	Sekolah/Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
9.	Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa.	
10.	Guru pelajaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk men- capai kompetensi tertentu.	
11.	Pengembangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang bersangkutan atau Kanwil Depag/Kandepag.	
12.	Dalam mengembangkan KTSP, guru menyusun silabus sendiri.	
13.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.	
14.	Guru mengembangkan silabus sesuai dengan langkah-langkah pada panduan penyusunan KTSP.	
15.	Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.	

## **B. STANDAR PROSES**

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
16.	Sekolah/Madrasah mengembangkan silabus secara mandiri atau cara lainnya berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.	
17.	Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
18.	Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, men- dorong partisipasi aktif siswa, dan menerap- kan teknologi informasi dan kanunikasi.	
19.	Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi per- syaratan yang ditentukan.	
20.	Proses pembelajaran di seko alama langkah dilaksanakan sesuai dengan langkah langkah pembelajaran.	
21.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.	
22.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasa dengan cara pemberian contoh, diskusi selatihan, dan konsultasi.	
23.	Eva uasi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.	
24.	Kepa a seko ah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan	
25.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran	

# C. STANDAR KOMPETENS LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
26.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
27.	Siswa terlibat dalam kegiatan belajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.	
28.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial.	
29.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif	
30.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar.	
31.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan ber- tanggung jawab	
32.	Siswa memperoleh pengalaman meng- ekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.	
33.	Siswa memperoleh pengalaman meng- apresiasikan karya seni dan budaya	
34.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.	
35.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	
36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil ter- baik.	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
38.	Siswa mempero eh pengal nan belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan berneg a secara demokratis dalam wadah NKFI.	
39.	Siswa memperoleh pengala an belajar untuk membentuk karal er siswa, menumbuhkan rasa sport itas, dan kebersihan lingkungan.	
40.	Siswa memperoleh pengalan an belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.	
41.	Siswa memperoleh pengalam an belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif	
42.	Siswa memperoleh pengalaruan belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.	
43.	Siswa mempero eh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok	
46.	Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
47.	Siswa memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.	
48.	Siswa memperoleh keterampi an menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan perkembangannya	-0
50.	Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	

# D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KE-PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
51.	Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya	
52.	Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.	111
53.	Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar	
54.	Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran.	(El)
55.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku	
56.	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa	- 1).
57.	Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
58.	Kepala sekolah/madrasah berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat Keputasan (SK) sebagai kepala sekolah/madrasah	
59.	Kepala sekolal/madrasah memiliki kualifikasi akademik minim m sarjana (S1) atau diploma empat (D-17).	
60.	Kepala sekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 tahun.	
61.	Kepala sekolah/madrasah ni miliki kemampuan manajerial yang tunjukkan dengan keberhasilan mengel a siswa.	
62.	Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaai yang di- tunjukkan antara lain den; in adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa seba ai sumber belajar siswa.	
63.	Kepa a sekolah/madrasah nelakukan supervisi dan monitoring	
64.	Tenaga administrasi minimum me- miliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederaja	
65.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesu i dengan tugasnya	
66.	Tenaga perpustakaan mininum me- miliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederaj t.	
67.	Tenaga perpustakaan mendiki latar belakang pendidikan sesu i dengan tugasnya.	
68.	Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
69.	Tenaga la oratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
70.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus	

## E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
71.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
72.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
73.	Lahan sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.	
74.	Sekolah/Madrasah berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	
75.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
76.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
77.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
78.	Bangunan sekolah/madrasal memiliki ventilasi udara dan pencaha 'aan yang memadai.	
79.	Bangunan sekolah/madrasal memiliki instalasi listrik dengan daya ninimum 1300 Watt.	
80.	Sekolah/Madrasah memiliki zin men- dirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan perurukannya	
81.	Sekolah/Madrasahmelakukan pameliharaan terhadap bangunan secara bankala.	
82.	Sekolah/Madrasah memiliki rasarana yang lengkap	
83.	Seko ah/Madrasah memilik ruang kelas dengan jumlah, uku n, dan sarana sesuai ketentuan.	
84.	Seko ah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dai sarana sesuai ketentuan.	
85.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium biologi yang dapat menampung minimum satu ron xongan belajar dengan luas dan saran sesuai ketentuan.	
86.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat men mpung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
87.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratoriumkimiayangdapatmenampung minimum satu rombongan belajar engan luas dan sarana sesuai ketentuan	
88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu romb ngan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
89.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat me- nampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
90.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
91.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
92.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
93.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.	
94.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
95.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
96.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
97.	Sekolah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan	
98.	Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
99.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
100.	Sekolah/Madrasah memil ki tempat bermain/berolahraga deng 1 luas dan sarana sesuai ketentuan	

# F. STANDAR PENGELOI AAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
101.	Se o ah/Madrasah telah m rumuskan dan menetapkan visi lembag	
103.	Sekolah/Madrasan telah m umuskan dan menetapkan misi lemba; 1.	
104.	Sekolah/Madrasa 1 telah me umuskan dan menetapkan tujuan lemba 3	
105.	Seko ah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat ahunan) dan rencana kerja tahunan	
106.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pegekolaan secara tertulis yang mudah dipalami oleh pihak-pihak terkait.	
107.	Seko ah/Madrasah memiliki truktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.	
108	Seko ah/Madrasah melaksanak in ke- giatan sesuai dengan rencan kerja tahunan.	
109.	Seko ah/Madrasah me aksanak n kegiatan kesiswaan.	
110.	Seko ah/Madrasah melaksanakan ke- giatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
111.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pen- dayagunaan pendidik dan tenaga ke- pendidikan	
112.	Seko ah/Madrasah menge o a sarana dan prasarana pembelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
113.	Sekolah/Madrasah mengelola pem- biayaan pendidikan.	
114.	Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pem- belajaran yang kondusif.	
115.	Sekolah/Madrasah melibatkan masya- rakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.	
116.	Sekolah/Madrasah memiliki program pengawasanyangdisosialisasikankepada pendidik dan tenaga kependidikan.	
117.	Sekolah/Madrasah melaksanakan ke- giatan evaluasi diri.	
118.	Sekolah/Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	
119.	Sekolah/Madrasah mempersiapkan bahan- bahan yang diperlukan untuk akreditasi.	
120.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan	
121	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

# G. STANDAR PEMBIAYAAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
122.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh	
123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKA-S/M).	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
124.	Sekolah/Madrasah memi ki modal kerja untuk membiayai eluruh ke- butuhan pendidikan selam, satu tahun terakhir	
125.	Sekolah/Madrasah mem iyar gaji, insentif, transport, dan tun angan lain bagi guru pada tahun berjal n	
126.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, insentif, transport, dan tun angan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan	
127.	Sekolah/Madrasah men, alokasikan biaya untuk menunjang p laksanaan kegiatan pembelajaran se ama tiga tahun terakhir	
128.	Sekolah/Madrasah meng dokasikan dana untuk kegiatan kesiswa in	
129.	Sekolah/Madrasah mengelu: kan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	
130.	Sekolah/Madrasah menyedia an biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran	
131.	Sekolah/Madrasah menyediakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.	
132.	Sekolah/Madrasah menyedia an biaya pengadaan kegiatan rapat.	
133.	Sekolah/Madrasah menyedia an biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas.	
134.	Sekolah/Madrasah menyediak n biaya penggandaan soal-soal ulangan/jian.	
135.	Sekolah/Madrasah menyedial an biaya pengadaan daya dan jasa.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
136.	Sekolah/Madrasah menyediakan anggar- an untuk mendukung kegiatan operasio- nal tidak langsung selama tiga tahun ter- akhir	
137.	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk ke- sejahteraan dan peningkatan mutu pen- didikan sekolah/madrasah.	
138.	Penetapan uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua siswa.	
139.	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran	
140.	Sekolah/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	
141.	Sekolah/Madrasah melakukan pungut- an biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah	
142.	Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak ter	
143.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan secara sistematis, transparan, efisien, dan akuntabel.	
144.	Sekolah/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
145.	Sekolah/Madrasah memiliki pem- bukuan biaya operasional.	
146.	Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan ke- uangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.	

## H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
147.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran ke ada siswa pada semester yang berjalar	
148.	Si abus mata pe ajaran dilengkapi dengan indikator encapaian kompetensi dasar (KD) dan eknik pe- nilaian.	
149.	Guru mengembangkan insti men dan pedoman penilaian sesuai den an bentuk dan teknik penilaian	
150.	Guru menggunalan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, p nugasan, dan/atau bentuk lain dalar menilai siswa.	
151.	Guru mengolah hasil penilai n untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.	
152.	Guru mengembalikan hasil p meriksa- an pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik.	
153.	Guru memanfaatkan hasil į enilaian untuk perbaikan pembelajaran	
154.	Ouru melaporkan hasil penilai n mata pelajaran pada setiap akhir emester kepada kepala sekolah/madrasan dalam bentuk laporan prestasi belajar iswa	
155.	Guru melaporkan hasil penilaiai akhlak siswa kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
156.	Seko ah/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran melalui rapat dewan gu u.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
157.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.	
158.	Sekolah/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat	
159.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, Kewarganegaraan dan kepribadian, iptek, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan.	
160.	Sekolah/Madrasah menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menen- tukan kelulusan siswa sesuai dengan kriteria yang berlaku	
161.	Sekolah/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa	
162.	Sekolah/Madrasah melaporkan pen- capaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.	
163.	Sekolah/Madrasah menentukan ke- lulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.	
164.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti UN	
165.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus.	
166.	Sekolah/Madrasah menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) SMP/MTs/Paket B sebagai salah satu penentu penerimaan siswa baru.	

### NB.

- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obye tif dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madi asah
- Untuk mempermudal pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasa Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 sebagaim: na terlampir dalam buku ini.

# BAB V INSTRUMEN MENGENAL PROFIL SEKOLAH/MADRASAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK) BERSTANDAR NASIONAL

Untuk mengenal profil sekolah/madrasah, bisa menggunakan instrumen akreditasi SD/MI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang meliputi:

- Komponen standar isi, nomor 1—18.
- Komponen standar proses, nomor 19—31.
- Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 32—62.
- Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 63—87.
- Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 88—112.
- Komponen standar pengelolaan, nomor 113—138.
- Komponen standar pembiayaan, nomor 139—164.
- Komponen standar penilaian, nomor 165—185.

Dalam rangka mengenal profil sekolah/madrasah secara detail. Tugas mahasiswa peser a PPLK atau peneliti dalam dunia pendidikan adalah men ari informasi atau data yang valid dan jujur dari pihak-phak terkait untuk mengisi instrumen yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2009.

## A. STANDAR ISI

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
1.	Program keahlian me iksanakan kurikulum berdasarkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (K´SP).	
2.	keahlian dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tahapan penyusunan KTSP	
3.	Kuri ulum program ceahlian dikembangkan sesuai dengan mekanisme penyusunan KTSF	
4.	kurikulum program leahlian dilal sanakan berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pem- belajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi so ial dan budaya.	
5.	Penyusunan silabus mata pelajaran muatan lokal melibatkan berbagai pihak.	
6.	Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk ke- giatan ekstrakurikuler.	
7.	Program keahlian melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
8.	Program Praktik Kerja Industri (prakerin) dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu pada struktur kurikulum.	
9.	Program keahlian menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.	
10.	Guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.	
11.	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran mata pelajaran ke- wirausahaan sesuai dengan ketentuan dalam struktur kurikulum	
12.	Pelaksanaan pembelajaran seluruh mata pelajaran di program keahlian memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	
13.	KTSP disahkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Depag.	
14.	Dalam mengembangkan KTSP, guru/ kelompok guru dalam program keahlian secara aktif menyusun silabus.	
15.	Guru mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan langkah- langkah pada Panduan Penyusunan KTSP	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
16.	Program keahlian meng mbangkan silabus berdasarkan standar si, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP secara m ndiri atau berkelompok.	
17.	Program keahlian menentuk n Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tiap mata pelajaran dengan memperhati an unsur: 1) karakteristik siswa, 2) ki akteristik mata pelajaran, dan 3) kondisi program keahlian.	
18.	Program keahlian menjadwal an awal tahun pelajaran, minggu efek if, pembelajaran efektif, dan hari li ur pada kalender akademik program eahlian yang dimiliki.	

## B. STANDAR PROSES

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
19.	Setiap mata pelajaran memiliki R <sup>D</sup> P yang disusun secara lengkap dan sisten atis	
20.	Penyusunan RPP sudah memperhati- kan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan TIK.	
21.	Program keahlian me aksanakan proses pembelajaran sesuai dengan per- syaratan yang ditentukan.	
22.	Proses pembelajaran di program keahlian dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran	
23.	Program keahlian melaksanakan proses pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (sesuai dengan tingkat kebutuhan program keahlian nya) dengan SDM yang memiliki kesesunian kompetensi	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
24.	Kegiatan wirausaha pada business center dilakukan sebagai wahana untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan keahliannya	
25.	Sekolah/Madrasah menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama dengan DU/DI.	
26.	Siswa melakukan prakerin untuk memperoleh kompetensi kejuruan.	
27.	Pemantauan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah mencakup tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian hasil pembelajaran.	
28.	Supervisi proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi	
29.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu 1) persiapan, 2) pelaksanaan, 3) evaluasi pembelajaran, dan 4) rencana tindak lanjut	
30.	Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan (pemantauan,supervisi, dan evaluasi) proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.	
31.	Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran	

## C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
32.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan	
33.	Siswa terlihat dalam kegiatan bajar yang berkaitan dengan analisis dan pemecahan masalah-masalah kompleks.	
34.	Siswa memperoleh pengalam i belajar yang dapat menganalisis gejala ilam dan sosial melalui mata pelajaran IP/ dan IPS	
35.	Siswa memperole pengalai an be- lajar dalam kelompok mata ; elajaran Adaptif secara efektif	
36.	Siswa memperoleh pengalama: be ajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahua lebih lanjut dari berbagai sumber belaj c	
37.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu memanfaatkan ling kungan secara produktif dan bertanggung awab	
38.	Siswa memperoleh pengalaman meng- ekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.	
39.	Siswa memperoleh pengalaman meng- apresiasikan karya seni dan budaya.	
40.	Siswa memperoleh pengalaman elajar untuk menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab	
41.	Siswa memperoleh pengalaman Jajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial	
42.	Siswa memperoleh pengalaman bajar yang mampu menumbuhkan ikap kompetitif untuk mendapatkan hasil ter- baik	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
43.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.	
44.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.	
45.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan ke- bersihan lingkungan	
46.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam per- gaulan di masyarakat	
47.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran agama melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif.	
48.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global	
49.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam pembentukan akhlak mulia melalui pembiasaan dan pengamalan	
50.	Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain	
51.	Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
52.	Siswa memperoleh pengalar an belajar dalam berkomunikasi baik lis n maupun tulisan secara efektif dan sant in.	
53.	Siswa mempero eh ke :rampi an membaca dan menulis nask ih secara sistematis dan estetis.	
54.	Siswa memperoleh ket rampilan menyimak, membaca, mendis, dan berbicara, baik dalam Bahasa ndonesia maupun Bahasa Inggris.	
55.	Siswa memperoleh pengalam n belajar dalam mengembangkan ipte s (ilmu pengetahuan, teknologi, den seni) seiring dengan perkembangann n	
56.	Siswa memperoleh pengalama belajar agar menguasai kompetensi teahlian dan kewirausahaan, melalui tegiatan pembelajaran yang memuat stuli kasus (nyata dan rekaan)	
57.	Program keahlian memiliki prestusi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN teori dan praktik kelompok mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	
58.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran Matematika pada tahun terakhir	
59.	Program keahlian memiliki prestas yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata UN mata pelajaran Bahasa Inggris pada tahun terakhir.	
60.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata- rata UN mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun terakhir.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
61.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan pencapaian nilai rata-rata uji kompetensi mata pelajaran produktif pada tahun terakhir.	
62.	Program keahlian memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan persentase tingkat kelulusan pada tahun terakhir.	

## D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KE-PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
63.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diplom empat (D-IV). Untuk bidang tertentu, kualifikasi kepakaran ditunjukkan dengan pengakuan lain setingkat S1 atau D-IV.	
64.	Guru mata pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya	
65.	Program keahlian memiliki guru mata pelajaran produktif sesuai dengan jumlah rombelnya	
66.	Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas meng- ajar dan tugas lainnya	
67.	Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran	
68.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku	
69.	Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
70.	Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkann a dengan metode ilmi	
71.	Guru mata pelajaran produktit nemiliki sertifikat sesuai dengan keahli nnya	
72.	Guru mata pelajaran roduktif memiliki satu kompetensi ut ma dan dua kompetensi tambahan	
73.	Kepala program keahlian erstatus sebagai guru, memiliki ertifikat pendidik, dan Surat Keputu in (SK) sebagai kepala program keahli n	
74.	Kepala program keahlian nemiliki kualifikasi akademik minimun sarjana (S1) atau diploma empat (D-JV), atau pakar kejuruan lain yang setingkat untuk bidang tertentu	
75.	Kepala Program keahlian nemiliki pengalaman mengajar kurang- kurangnya 5 tahun.	
76.	Kepala program keahlian memiliki ke- mampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola program keahlian	
77.	Kepala program keahlian memiliki kemampuan kewirausahaan yang di- tunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mangelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa	
78.	Kepa a sekolah/ma rasah atau kepa a program keahlian melakukan supervisi dan monitoring	
79.	Tenaga administrasi minimum me- miliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
80.	Tenaga administrasi memili latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
81.	Tenaga perpustakaan minimum me- miliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat.	
82.	Tenaga perpustakaan minimum me- miliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
83	Kepala laboratorium/bengkel program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang ter- tuang dalam Permendiknas	
84.	Teknisi laboratorium/bengkel program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai dengan standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah yang tertuang dalam Permendiknas	
85.	Laboran program keahlian memiliki kualifikasi akademik minimum sesuai standar tenaga laboratorium sekolah/ madrasah yang tertuang dalam Permendiknas	
86.	Program keahlian memiliki tenaga layanan khusus.	
87.	Program keahlian memiliki tenaga teknisi maintenance peralatan dan gedung	

# E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
88.	Sekolah/madrasah memiliki lahan yang memenuhi ketentuan luas minimal	
89.	Sekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
90.	Sekolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari ganggu- an pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan	
91.	Fasi itas pembelajaran berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.	
92.	Luas antai yang digunakan Program Keahlian memenuhi ketent an luas minimal.	
93.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta di- lengkapi dengan sistem percegahan bahaya kebakaran dan petir	
94.	Seko ah/Madrasah memiliki sa itasi di dalam dan di luar bangunan ya g dapat memenuhi kebutuhan: (1) air be sih, (2) saluran air kotor dan/atau air imbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan.	
95.	Program keahlian memiliki bu'u teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas	
96.	Program keahlian memanfaatkan buku teks pelajaran yang telah diterapkan dengan Permendiknas.	
97.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.	
98.	Bangunan sekolah/ma arasah memili i instalasi listrik dengan daya min num 1300 Watt untuk administrasi sekolah dan ruang teori, serta daya tambahan untuk laboratorium dan bengkel sesuai kebutuhan.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
99.	Sekolah/Madrasah memiliki izin men- dirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukan- nya	
100.	Sekolah/Madrasah melakukan pe- meliharaan terhadap bangunan secara berkala.	
101.	Program keahlian memiliki ruang pembelajaran umum (RPU) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/ MAK	
102.	Program keahlian memiliki RPU dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	
103.	Program keahlian memiliki RPU dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
104.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang penunjang (RP) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	
105.	Sekolah/Madrasah memiliki RP dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
106.	Sekolah/Madrasah memiliki RP dengan sarana sebagaimana tercantum pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/ MAK.	
107.	Program keahlian memiliki ruang pembelajaran khusus (RPK) sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK	
108.	Program keahlian memiliki RPK dengan ukuran minimum sesuai dengan yang disyaratkan pada Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
109.	Program keahlian memiliki RPI dengan sarana sebagaimana tercanti: 1 pada Standar Sarana dan Prasarar SMK/ MAK.	
110.	Sekolah/Madrasah memiliki busmess center sebagai wahana kewirausa aan	
111.	Program keahlian memiliki busir ss center yang dapat menghasilkan barang lan atau jasa yang tersebar luas secara nas anal	
112.	Sekolah/Madrasah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) dengan xerbagai kegiatan.	

## F. STANDAR PENGELOLA IN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
113.	Seko ah/Madrasah telah mer muskan dan menetapkan visi lembaga.	
114.	Seko ah/Madrasah telah mer muskan dan menetapkan misi lembaga	
115.	Program keahlian telah merumuskan dan menetapkan tujuan lemba a	
116.	Program keahlian memiliki renc na rerja jangka menengah (empat tahu an) dan rencana kerja tahunan	
117.	Program keahlian memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
118.	Program keahlian memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas dan mekanisme kerja	
119.	Program keahlian melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan	
120.	Program keahlian melak anakan kegiatan kesiswaan	

121.	Program keahlian melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	
122.	Program keahlian melaksanakan pen- dayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
123.	Program keahlian mengelola sarana dan prasarana pembelajaran	
124.	Program keahlian mengelola pem- biayaan pendidikan.	
125.	Program keahlian menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.	
126.	Program keahlian melibarkan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan	
127.	Program keahlian melakukan kegiatan pelatihan kejuruan bagi teknisi atau laboran dalam rangka pemutakhiran ke- ahlian kejuruan	
128.	Program keahlian menjalin kerjasama dengan DU/DI dalam melaksanakan magang guru.	
129.	Program keahlian menerapkan Sistem Manajemen Mutu	
130.	Bidang garapan business center sesuai dengan bidang kejuruan yang dimiliki program keahlian.	
131.	Penge olaan business center melibatkan seluruh warga program keahlian	
132.	Bursa Kerja Khusus (BKK) yang dimiliki sekolah/madrasah mampu menyalurkan penempataan kerja bagi lulusan di DU/ DI dalam 3 tahun terakhir.	
133.	Program keahlian memiliki program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan	

134.	Program keahlian melaksan kan kegiatan evaluasi diri.	
135.	Program keahlian mel sanakan evaluasi kinerja pendidik dan naga ke- pendidikan	
136.	Program keahlian memp rsiapkan unsur-unsur pelaksanaan akre litasi	
137.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan	
138	Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan.	

## G. STANDAR PEMBIAYAA N

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
139.	Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen invesi si sarana dan prasarana secara menyelur h.	
140.	Seko ah/Madrasah membanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berlasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/ Madrasah (RKAS/M).	
141.	Sekolah/Madrasah memilik modal kerja sebesar yang tertuan dalam RKAS/M untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan	
142.	Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan sekolah/n adrasah, insentif, dan tunjangan lain lagi guru pada tahun berjalan	
143.	Sekolah/Madrasah membayar gati, honor kegiatan sekolah/madrasah, insentif, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan	
144.	sekolah/Madrasah membelanja in biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun rakhir.	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
145.	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
140.	dana untuk kegiatan kesiswaan	
	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya	
146.	pengadaan alat tulis untuk kegiatan	
	pembelajaran.	
	Sekolah/Madrasah membelajakan biaya	
147.	pengadaan bahan habis pakai untuk	
	kegiatan pembelajaran	
	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
148.	biaya pengadaan alat habis pakai untuk	
	kegiatan pembelajaran	
149.	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
147.	biaya untuk kegiatan rapat.	
150.	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
150.	biaya transport dan perjalanan dinas	
1.51	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya	
151.	penggandaan soal-soal ulangan/ujian	
4.50	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
152.	biaya daya dan jasa	
	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
153.	anggaran untuk mendukung kegiatan	
155.	operasional tidak langsung selama tiga	
	tahun terakhir	
	Sekolah/Madrasah membelanjakan	
154.	biaya untuk menunjang kegiatan	
15 1.	prakerin, uji kompetensi, bimbingan	
	karir, dan program kewirausahaan. Sumbangan pendidikan atau dana	
	Sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat digunakan untuk	
155.	kesejahteraan dan peningkatan mutu	
	pendidikan sekolah/madrasah	
	Penetapan uangsekolah/madrasah mem-	
156.	pertimbangkan kemampuan ekonomi	
100.	orangtua siswa.	
	Siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang	
157.	pada setiap awal tahun pelajaran	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
158.	Sekolah/Madrasah melaksana n subsidi silang untuk membantu sisw kurang mampu	
159.	Sekolah/Madrasah melakukan pungut- an biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.	
160.	Pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait	
161.	Pengelolaan dana dari masyarakat sebagai biaya personal dilakuk n secara transparan, efisien, dan akunt bel yang ditunjukkan oleh adanya RKA- M	
162.	Seko ah/Madrasah memiliki sedoman pengelolaan keuangan seba i dasar dalam penyusunan RKA-S/M.	
163.	Sekolah/Madrasah memiliki uku Kas Umum (BKU).	
164.	Seko ah/Madrasah membuat Taporan pertanggungjawaban pe gelolaan keuangan dan menyampaikann a kepada pemerintah atau yayasan.	

# H. STANDAR PENILAIAN

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
165.	Guru menginformasikan r ncangan dan kriteria penilaian yang a a dalam silabus mata pelajaran kepada s swa pada semester yang berjalan	
166.	Teknik penilaian dalam silai us mata pelajaran sesuai dengan indik tor pencapaian kompetensi dasar (KD).	
167.	Guru mengembangkan i strumen dan pedoman penilaian sesua dengan bentuk dan teknik penilaian	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
168.	Gurumenggunakan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.	
169.	Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa	
170.	Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik	
171.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran	
172.	Guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada kepala program keahlian dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa.	
173.	Guru me aporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.	
174.	Guru melaporkan hasil penilaian ke- pribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester	
175.	Program keahlian mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas	
176.	Program keahlian menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester) melalui rapat	
177.	Sekolah/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak; kewarganegaraan dan kepribadian; estetika; serta jasmani, olahraga, dan kesehatan	
178.	Program keahlian menyelenggarakan ujian semester sesuai Prosedur Opersional Standar (POS)	

NO	INDIKATOR	KONDISI NYATA
179.	Program keahlian melapor an hasil penilaian setiap akhir semest r kepada orang tua/wali siswa	
180.	Seko ah/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada Dinas Pendidikan Kabup ten/Kota atau Kanwil Depag	
181.	Program keahlian menentuka ke ulusan siswa dari satuan pendidika 1	
182.	Seko ah/Madrasah menyerah in Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang nengikuti Ujian Nasional (UN).	
183.	Seko ah/Madrasah menerbit an dan menyerahkan ijazah kepad setiap siswa yang telah lulus	
184.	Seko ah/Madrasah mer gunakan hasil Ujian Nasional (UN) MP/MTs/ Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan (UNPK) Program Paket B seba ai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru.	
185.	Uji kompetensi melibatkan berbagai pihak.	

## NB.

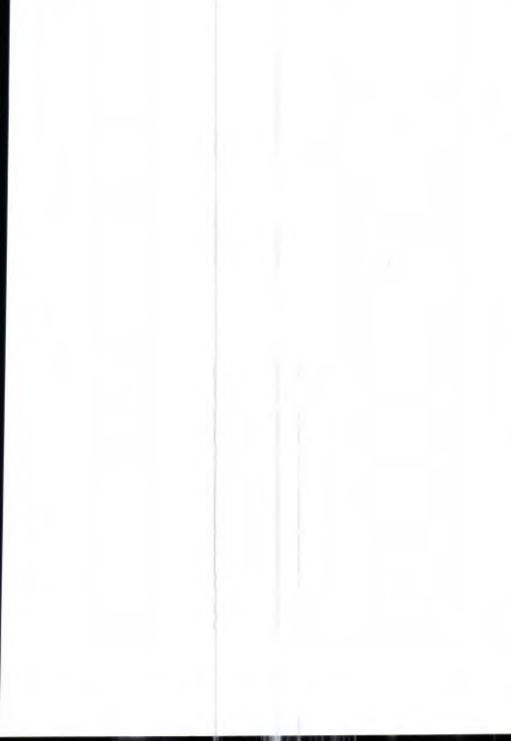
- Pada kolom kondisi nyata, isilah masing-masing indikator secara obyekt f dan jujur sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah
- Untuk mempermudah pengisian kolom kondisi nyata, lihat penjelasan Permendiknas No. 13 Tahun 2009 sebagaimana terlampir dalam buku ini.

## BAB VI PENUTUP

Kualitas pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) merupakan salah satu unsur utama dari kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagai penghasil calon guru. Diharapkan dengan disusunnya buku ini pelaksanaan PPLK menjadi berkualitas dan profesional. Kualitas pelaksanaan PPLK sangat bergantung dari komitmen mahasiswa, di samping lembaga pelaksana, guru pamong, dosen pembimbing dan Kepala Sekolah tempat praktik.

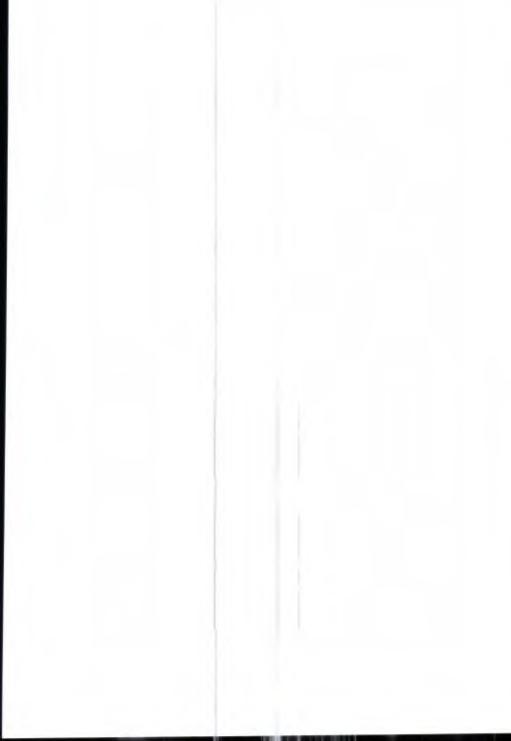
Segala upaya telah dilakukan untuk menyusun buku ini, namun bukan mustahil dalam pedoman ini masih terdapat ke-kurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan komentar yang dapat dijadikan dan menyempurnakan pedoman ini di masa yang akan mendatang.

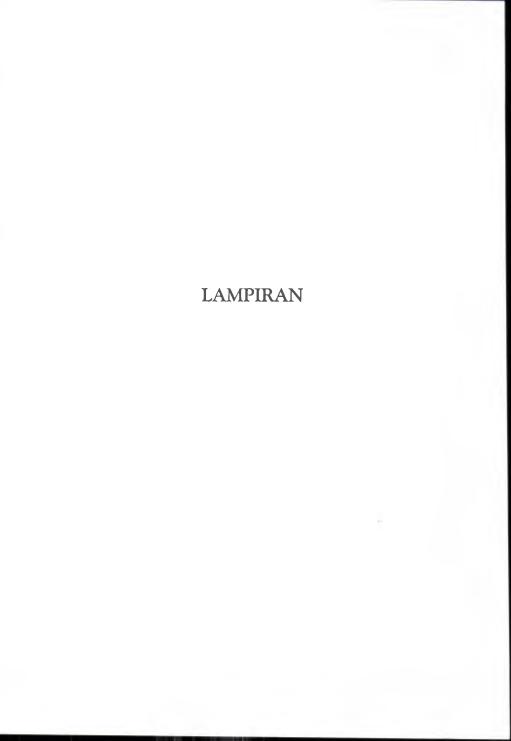
Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi para peserta PPLK mahasiswa Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Dan selebihnya dapat bermanfaat bagi para pratisi dan peneliti pendidikan. Amin.

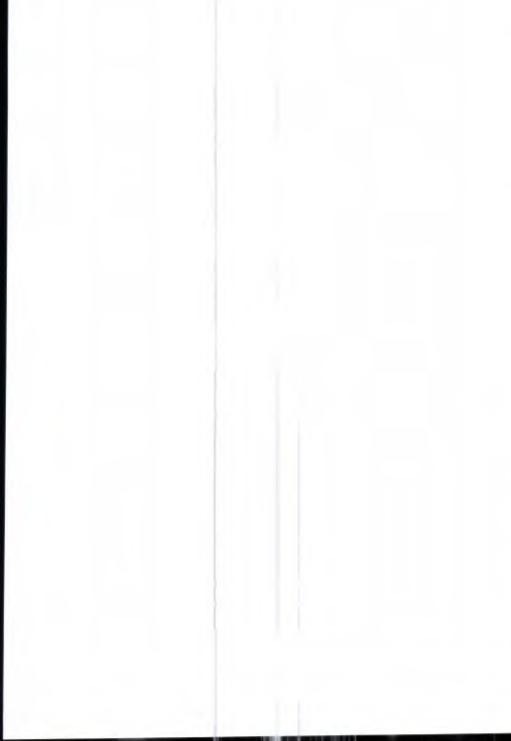


## DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. *Menjadi Komunitas Pembelajar.* Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Komariah, Aan & Triatna, Cepi. Visionary Leadership Menuju Sekolah efektif. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Permendiknas No. 11 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
- Permendiknas No. 12 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
- Permendiknas No. 13 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
- Permendiknas No. 52 Tahun 2008 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
- Sidi, Indra Djati. Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigama Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta, 20









#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 19 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

#### STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat 👱 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan-

- Standar nasional pendidikan a lalah kriteria mi al tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang betruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan berjenjang yang terdiri atas pendidikan
- Pendidikan nonformal adalah alur pendidikan ular pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Standar kompetensi lulusan adalah kualifik kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 5. Standar isi adalah ruang linglup materi dar lili kat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi baha kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipe juhi oleh peserta dik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- Standar proses adalah stardar nasional pedidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan unul mencapai standar kompetensi lulusan.
- Standar pendidik dan tenaga kependidikan ada kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan
- Standar sarana dan prasarana adalah standar i sionai pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahi a, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkre dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelaja 1, temasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Standar pengelolaan adalah standar nasional andidikan yang berkaltan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasar kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi daleefektivitas periyelenggaraan pendidikan.
- 10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengurur komponen dan besamya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- 11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasi mal pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- 12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagin dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan an irr dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teraini dan berkelanjutan.
- 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pentaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kerikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikar.

- 15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- 16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- 17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belaiar peserta didik.
- 18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- 21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
- 23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
- 24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pernerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
- 25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 27. Badarı Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### LINGKUP, FUNGS DAN TUJUAN

Pasa

(1) Lingkup	Standar	Nasional	Pendidikan	meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga ke pendidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;dan
- h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengenda an mutu pendim an sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan serlifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara li encana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan gio

#### Pasa

Standar Nasional Pendidikan berfungs sebagai dasar 📗 am perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkar pendidikan nasio al yang bermutu.

#### Pasa

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu endidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradat n bangsa yang bermartabat.

BAB I

STANDAF SI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kom etensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me jat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kaleni jendidikan/akademik.

#### Bagian Kedua

#### Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

#### Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jeriis pendidikari umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kelompok mata pelajaran estetika;
  - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan meriulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(5) Kelompok mata pelajaran ilmu per getahuan dan to logi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dar/a ukegiatan bahasa, matematika, amu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterar ipilan/kejuruan, 🛌 iologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan khologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegia: bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, ke uruan, teknologi formasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SU M/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK atau bentuk lain 🕟 ig sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan matan lokal yang relevan.

(8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/M/v/SMALB/ Pake 🛸 SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ata i kegiatan pendim an jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

#### Pasa

(1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan 🐖 didikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai den jan Standar Nassalal Pendidikan.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksuo pada ayat (1) tari atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulurn agai mana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program sludi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris,
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliat yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ki iga

Beban Br jar

#### Pasal III

(1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, \$MP/MTs/SMPL | SMA,MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap mili gu setiap semester dengan sistem tatap muka. penugasan terstruktur, dan kegiatan mandin tidak terstru-ur, sesuai kebutuhan dan cin khas masing-masing.

(2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapal n ambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agara, an akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menten berdasarkan usulan BSNP.

### Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk la n yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

#### Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat. SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh

peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutar atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

### Pasal III

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendic n pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan diletapkan dengan Peraturan Mer teri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

### Bagian Kemapat

Kurikulum Tingkat Salian Pendidikan

### Pasal

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan per li ikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
  - a. Model-model kuriku um tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SM4/MA/SMALB, da SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar.
  - b. Model-model kuriku um tingka satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, da SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun un h BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan genengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan seta jaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurangkurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunaan sistem kredit semester.

#### Pasal III

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SN: //MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB. SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai deng i satuan pendidikan, potensi daerah/karaktenstik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan pesei didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan kon te madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerang dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggu gjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemenntah ini dan standar kerapetensi lulusan.

(4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

### Bagian Kelima

### Kalender Pendidikan/Akademik

### Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV

### STANDAR PROSES

#### Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik membenkan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilajan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

#### Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

### Pasal 22

(1) Penilajan hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

- (2) Teknik penilaian sebagaimana din aksud pada avalan) darat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelo npok mata pela an ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, leknik penilaian, bservasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu sernester.

### Pasal III

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimas ud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langki tindak lanjut yang diperlukan.

#### Pasai

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaa proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### BAB

### STANDAR KOMPETT ISI LULUSAN

#### Pasal

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai peda pan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagai mana dimaksud ; da ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliali atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pela aran bahasa me 💮 kankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada a (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

### Pasal 2

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jen ang pendidikan 🐇 ar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampian untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, ser keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan 📹 nengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, se: keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tiriggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memii ki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

### **BAB VI**

### STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu

#### Pendidik

### Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menten.

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

- b. latar belakang pendidikan tingci di bidang perici di lan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SD 1/1/I
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau ben uk lain yang sed- ajat memiliki:
  - a, kualifikasi akademik pendidikar minimum diploni empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SM 1/MTs
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang secin ijat memiliki.
  - a. kualifikasi akademik pendidikar minimum diplori empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi ::engan program | ndidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SM 4/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMA.B, atau bentuk in yang sederajat memiliki:
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diplo a embat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - b. sertifikat profesi guru untuk SDI.B/SMPLB/SMA
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau beriluk lain yang ser rajat memiliki:
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diplon: empat (D-IV) atau sarjana (S1)
  - b. latar belakang pendidikan tinggi Jengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
  - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri al guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kepelan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdin tas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan padidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana d maksud pada ay 2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelom ok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang seder iat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang per ugasannya di let an oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdin atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masingmasing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguli.

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
  - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
  - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
  - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program yokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

### Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menten yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

### Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menten berdasarkan usulan dari BSNP.

### Bagian Kedua

### Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan pada:
  - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekuran kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
  - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekura kurar gnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan enaga kebersihan sekolah/madrasah.
  - c. SMP/MTs atau bentuk lain yan | sederajat dan Sil A/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasa enaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/midrasah.
  - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekura pakurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan enaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
  - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yar sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustak ana, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosialari terapis.
  - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurançı a terciri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
  - g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keteram. In sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustal an, dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan seba mana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus meniliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifik:isi sebagaimana maksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri,

### Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihari arus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga ke indidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Perati an Menteri.

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/R/ meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetens ebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
- d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK:
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepimpinanan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
  - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
  - d. Memiliki kemampuan kepimpinanan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dari ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
  - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangriya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurangkurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi:
  - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan:

- c. lulus seleksi sebagai pengawas satuari pendidikan
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebu iimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peratu an Menten.

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh per ilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
  - a. Berstatus sebagai pamong belaja ⁴pamong atau jultan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangrya 5 (lima) tahun au pemah menjadi pengawas satuan pendidikan formal:
  - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang belaku;
  - c, memiliki sertifikat pendidikan fur usional sebagai pinilik; dan
  - d. lulus seleksi sebagai penilik.
- (3) Kriteria penilik suatu satuan percidikan sebagai ina cimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapl an dengan Pera an Menteri.

### Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan yang me aksanakan pen in kan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelen agarakan pemb∉li aran Lagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimar ilimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menjeri.

### BAB VIII

### STANDAR SARANA DI IN PRASARANA

### Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana ya j meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan hal s pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan erkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana ang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya an jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreasi, dan ruang/tempal lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

#### Pasal III

(1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilm pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersecii:

- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menten.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

### Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menten.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menten.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menten yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

### Pasal 46

(1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

(2) Kriteria penyediaan akses sarana (an prasarana sali gaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Per∉turan Menter.

### Pasal

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan set aimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai s∌bagaimana dir⊫ sud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### Pasal

Standar sarana dan prasarana sebagai mana dimaksud am Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Merileri.

### BAB VIII

### STANDAR PEN ELOLAAN

Bagian F atu

Standar Hengelolaan Ole Satuan Pendidikan

### Pasa

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendida an dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian. ke mitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perunca g-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akadi nik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masi g-masing perguruan tinggi.

### Pasa

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang ke; a satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu mirinal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akadi nik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

### Pasal III

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasa dan menengah di bidang non-akademik dilakukan

oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.

(3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
  - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
  - Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
  - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
  - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
  - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  - f. Peraturan akademik:
  - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
  - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
  - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;

- c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pan semester gasal, semester genap dan semester pendek bila ada:
- d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
- e, buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-mas ag mata pelajaran;
- f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- g, pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal lahan nabis pakai;
- h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kej 🤍 didikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
- i, jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi saru pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan der gan komite sekci /madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah:
- i, jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akada k untuk jenjang pendidikan tinggi;
- k, rencana anggaran pendapatan dan belanja satua endicikan untuk masa kerja satu tahun;
- Liadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kire satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, ren⇔ kerja sebagaimana di⊓aksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan jendidik setela memperhatikan perlimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja set a aimar a dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara andin, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jerijang pendidikan dasar dan menergah yang tidak sesuai dengan rencana keria tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jeurang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagai mana diatur oleh masing-masing pergurian tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada injang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidi kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang percidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagairnana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

#### Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

#### Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penlik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

### Bagian Kedua

### Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
  - wajib belajar;
  - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

- c, penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik ang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- e, peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. akreditasi pendidikan:
- g, peningkatan relevansi pendidika i terhadap kebuhili ari masyarakat; dan
- h, pemenuhan Standar Pelayanan Vinimal (SPM) to long pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagainan dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati Ni kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Bagian ( ja

### Stand ir Pengelolaan Ch Pemerintah

#### Pasal 6

Pemerintah menyusun rencana keria tahunan bidang pelilidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar,
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk ang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan but : aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik ang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan:
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutu an lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bilang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

### Pasal fill

(1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekuran kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembai akan menjadi salah pendidikan bertaraf internasional.

(2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

### BAB IX

### STANDAR PEMBIAYAAN

### Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya mariusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
  - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
  - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

### BAB X

### STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
  - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
  - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
  - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
  - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ked a

### Penila an Hasil Belajar Ileh Fendidik

#### Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana di saksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, ken luan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semesi dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diguni kan untuk:
  - a, menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
  - b. bahan penyusunan laporan kerrajuan hasil bela dan
  - c. memperbaiki proses pembelaja an.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mala pelajaran agai ⊣ dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui
  - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; sena
  - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk men ur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran il r enge ahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan lakteristik materi yang dinilai
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran stetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan penilaku dan sikap untuk menilai perkemban an afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jas ani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
  - a. pengamatan terhadap perubat an perilaku dan sap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
  - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur pek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah B P menerbitkan panduan penilaian untuk:
  - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mata ja
  - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
  - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian etiga

Penilaian Hasil Belaiar h Satuan Pendidikan

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepibadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dan nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

### Bagian Keempat

### Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

### Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

### Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menten.

### Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

- b. dasar seleksi masuk jenjang per didikan berikutnya
- c, penentuan kelulusan peserta didik dari program da Vatau satuan pendidikan;
- d, pembinaan dan pemberian banti an kepada satuar pendi dikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

#### Pasal (

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak nengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayar (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal da pat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperolen surat keteranga: hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasianal.

### Pasal )

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau t entuk lain yang derajat, Ujian Nasional mericakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan I mu Pengetahua Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nas onal mencakup ilita pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPIII) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lair ing sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Inu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakua nata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilm Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang seder. it, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata peliluran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujjan Nasional mencaku, nata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khan program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang serajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata 🗈 lajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

### Pas 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian elima

Kelu san

Pat 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikari seluruh program pembelajaran:
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhiak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. Iulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### BAB XI

### BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

(BSNP)

### Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandin dan profesional.

### Pasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

### Pasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menten.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan.

### Pasal 76

(1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

- (2) Standar yang dikembangkan oleh ESNP berlaku efel dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebaga mana dimaksuc in da ayat (1) BSNP berwenang:
  - a. mengembangkan Standar Nasir nal Pendidikan;
  - b. menyelenggarakan ujian nasior al;
  - c. memberikan rekomendasi kerjada Pemerintal an pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan
  - d, merumuskan kriteria kelulusan cari satuan pend 🧼 an pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

### Pasa

Dalam menjalankan tugasnya sebaç≆imana dimaks dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen ya nenangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kal⊪aten/kota.

BAB

EVALU SI

Pasa 3

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan c satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pili k yang berkepentingan;
- b, evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Da rah Provinsi
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Carrah Kabupaten/Kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang ibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidili in:

### Pasa '9

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 78 Lutir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selli rang-kurangnya meliputi:
  - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tinaga kependidikan;
  - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendid in dan kegiatan ekstrakurikuler;
  - c. hasil belajar peserta didik;dan
  - d. realisasi anggaran;

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menten terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

#### Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

#### Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala,

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
  - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan riasional:
  - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
  - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteni.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
  - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
  - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;
  - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional:
  - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;

- e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayaran pendidikan; dan
- f. Tingkat efisiensi, produktivitas, can akuntabilitas pendidikan nasional.

### Pasal (

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi man iri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada a /at (1) secara beralla, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituju nutuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dar 🕠 dilakukan secara mandin, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dil sukan oleh lema ja evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke B NP.

### Pasal B

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar asional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membili uk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lemili ga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetili i untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan tembaga mandiri sebagaimana dima udi pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

### BAB XIII

### AKREDITASI

#### Pasa 1

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang an satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud paaayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakuan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan at (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif ngan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 37

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan per idikan jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan padidikan jalur nonformal.

## 124 Mengenal Profil Sel olah/Madra 1...

- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubemur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur labih lanjut dengan Peraturan Menteri.

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
  - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB XIV

#### **SERTIFIKASI**

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya bensi:
  - a, Identitas peserta didik:
  - b. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. Pemyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:

- a. Identitas peserta didik:
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkulan telah memerluhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaiman i dimaksud pad yat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakul Pemerintah sebagai tanda bahwa pesurta didik yang banangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada at (5) sekurang-kurangnya berisi
  - a. Identitas peserta didik;
  - b. Pemyataan bahwa peserta didik yang bersar gili an telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah kesilian yang dipersi ratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Daftar semua mata pelajaran a gu mata kuliah kun alian yang telah ditembuh uji kompetensiriya oleh peserta didik, beserta nilai akliimya.

#### Pasai III

- (1) Peserta didik pendidikan informal capat mempercle ertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dan pendidikan formal setulah lulus uji korn arisi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandi rofesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperale ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal sete ah lulus uji kompansi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuar ang berlaku.

### BAB

PENJAMINA MUTU

### Pasa 1

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonto nal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diman id pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaks Dada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu ang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan pergunan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di Jang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membetu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatu Denyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mulu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah datam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekeria sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian lihusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### **BAB XVI**

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panitia Nasional Penilaian Buku Pelaiaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (fima belas) tahun seiak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Uiian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya. Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti herdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### BAB

### KETENTUAN ENUTUP

### Pasa 3

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Derlakunya Pera in Pemerintah ini.

### Pasa '

Peraturan Pemerintah ini mulai berlal u pada tanggal 🗊 tapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik onesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZAZI VIANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha

Ttd

Sugiri, SH

### PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

### NOMOR 11 TAHUN 2009

### TENTANG

### KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan:
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), BAN-S/M telah merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008:
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah

- beberapa kali diubat terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahuri 200 :
- Peraturan Menteri Per idikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005. tentang 3adan Akredit, i Nasional Sekolah/Madrasah;
- 6. Peraturan Menteri Per idikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Firangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
- 7. Keputusari Menteri Findidikari Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkata Anggota Badan Akreditasi Nasional Tiriggi Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal:

### MEMUT KAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTER PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN P ANGKAT AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIL AIYAH (SD/MI).

#### Pasal 1

- (1) Kriteria dan perangkat akreditasi sel ah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) meliputi instrumen akreditasi, petunjui teknis pengisian instrumen akreditasi, iristrumen pengumpulari data dari infor iasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akralitasi.
- (2) Kriteria dan perangkat akreditasi si agaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peni aiari kelayak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) yang diakreditas.
- (3) Kriteria dan perangkat akreditasi seko ih dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) le cantum pada Lampirari I, II, III, dari IV Peraturan Menteri ini.

### Pasa

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tar gal ditetapkan.

Dit :apkarı di Jakarta pa 1 tanggal 4 Maret 2009

ME ITERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TID:

BA BANG SUDIBYO

### INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI)

## PETUNJUK UMUM

- 1. Periksalah kelengkapan perangkat Akreditasi SD/MI yang terdiri atas:
  - a. Instrumen Akreditasi SD/MI:
  - b. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI;
  - Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI; dan
  - Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SD/MI.

Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

- 2. Isilah instrumen akreditas SD/MI dengan cara memberi tanda ceklis (✓) pada kotak opsi jawaban "A", "B", "C", "D", atau "E" pada butir instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
  - a. komponen standar isi nomor 1—18;
  - komponen standar proses nomor 19-29;
  - komponen standar kompetensi lulusan nomor 30—46;
  - d. komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 47-65:
  - e. komponen standar sarana dan prasarana nomor 66-90;
  - f. komponen standar pengelolaan nomor 91-110;
  - q. komponen standar pembiayaan nomor 111-135; dan
  - h. komponen standar penilaian nomor 136-157.

- 3. Jawablah semua butir secara obyek f dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di SD/MI Sauda a.
- 4. Siapkanlah seluruh bukti fisik yang persyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SD/MI dan nstrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD MI yang akan digunakan oleh Tim Asesor pada saat melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi.
- 5. Sebelum mengisi Instrumen Akredita isilah terlebih dahulu (a) pernyataan kepala sekolah/madrasah; dan (b) da a identitas sekolah/madrasah.

# PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bay	rah ini,
Nama : .	
Nama sekolah/madrasah :	
Alamat sekolah/madrasah:	
Dengan ini menyatakan bah	va:
<ol> <li>Data yang diberikan dal keadaan sesungguhnya</li> </ol>	am dokumen ini adalah benar dan sesuai dengan
Saya bertanggung jawa dalam dokumen ini.	b atas jawaban dan pernyataan yang diberikan
Demikian pernyataan ini say tanggung jawab.	a buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa
Pernyataan ini dibuat pada t Di	
Kepala sekolah/madrasah,	
Materai Rp.6000,-	
(	)
Catatan:	

- 1. Tanda tangan harus mengenai materai.
- 2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

# DATA IDENTITAS SEK DLAH/MADRASAH

1.	Nama Sekolah/Madrasah	t
2.	Nomor Statistik Sekolah/Madrasa (NSS/M)	h :
3.	Alamat Sekolah/Madrasan	
	Kecamatan	1
	Kab/Kota (coret salah satu)	:
	Provinsi	:
	Kode Pos	:
	Telepon dan Faksimil	3
	E-mail	1
5.	Status Sekolah/Madrasah	: Negeri  Swasta
6.	Nama Yayasan	
7.	No Akte Pendirian Teral hir	:
8.	Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah	:
9.	Status Akreditasi/Tahur	:/
10.	Visi Sekolah/Madrasah	;

## I. STANDAR ISI

1.		/Madrasah melaksanakan karikulum berdasarkan muatan m Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
	□ A.	Melaksanakan kurikulum   erdasarkan 8 muatan KTSP
	□ В.	Melaksanakan kurikulum erdasarkan 7 muatan KTSP
	□ c.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 6 muatan KTSP
	□ <b>D</b> .	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 atau kurang muatan KTSP
	□ E.	Tidak melaksanakan KTS <sup>‡</sup>
2.		/Madrasah mengembangkar kurikulum dengan melibatkan pihak erpedoman pada panduan renyusunan kurikulum yang disusun NP.
	□ A.	Mengembangkan kurikulu n bersama kepala sekolah, seluruh guru, komite sekolah/ ma rasah atau penyelenggara lembaga pendidikan dan tokoh pendidikan setempat
	□ B.	Mengembangkan kurikulu n bersama kepala sekolah, seluruh guru, dan komite sekolah madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
	□ c.	Mengembangkan kurikulun bersama kepala sekolah dan seluruh guru
	□ <b>D</b> .	Mengembangkan kurikulu n bersama kepala sekolah dibantu beberapa orang guru
	□ E.	Tidak mengembangkan ku rikulum
3.		/Madrasah mengembangkan kurikulum dengan menggunakan pengembangan KTSP.
	□ A.	Mengembangkan kurikulu າ dengan menggunakan 7 prinsip pengembangan KTSP
	□ B.	Mengembangkan kurikulu n dengan menggunakan 5 — 6 prinsip pengembangan K당P
	□ c.	Mengembangkan kurikulu $\cdot$ n dengan menggunakan 3 — 4 prinsip pengembangan KT $\circ$ P
	□ <b>D</b> .	Mengembangkan kurikulu n dengan menggunakan $1-2$ prinsip pengembangan KTSP
	O E	Tidak mangambangkan ke cikulum

4.		/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui
	□ A.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 7 kegiatan pokok
	□ В.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 5 — 6 (enam) kegiatan pokok
	□ c.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 3 — 4 kegiatan pokok
	□ D.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 1 $-$ 2 kegiatan pokok
	□ E.	Tidak mengembangkan kurikulum
5.		Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran kan prinsip pelaksanaan kurikulum.
	□ A.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 prinsip pelaksanaan
	□ В.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 — 6 prinsip pelaksanaan kurikulum
	□ <b>c</b> .	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 3 — 4 prinsip pelaksanaan
	□ D.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 1 — 2 prinsip pelaksanaan
	□ <b>E</b> .	Tidak melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip dimaksud
6.	dengan komite s	Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) ndidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait n.
	□ A.	melibatkan 4 — 5 pihak
	□ В.	Melibatkan 3 pihak
	□ C.	Melibatkan 2 pihak
	□ D.	Hanya melibatkan 1 pihak
	□ <b>E</b> .	Tidak menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal

7.		Madrasah melaksanakan pro∷am pengembangan diri dalam egiatan konseling.
	□ A.	Melaksanakan 4 jenis kegia n layanan konseling
	□ В.	Melaksanakan 3 jenis kegiatan layanan konseling
	□ <b>c</b> .	Melaksanakan 2 jenis kegiat n layanan konseling
	□ <b>D</b> .	Melaksanakan 1 jenis kegiatan layanan konseling
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan layanan konseling
8.		/Madrasah melaksanakan program pengembangan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler.
	□ A.	Melaksanakan 4 jenis atau bih program ekstrakurikuler
	□ B.	Melaksanakan 3 jenis program ekstrakurikuler
	□ c.	Melaksanakan 2 jenis program ekstrakurikuler
	□ D.	Melaksanakan 1 jenis program ekstrakurikuler
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiata ı ekstrakurikuler
9.		/Madrasah menjabarkan star tar kompetensi (SK) dan kompesar (KD) ke dalam indikator- dikator untuk setiap mata
	□ A.	Sebanyak 7 atau lebih mata pelajaran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indik tornya
	□ В.	Sebanyak 5 $-$ 6 mata pela $^\circ$ ran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 3 — 4 mata pela ran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ D.	Sebanyak $1-2$ mata pela $\beta$ ran, telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran yang sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya

10.		Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan n yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun
	□ A.	Menerapkan 4 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ В.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ <b>c</b> .	Menerapkan 2 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ D.	Menerapkan 1 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ E.	Tidak menerapkan ketentuan beban belajar
11.	mandiri t	ngalokasikan waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan idak terstruktur kepada siswa maksimal 40% dari alokasi waktu a pelajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 26% — 50% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ E.	Tidak ada guru yang mengalokasikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
12.	Isi, (2) S penyusu	pangan KTSP dilaksanakan dengan mengacu kepada: (1) Standar standar Kompetensi Lulusan, (3) berpedoman pada panduan nan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta (4) hatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
	□ A.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 4 unsur di atas
	□ B.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 3 unsur di atas
	□ C.	Dilaksanakan dengan mengacu kepada 2 unsur di atas
	□ D.	Dilaksanakan dengan mengacu 1 unsur di atas
	□ E.	Tidak mengembangkan KTSP

13.		/Madrasah mengembangan sa abus mata pelajaran dengan nakan 7 langkah pada Panduan Penyusunan KTSP
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% sil bus mata pelajaran dikembangkan dengan men gunakan 7 langkah
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% silal is mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 la $^\circ$ kah
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% silal is mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan <b>7</b> lan kah
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% silat — mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 lan kah
	□ E.	Tidak ada silabus mata pela aran yang dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah

14.		engembangkan KTSP, guru enyusun silabus setiap mata yang diajarkar
	□ A.	Sebanyak 76% atau lebih si abus dikembangkan sendiri oleh guru bersama-sama guru lain dalam satu sekolah/madrasah
	□ В.	Sebanyak 76% atau lebih 🕏 abus dikembangkan melalui gugus atau Kelompok Kerja Guru (KKG)
	□ C.	Sebanyak 76% atau lebih s 3bus dikembangkan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (L'TD)/Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ D.	Sebanyak 76% atau lebih sabus dikembangkan dengan mengadopsi atau mengada asi KTSP yang sudah ada
	□ E.	Tidak ada guru yang menyu un silabus sendiri

15.		/Madrasah me niliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai panduan penyusunan KTSP
	□ A.	Sebanyak 7 atau lebih maa pelajaran memiliki silabus
	□ B.	Sebanyak 5 — 6 mata pelajaran memiliki silabus
	□ C.	Sebanyak 3 — 4 mata pelajaran memiliki silabus
	□ D.	Sebanyak 1 — 2 mata pelajaran memiliki silabus
	□ <b>E</b> .	Tidak ada mata pelajaran yang memiliki silabus

16.		/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) nata pelajaran melalui rapat dewan guru.
	□ A.	Sebanyak 4 atau lebih mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
	□ B.	Sebanyak 3 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
	□ C.	Sebanyak 2 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
	□ D.	Sebanyak 1 mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran dengan KKM sama dengan 75,00 atau lebih
17.	dengan	/Madrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) memperhatikan unsur: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik elajaran, dan (3) kondisi satuan pendidikan.
	□ A.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
	□ В.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 2 unsur melalui rapat dewan guru
	□ C.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 1 unsur melalui rapat dewan guru
	□ D.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
	□ E.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur dan tidak melalui rapat dewan guru
18.		Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, aran efektif, dan hari libur pada kalender akademik yang
	□ A.	Menyusun kalender akademik sekolah secara rinci dan jelas
	□ B.	Menyusun kalender akademik sekolah secara rinci
	□ C.	Menyusun kalender akademik sekolah secara kurang rinci
	□ D.	Menyusun kalender akademik sekolah secara tidak rinci
	□ E.	Tidak memiliki kalender akademik

## II. STANDAR PROSES

19.	Setiap n	nata pelajaran memiliki RPP ang dijabarkan dari silabus.
	□ A.	Sebanyak sepuluh mata p $\epsilon$ ajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silab $\upsilon$
	□ В.	Sebanyak 7 — 9 mata pela aran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 4 – 6 mata pela aran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1 — 3 mata pela aran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran 📑 ing memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
20.	RPP dist	ısun dengan memperhatikan 6 prinsip penyusunan.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% R $$ P sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
	□ B.	Sebanyak 51% — 75% R $^{ ho}$ sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% RF $$ sudah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
	□ D.	Sebanyak $1\%-25\%$ RPP $:$ udah memperhatikan 6 prinsip penyusunan
	□ E.	Tidak ada RPP yang memperhatikan prinsip 6 prinsip penyusunan
21.		/Madrasah melaksanakan pr ses pembelajaran dengan uhi persyaratan yang ditentukan.
	□ A.	Memenuhi 4 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ B.	Memenuhi 3 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ <b>c</b> .	Memenuhi 2 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ <b>D</b> .	Memenuhi 1 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran

☐ E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran

22.		embelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan -langkah pembelajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ В,	Sebanyak 51% — 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% — 25% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ E.	Tidak ada guru yang melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
23.		/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan untuk kelas I — III.
	□ A.	Kelas I — III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
	□ B.	Kelas I dan II melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
	□ C.	Kelas I dan III atau kelas II dan III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
	□ D.	Kelas I atau II atau III melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
	□ E.	Kelas I — III tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan tematik
24.		/Madrasah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan matan untuk kelas $IV \rightarrow VI$ .
	□ A.	Kelas IV — VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
	□ В.	Kelas V dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
	□ C.	Kelas IV dan V atau IV dan VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
	□ D.	Kelas IV atau V atau VI melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran
	□ E.	Kelas IV — VI tidak melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan mata pelajaran

25.	madrasa	uan proses pembelajaran dila ukan oleh kepala sekolah/ h mencakup tahap perencana n, tahap pelaksanaan, dan tahap hasil pembelajaran.
	□ A.	Mencakup 3 tahap pemantau in serta dilakukan diskusi hasil pemantauan
	□ В.	Mencakup 3 tahap pemantakan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan
	□ C.	Mencakup 2 tahap pemanta in
	□ Đ.	Mencakup 1 tahap pemantauan
	□ E.	Tidak pernah melakukan per antauan
26.		i proses pembelajaran dilakulan oleh kepala sekolah/madrasah cara pemberian contoh, diskula, pelatihan, dan konsultasi.
	□ A.	Melakukan supervisi proses rembelajaran melalui 4 cara
	<ul> <li>□ B.</li> </ul>	Melakukan supervisi proses embelajaran melalui 3 cara
	□ C.	Melakukan supervisi proses embelajaran melalui 2 cara
	□ D.	Melakukan supervisi proses embelajaran melalui 1 cara
	□ E.	Tidak melakukan supervisi pi oses pembelajaran
27.	sekolah/	terhadap guru dalam proses embelajaran dilakukan oleh kepala madrasah dengan memperha kan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, ksanaan, (3) evaluasi pembelaharan, dan (4) rencana tindak
	□ A.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek
	□ В.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek
	□ c.	Evaluasi dilakukan dengan r emperhatikan 2 aspek
	□ D.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 1 aspek
	□ E.	Tidak melakukan evaluasi

28. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan. Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang □ A. bersangkutan, dewan guru, pengawas sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang □ B. bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang □ C. bersangkutan saja dan dewan guru Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang D. bersangkutan saja □ E. Tidak menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran 29. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran. Sebanyak 76% — 100% hasil pengawasan selama satu tahun □ A. terakhir ditindaklanjuti Sebanyak 51% — 75% hasil pengawasan selama satu tahun B. terakhir ditindaklaniuti Sebanyak 26% — 50% hasil pengawasan selama satu tahun □ C.

Sebanyak 1% - 25% hasil pengawasan selama satu tahun

Tidak ada hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

terakhir ditindaklaniuti

terakhir ditindaklaniuti

□ D.

□ E.

#### III. STANDAR KOMPETENSI LUI.USAN

30.		nemperoleh pengalaman belaj muntuk menunjukkan kemampuan logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
	□ A.	Rata-rata nilai ketuntasan benjar kelompok mata pelajaran Iptek 75,00 atau lebih
	□ В.	Rata-rata nilai ketuntasan be ajar kelompok mata pelajaran Iptek 70,00 $-$ 74,99
	□ C.	Rata-rata nilai ketuntasan be <b>aja</b> r kelompok mata pelajaran Iptek 65,00 — 69,99
	□ D.	Rata-rata nilai ketuntasan be <b>aja</b> r kelompok mata pelajaran Iptek 60,00 — 64,99
	□ E.	Rata-rata nilai ketuntasan ta ajar kelompok mata pelajaran Iptek kurang dari 60,00
31.		emperoleh pengalaman belaja yang menunjukkan rasa ahuan yang tinggi dan menya iri potensinya.
31.		1 1 3 3 7 3 3
31.	keingint	Sekolah/Madra:ah memfasilasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan memfurasikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perputakaan, laboratorium, dan

Sekolah/Madrasah memfas li asi kegiatan siswa dengan

memanfaatkan dan memfun sikan sumber belajar meliputi

Sekolah/Madrasah tidak pemah memfasilitasi kegiatan siswa

□ D.

□ E.

bahan ajar dan buku teks

dengan sumber belajar

- Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial. Sebanyak 76% — 100% RPP mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) □ A. memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial Sebanyak 51% — 75% RPP mata pelajaran IPA dan IPS □ B. memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial Sebanyak 26% — 50% RPP mata pelajaran IPA dan IPS C. memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial Sebanyak 1% — 25% RPP mata pelajaran IPA dan IPS D. memuat kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial Tidak ada RPP mata pelajaran IPA dan IPS yang memuat □ E. kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial
- Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif melalui pemanfaatan sumber belajar berupa; (1) bahan ajar, (2) buku teks, (3) perpustakaan, (4) laboratorium, dan (5) internet. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan A. memanfaatkan dan memfungsikan 5 sumber belajar Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan □ B. memanfaatkan dan memfungsikan 4 sumber belajar Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan □ C. memanfaatkan dan memfungsikan 3 sumber belajar Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan □ D. memanfaatkan dan memfungsikan 2 sumber belajar Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan □ E. memanfaatkan dan memfungsikan hanya 1 sumber belajar

34.		emperoleh pengalaman belaja yang menunjukkan kegemaran a dan menulis.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% RPF mata pelajaran memuat kegiatan pemb∉lajaran mem aca dan menulis
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% RPP ata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran niembaca dan nenulis
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% RPP — ata pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan menulis
	□ D.	Sebanyak 1% =- 25% RPP in ta pelajaran memuat kegiatan pembelajaran membaca dan nenulis
	□ E.	Tidak ada RPP mata pelajara yang memuat kegiatan pembelajaran membaca dan nenulis
35.		emperoleh pengalaman belaja yang menunjukkan kecintaan dan an terhadap lingkungan sosia dan fisik.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% RPF semua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepe: lian terhadap lingkungan
	□ B.	Sebanyak 51% — 75% RPF emua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaen dan keped lian terhadap lingkungan
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% RPF amua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepedalian terhadap lingkungan
	D 0,	Sebanyak 1% 25% RPP se mua mata pelajaran dikaitkan dengan kecintaan dan kepesi ilian terhadap lingkungan
	□ E.	Tidak ada RPP mata pelajaran yang dikaitkan dengan kecintaan dan kepedulian terhadap lim kungan
36.		emperoleh pengalaman belaja yang menunjukkan kemampuan elakukan kegiatan seni dan halaya lokal.
	□ A.	Dalam satu tahun terakhir, :kolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 4 jenis/k i kegiatan seni dan budaya lokal
	□ B.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 3 jenis/ka i kegiatan seni dan budaya lokal
	□ c.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 2 jenis/ka i kegiatan seni dan budaya lokal
	□ D.	Dalam satu tahun terakhir, Þikolah/madrasah melaksanakan atau memfasilitasi 1 jenis/ka i kegiatan seni dan budaya lokal
	□ E.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah tidak melaksanakan atau memfasi tasi kegiatan seni dan budaya lokal

37. Dalam satu tahun terakhir, siswa memperoleh pengalaman belajar untuk dapat mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku di lingkungannya. Tidak ada siswa yang melanggar peraturan sekolah (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, 3 A. dan lainnya) Kurang dari 5% siswa yang melanggar peraturan sekolah □ B. (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnva) Antara 6 — 10% siswa yang melanggar peraturan sekolah □ C. (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya) Antara 11 — 15% siswa yang melanggar peraturan sekolah □ D. (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya) Lebih dari 15% siswa yang melanggar peraturan sekolah □ E. (terlambat masuk, membolos, tidak berseragam, berkelahi, dan lainnya) Dalam setahun terakhir siswa memperoleh pengalaman belaiar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Sekolah/madrasah mengadakan 4 kali atau lebih kegiatan □ A. yang mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia Sekolah/madrasah mengadakan 3 kali kegiatan yang mampu □ B. menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa,

negara, dan tanah air Indonesia

negara, dan tanah air Indonesia

negara, dan tanah air Indonesia

bangsa, negara, dan tanah air Indonesia

□ C.

D,

□ E.

Sekolah/madrasah mengadakan 2 kali kegiatan yang mampu

menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa,

Sekolah/madrasah mengadakan 1 kali kegiatan yang mampu

menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa,

Sekolah/madrasah tidak pernah mengadakan kegiatan yang

mampu menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap

- Siswa memperoleh pengalaman belai yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dar nemanfaatkan waktu luang. Sekolah/Madrasah tiap pek menyelenggarakan kegiatan □ A. kebersihan Sekolah/Madrasah setiap bun menyelenggarakan kegiatan □ B. kebersihan Sekolah/Madrasah setiap : ular menyelenggarakan □ C. kegiatan kebersihan Sekolah/Madrasah setiap se lester menyelenggarakan D. kegiatan kebersihan Sekolah/Madrasah tidak per ah menyelenggarakan kegiatan  $\cap$  F kebersihan
- 40. Siswa memperoleh pengalaman belali untuk dapat menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan talup perkembangan anak. Sekolah/madrasah setiap menyelenggarakan 4 jenis atau lebih kegiatan pembelil aran agama yang dianut sesuai □ A. dengan tahap perkembangan anak Sekolah/madrasah setiap maggu menyelenggarakan 3 jenis □ B<sub>\*</sub> kegiatan pembelajaran agali a yang dianut sesuai dengan tahap perkemt angan anak Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 2 jenis kegiatan pembelajaran adali a yang dianut sesuai dengan tahap perkemt angan anak Sekolah/madrasah setiap minggu menyelenggarakan 1 jenis □ D. kegiatan pembelajaran agali a yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak Sekolah/madrasah setiap minggu tidak menyelenggarakan E) E. kegiatan pembelajaran agali a yang dianut sesuai dengan tahap perkembangar anak

41.		emperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.
	□ A.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
	□ B.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 3 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
	□ C.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 2 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
	□ D.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah menyelenggarakan 1 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
	□ E.	Dalam satu tahun terakhir, sekolah/madrasah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
42.	tolong-m	emperoleh pengalaman belajar bekerjasama dalam kelompok, nenolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga an sebaya.
	□ A.	Sebanyak $76\%-100\%$ RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok ( $cooperatif$ $learning$ )
	□ 8.	Sebanyak 51% — 75% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok ( <i>cooperatif</i> <i>learning</i> )
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok ( <i>cooperatif</i> <i>learning</i> )
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% RPP semua mata pelajaran menggunakan metode belajar secara kelompok ( <i>cooperatif</i> <i>learning</i> )
	□ E.	Tidak ada RPP mata pelajaran yang menggunakan metode belajar secara kelompok (cooperatif learning)

43.		emperoleh pengalaman belaj yang menunjukkan kemampuan hkan masalah sederhana dalan kehidupan sehari-hari.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% RFI semua mata pelajaran menggunakan metode pemelahan masalah (problem solving/problem based learning)
	□ B,	Sebanyak 51% — 75% RFF 2mua mata pelajaran menggunakan metode pemalahan masalah (problem solving/problem based lear 11g)
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% RFF emua mata pelajaran menggunakan metode pemelahan masalah (problem solving/problem based learning)
	□ D <sub>*</sub>	Sebanyak 1% — 25% RPF s mua mata pelajaran menggunakan metode pema ahan masalah (problem solving/problem based learn 1g)
	C E,	Tidak ada RPP mata pelajaran yang menggunakan metode pemecahan masalah (proble 1 so'ving/problem based learning)
44.	Siswa m maupun	emperoleh pengalaman belajar dalam berkomunikasi baik lisan tulisan.
	□ A.	Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba. laporan hasa kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, an buletin siswa internal sekolah/madrasah, serta disa usi dan presentasi
	□ В.	Tersedianya kumpulan kary tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan has kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dind ig, serta diskusi dan presentasi
	□ C.	Tersedianya kumpulan kary tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan nasil kunjungan karya wisata/studi labangan, serta diskusi dan presentasi
	□ <b>D</b> .	Tersedianya kumpulan kary tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, serta diskus dan presentasi
	□ E.	Tidak tersedia ∢umpulan k∂ ′a tulis siswa, diskusi, dan presentasi
45.		emperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan keterampilan ak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.
	□ A.	Sekolah/Madrasah mengha kan 4 karya siswa atau lebih
	□ B.	Sekolah /Madrasah menghasilkan 3 karya siswa
	□ C.	Sekolah /Madrasah menghasilkan 2 karya siswa
	□ D.	Sekolah /Madrasah mengha ilkan 1 karya siswa
	□ E.	Sekolah /Madrasah tidak munghasilkan karya siswa

46. Sekolah/Madrasah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil UASBN.

A. Rata-rata UASBN lebih dari 8,00

B. Rata-rata UASBN antara 7,01 — 8,00

C. Rata-rata UASBN lebih dari 6,01 — 7,00

D. Rata-rata UASBN lebih dari 5,01 — 6,00

E. Rata-rata UASBN lebih rendah 5,01

# IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEFENDIDIKAN

47.	Guru me	miliki kualifikasi akademik n nimum.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% gi $^{\circ}$ u berpendidikan minimum S1/D-IV PGSD/PGM!
	□ B <sub>*</sub>	Sebanyak 51% — 75% gum berpendidikan minimum S1/D-IV PGSD/PGMI
	□ C.	Sebanyak 76% — 100% 🍿 ru t erpendidikan setingkat DII PGSD/PGMI
	□ D.	Sebanyak 51% — 75% gum berpendidikan setingkat DII PGSD/PGMI
	□ E.	Kurang dari 5 % guru ber endidikan setingkat atau di bawah DII PGSD/PGNI
48.		ama, guru pendidikan jasma i, dan guru kesenian mengajar engan latar belakang pendidi annya.
	□ A.	Ketiga mata pelajaran diaja kan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang penadikannya
	□ В.	Hanya 2 mata pelajaran di arkan oleh guru yang sesuai dengan latar t elakang pen dikannya
	□ <b>c</b> .	Hanya 1 mata pelajaran di arkan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya
	□ D.	Tidak ada guru yang sesua dengan mata pelajaran, tetapi diajarkan oleh tenaga dari estitusi lain yang relevan.
	□ E.	Ketiga mata pelajaran diaja kan oleh guru kelas
49.	Guru me pembela	miliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip jaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% gu u memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
	□ B.	Sebanyak 51% — 75% gur ı memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prins ə pembelajaran
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% gur memiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prins pembelajaran
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru nemiliki kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prins pembelajaran
	□ E.	Tidak ada guru yang memili i kompetensi pedagogik sesuai dengan prinsip-prinsip pemilelajaran

50.	Guru me	miliki kompetensi kepribadian sebagai agen pembelajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru memiliki kompetensi kepribadian
	□ В.	Sebanyak $51\%-75\%$ guru memiliki kompetensi kepribadian
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% guru memiliki kompetensi kepribadian
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% — 25% guru memiliki kompetensi kepribadian
	□ E.	Tidak ada guru yang memiliki kompetensi kepribadian
51.		komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama , tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
	□ А.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa
	□ в.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Adanya dialog dalam rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah
	□ D.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru
	□ E.	Tidak pernah diadakan rapat
52.		miliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas r dan tugas lainnya.
	□ A.	Rata-rata kehadiran guru 96% — 100% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
	□ В.	Rata-rata kehadiran guru 91% — 95% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
	□ c.	Rata-rata kehadiran guru 86% — 90% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
	□ D.	Rata-rata kehadiran guru 81% — 85% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya
	□ E.	Rata-rata kehadiran guru kurang dari 81% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya

53.		ekolah/madrasan berstatus sagai guru, memiliki sertifikat , dan Surat Keputusan (SK) sagai kepala sekolah/madrasah.
	□ A.	Berstatus sebagai guru, mer iliki sertifikat pendidik, dan memiliki SK sepagai kepalar ekolah/madrasah
	□ B.	Berstatus sebagai guru, me∷iliki sertifikat pendidik, tetapi tidak memiliki 5K sebagai k∷əala sekolah/madrasah
	□ c.	Berstatus sebagai guru, tida memiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kapala sekolah/madrasah
	□ D.	Berstatus sebagai guru, tid memiliki sertifikat pendidik, tidak memiliki SK sebagai ke pala sekolah/ madrasah
	□ E <sub>*</sub>	Tidak berstatus sebagai gum, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
54.		ekolah/madrasah memiliki ku lifikasi akademik minimum (S1) atau Diploma Empat (CF-V).
	□ A.	Memiliki kualif kasi akaden i S1 atau D-IV PGSD/PGMI, dari perguruan tinggi terakredit i, dan memiliki sertifikat pendidik
	□ В.	Memiliki kualif kasi akaden il S1 atau D-IV PGSD/PGMI, dari perguruan tinggi terakredi il, tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik
	□ <b>c</b> .	Memiliki kualif kasi akaden berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan non-PGSD/PG-II, dari perguruan tinggi terakreditasi, tetapi tidak memiliki sertifikat pendidik
	□ D.	Memiliki kualif kasi akademi berpendidikan S1 atau D-IV nonkependidikan, dari pergiruari tinggi tidak terakreditasi, dan tidak memiliki sertifikal pendidik
	□ E,	Tidak memiliki kualifikasi a ıdemik yang dipersyaratkan
55.		ekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang- ya 5 tahun.
	□ A.	Memiliki pengalaman meng jar 5 tahun atau lebih
	□ В.	Memiliki pengalaman mengajar 3 — 4 tahun
	□ C.	Memiliki pengalaman mengajar 2 — 3 tahun
	□ D.	Memiliki pengalaman mengajar 1 — 2 tahun
	□ E.	Memiliki pengalaman meng jar kurang dari 1 tahun

56.	Kepala	sekolah/madrasah memiliki kompetensi kepribadian.
	□ A.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 6 unsur
	□ В.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 4 — 5 unsur
	□ C.	memiliki kompetensi kepribadian yang meliputi 2 $-$ 3 unsur
	□ D.	memiliki kompetensi kepribadian hanya 1 unsur
	□ E.	tidak memiliki kompetensi kepribadian
57.		sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang kan dengan keberhasilan mengelola siswa.
	□ A.	Sebanyak 76%— 100% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
	□ <b>c.</b>	Sebanyak 26% — 50% lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
	□ <b>D</b> .	Sebanyak $1\%-25\%$ lulusan diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi A pada 3 tahun terakhir
	□ E.	Tidak ada lulusan yang diterima di sekolah lanjutan pertama terakreditasi pada 3 tahun terakhir
58.	ditunjuk	sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang kan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam ola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa.
	□ A.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 76% — 100% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
	□ В.	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 51% — 75% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
	□ <b>c</b> .	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 26% — 50% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
	□ <b>D</b> .	Mampu mengelola kegiatan produksi/jasa yang cukup untuk membiayai 1% — 25% biaya kegiatan ekstrakurikuler secara mandiri
	□ E.	Tidak mampu mengelola kegiatan produksi/iasa

	14 1	1.4-1.4 1
59.	pihak lai kegiatan	ekolah/madrasah memiliki kanampuan bekerjasama dengan n untuk kepentingan sekolah madrasah,berpartisipasi dalam sosial kemasyarakatan, dan nemiliki kepekaan sosial terhadap au kelompok lain.
	□ A.	Mampu bekerj∂sama denga 4 pihak atau lebih
	□ В.	Mampu bekerj∋sama denga 3 pihak
	□ C.	Mampu bekerjasama denga 2 pihak
	□ D.	Mampu bekerjasama deng: 1 pihak
	□ E.	Tidak mampu bekerjasama dengan pihak manapun
60.	Kepala s	ekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.
	□ A.	Melakukan sur ervisi dan manitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak $76 - 100\%$ dari kegiatan monitoring yang direncana an
	□ B.	Melakukan supervisi dan ne nitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 51 – 75% dari kegiatan monitoring yang direncana an
	□ C.	Melakukan supervisi dan menitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 26 — 50% dari kegiatan monitoring yang direncanal an
	D D.	Melakukan supervisi dan ronitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1° — 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan
	□ E <sub>+</sub>	Tidak melakukan supervisa an monitoring
61.		administrasi minimum memiiki kualifikasi akademik pendidikan ah atau yang sederajat.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memilik tenaga adminstrasi lebih dari seorang yang memiliki kua fikasi pendidikan menengah atau sederajat
	□ В.	Sekolah/Madrasah memilik tenaga adminstrasi lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
	□ C.	Sekolah/Madrasah memilik tenaga adminstrasi 1 orang yang memiliki kualifikasi pendid an menengah atau sederajat, atau lebih dari 1 orang tetani semuanya tidak memiliki kualifikasi pendidikan menangah atau sederajat
	□ D <sub>1</sub>	Sekolah/Madrasah memilik tenaga adminstrasi 1 orang tetapi tidak memiliki kualifi asi pendidikan menengah atau sederajat
	□ E <sub>+</sub>	Tidak ada tenaga administrasi

62.	Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.	
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang yang semuanya memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ В.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi lebih dari seorang tetapi tidak semua memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, atau lebih dari 1 orang tetapi semuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga adminstrasi 1 orang tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ E.	Tidak ada tenaga administrasi
63.		perpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan uh atau yang sederajat.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari seorang yang semuanya memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
		Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan lebih dari

seorang tetapi tidak semua memiliki kualifikasi pendidikan

Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan 1 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau

Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan 1 orang

tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau

sederajat, atau lebih dari 1 orang tetapi tidak memiliki kualifikasi pendidikan menengah atau sederajat

menengah atau sederajat

Tidak ada tenaga perpustakaan

□ B.

□ C.

□ D.

□ E.

sederajat

64.	Tenaga perpustakaan memiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan.		
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki enaga perpustakaan lebih dari seorang yang semuanya meniliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan	
	□ B.	Sekolah/Madrasah memiliki enaga perpustakaan lebih dari seorang tetapi tidak semua nemiliki surat penugasan sebagai penanggung jawab perpusi kaari	
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki enaga perpustakaan satu orang dan memiliki surat penuga n sebagai penanggung jawab perpustakaan	
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki enaga perpustakaan satu orang tetapi tidak memiliki surat enugasan sebagai penanggung jawab perpustakaan	
	□ E.	Tidak ada tenaga yang diben tugas sebagai penanggung jawab perpustakaan	
65.	sekolah	n/Madrasah merniliki tenaga yanan khusus, yaitu: (1) penjaga n/madrasah, (2) tukang keb , (3) tenaga kebersihan, (4) nudi, dan (5) pesuruh.	
	□ A.	Memiliki 4 jenis atau lebih 🗀 naga layanan khusus	
	□ В.	Memiliki 3 jenis tenaga laya jan khusus	

Memiliki 2 jenis tenaga layanan khusus

Memiliki 1 jenis tenaga layanan khusus

Tidak memilik tenaga layanan khusus

C.D.

□ E.

### V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

66.		kolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai asio jumlah siswa.
	□ A <sub>+</sub>	Memiliki lahan seluas 76% — 100% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa atau lebih
	□ В.	Memiliki lahan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
	□ C.	Memiliki lahan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
	□ D.	Memiliki lahan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa
	□ E.	Tidak tersedia lahan
67.	potensi b	kolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	□ A.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
	□ B	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
	□ <b>C</b> .	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
	□ D.	Berada di lokasi aman, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan, mengancam keselamatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
	□ E.	Berada di lokasi yang tidak aman, tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, dan tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat

Lahan sekolah/madrasah berada di lo asi yang terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan Berada di lokasi yang terhip, ar dari gangguan pencemaran □ A. air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan Berada di lokasi yang terhiri ar dari gangguan pencemaran □ B. air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah Berada di lokasi yang terhir ar dari gangguan pencemaran □ C. air dan pencemaran udara Berada di lokasi yang terhir ar dari gangguan pencemaran □ D. Tidak berada di lokasi yang man dari gangguan pencemaran □ E. air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kebisingan Sekolah/Madrasah berada di lokasi ya g sesuai dengan peruntukan, memiliki status hak atas tanah, ijin penanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan ijin mendirikan bangunan. Berada di lokasi yang sesual dengan peruntukan, memiliki □ A. status hak atas tanah, ijin p manfaatan dari pemegang hak atas tanah, dan ijin mendirii an bangunan Berada di lokasi yang sesua dengan peruntukannya, memiliki □ B. status hak atas tanah, ijin semanfaatan dari pemegang hak atas tanah, tetapi tidak men iliki ijin mendirikan bangunan Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, memiliki status hak atas tanah, tetap tidak memiliki ijin pemanfaatan □ C. dari pemegang hak atas tan-h, dan tidak memiliki ijin mendirikan bangunan Berada di lokasi yang sesua: dengan peruntukannya tetapi memiliki status hak atas tan h, tidak memiliki ijin □ D.

pemanfaatan dari pemegan hak atas tanah, dan tidak

Tidak Berada di lokasi yang esuai dengan peruntukan, tidak memiliki status hak atas tanch, tidak memiliki ijin

pemanfaatan dari pemeganc hak atas tanah, dan tidak memiliki

memiliki ijin mendirikan ban unan

ijin mendirikan bangunan

□ E.

70.		ekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal sesuai rasio jumlah siswa dan lantai gedung.
	□ A.	Memiliki lantai seluas 76% — 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih
	□ В.	Memiliki lantai seluas 51% — 75% dari ketentuan luas minimal
	□ c.	Memiliki lantai seluas 26% — 50% dari ketentuan luas minimal
	□ D.	Memiliki lantai seluas 1% — 25% dari ketentuan luas minimal
	□ E.	Tidak memiliki gedung sendiri
71.	_	an sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh engkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
	□ A.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir
	□ В.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh, dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
	□ c.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh, tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
	□ D.	Memiliki struktur yang stabil, tetapi tidak kokoh, tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
	□ E.	Memiliki struktur yang tidak stabil, tidak kokoh, tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran, dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya petir
72.	dapat r	/Madrasah memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang nemenuhi kebutuhan: (1) air bersih, (2) saluran air kotor u air limbah, (3) tempat sampah, dan (4) saluran air hujan.
	□ A.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi keempat kebutuhan di atas.
	□ В.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 3 dari 4 kebutuhan.
	□ c.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 2 dari 4 kebutuhan.
	□ D.	Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan yang dapat memenuhi 1 dari 4 kebutuhan.
	□ E.	Tidak memiliki sanitasi di dalam dan di luar yang dapat memenuhi keempat kebutuhan di atas.

73.	Bangun yang m	an sekolah/madrasah memilı i ventilasi udara dan pencahayaan emadai.
	□ A.	Memiliki ventilasi udara din pencahayaan yang memadai
	□ В.	Memiliki ventilasi udara ya g memadai tetapi tidak memiliki ventilasi pencahayaan yang memadai
	□ <b>c</b> .	Memiliki ventilasi udara yang tidak memadai, tetapi memiliki ventilasi pencahayaan yang memadai
	□ <b>D</b> .	Memiliki ventilasi udara da ventilasi pencahayaan yang tidak memadai
	□ E.	Tidak memiliki ventilasi udara dan pencahayaan
74.		an sekolah/madrasah memili⊨ instalasi listrik dengan daya m 900 watt.
	□ A.	Memiliki instalasi listrik der jan daya 900 watt atau lebih
	□ В.	Memiliki instalasi listrik der jan daya 450 watt
	□ c.	Tidak memiliki instalasi listi k, tetapi menggunakan sumber daya lain setara dengan da a 900 watt
	□ <b>D</b> .	Tidak memiliki instalasi listrik, tetapi menggunakan sumber daya lain setara dengan dara 450 watt
	□ E.	Tidak memiliki instalasi listi k dan tidak menggunakan sumber daya lain
75.		/Madrasah memiliki izin mend rikan bangunan dan izin naan bangunan sesuai dengan peruntukannya.
	□ A.	Memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan p∈ untukannya sebelum bangunan berdiri
	□ B.	Memiliki izin mendirikan ba gunan, dan memiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri
	□ C.	Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin penggunaan bangunan sementara
	□ D.	Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan
	□ E.	Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan

- Sekolah/Madrasah melakukan pemeliharaan secara berkala baik pemeliharaan ringan maupun berat terhadap bangunan sekolah/madrasah. Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap □ A. bangunan secara berkala sesuai ketentuan Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap □ B. bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang □ C. sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada □ D. bagian bangunan yang rusak berat □ E. Tidak pernah melakukan pemeliharaan 77. Sekolah/Madrasah memiliki prasarana sesuai dengan ketentuan: (1)
- ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi. Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) □ A. tempat beribadah, (7) ruang UKS, (8) jamban, (9) gudang, dan (10) ruang sirkulasi Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) □ B. laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) tempat beribadah, dan (7) jamban Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3) □ C. laboratorium IPA, (4) ruang guru, dan (5) jamban Memiliki (1) ruang kelas, (2) ruang perpustakaan, (3), ruang  $\cap$  D. guru, dan (4) jamban □ E. Tidak memiliki prasarana sendiri.

<ul> <li>Sekolah/Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.</li> </ul>	
□ A.	Memiliki ruang kelas dengar jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
□ В.	Memiliki sejumlah ruang kelas dan sarana sesuai dengan ketentuan tetapi lukuran ruang kelas tidak sesuai dengan ketentuan
□ c.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
□ <b>D</b> .	Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan
□ E.	Tidak memiliki ruang kelas a au gedung sendiri
	/Madrasah memiliki ruang per ustakaan dengan luas dan sarana etentuan.
□ A.	Memiliki ruang perpustakaar dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan, teku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain, per bot, media pendidikan, dan perlengkapan lain
□ В.	Memiliki ruang perpustakaar dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan, beku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lain, dan perabot
□ c.	Memiliki ruang perpustakaan dilengkapi dengan buku teks, buku panduan pendidikan dan buku pengayaan
□ <b>D</b> .	Memiliki ruang perpustakaar dilengkapi dengan buku teks
□ E.	Tidak memiliki perpustakaar
	/Madrasah memiliki buku teks pelajaran yang telah ditetapkan Permendiknas.
□ A.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa
□ В.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2 — 5 siswa
□ c.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6 — $10  \text{sisw}$ :
□ D.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 siswa atau lebih
□ E.	Tidak memiliki buku teks pel jaran yang ditetapkan oleh Mendiknas
	Sekolah, dengan (

81.	<ol> <li>Sekolah/Madrasah memantaatkan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas.</li> </ol>	
	□ A.	Sebanyak 8 atau lebih mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
	□ В.	Sebanyak 6 — 7 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
	□ C.	Sebanyak 4 — 5 mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
	□ D.	Sebanyak $1-3$ mata pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
	⊜ E.	Tidak ada mata pelajaran yang menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan Permendiknas
82.		/Madrasah memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sarana laboratorium IPA lengkap.
	□ A.	Memiliki laboratorium IPA dengan 1 almari atau lebih dan memiliki 13 jenis sarana atau lebih
	□ В.	Memiliki laboratorium IPA, dengan 1 almari dan memiliki 8 — 12 sarana
	□ C.	Memiliki laboratorium IPA, tanpa memiliki almari dan memiliki 4 — 7 sarana
	□ D.	Memiliki laboratorium IPA, tanpa memiliki almari dan memiliki $1-3$ sarana
	□ E.	Tidak memiliki laboratorium IPA
83.		/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana etentuan.
	□ A.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ B.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi tidak memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ C.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki ruang pimpinan

84.	Sekolah, ketentua	/Madrasah memiliki ruang gur dengan luas dan sarana sesuai an.	
	□ A.	Memiliki ruang guru dengan uas dan sarana sesuai ketentuan	
	□ В.	Memiliki ruang guru dengan yas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesua ketentuan	
	□ C.	Memiliki ruang guru dengan Jas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesua ketentuan	
	□ <b>D</b> .	Memiliki ruang guru dengan lias dan sarana tidak sesuai ketentuan	
_	□ E.	Tidak memiliki ruang guru	
85.	. Sekolah/madrasah memiliki tempat b∈ badah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas dan perlengkar n sesuai ketentuan.		
	□ A.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan	
	□ B.	Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi tidak memiliki perlengkapan sesuai ketentuan	
	□ C.	Memiliki tempat beribadah de gan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki per engkapan sesuai ketentuan	
	□ <b>D</b> .	Memiliki tempat beribadah d∈ gan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan	
	○ E.	Tidak memiliki tempat beriba 3h	
86.		/Madrasah memiliki ruang Unit esehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana sesua ketentuan.	
П	□ A.	Memiliki ruang UKS/M dengan uas dan sarana sesuai ketentuan	
	□ В.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan	
	□ <b>c</b> .	Memiliki ruang UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan	
	□ D.	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan	
	□ <b>E</b> .	Tidak memiliki ruang UKS/M	

87.		Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana etentuan.
	□ A.	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
	□ В.	Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai dengan ketentuan
	□ <b>c</b> .	Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ <b>D</b> .	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki jamban
88.	. Sekolah/Madrasah memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
	□ A.	Memiliki gudang dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ B.	Memiliki gudang dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ C.	Memiliki gudang dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki gudang dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki gudang
89.		/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas etentuan.
Г	□ A.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan
	□ В.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi kualitasnya tidak sesuai ketentuan
	□ C.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi kualitasnya sesuai ketentuan
	□ <b>D</b> .	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan
	_ F	Tidak memiliki ruang sirkulasi

90.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat be main/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
	□ A.	Memiliki tempat bermain/ber lahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ В.	Memiliki tempat bermain/ber lahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sar na tidak sesuai ketentuan
	□ <b>C</b> .	Memiliki tempat bermain/beru ahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ <b>D</b> .	Memiliki tempat bermain/ber ahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuar
	□ E.	Tidak memiliki tempat berma /berolahraga

### VI. STANDAR PENGELOLAAN

91.	Sekolah	/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan visi lembaga.
	□ A.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, dan sering disosialisasikan
	□ В.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, dan pernah disosialisasikan
	□ C.	Merumuskan dan menetapkan visi, mudah dipahami, tetapi tidak disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapkan visi, sulit dipahami, dan tidak disosialisasikan
	□ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan visi
92.	Sekolah	/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga.
	□ A.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan sering disosialisasikan
	□ В.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan
	□ C.	Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapkan misi, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
	□ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan misi
93.	Sekolah	/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan tujuan lembaga.
	□ A.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan
	□ B.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami dan pernah disosialisasikan
	□ c.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
	☐ D.	Merumuskan dan menetapkan tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
	I F	Tidak merumuskan dan menetankan tujuan

_			
94.	<ul> <li>Sekolah/Madrasah memiliki rencana erja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan</li> </ul>		
	□ A.	Memiliki rencana kerja jang a menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosial asikan	
	□ 8.	Memiliki rencana kerja jang a menengah dan rencana kerja tahunan dan salah satunya udah disosialisasikan	
	□ C.	Memiliki rencana kerja jang a menengah dan rencana kerja tahunan dan keduanya belun disosialisasikan	
	□ D.	Memiliki rencana kerja jang a menengah atau rencana kerja tahunan, baik sudah maupu belum disosialisasikan	
	□ E.	Tidak memiliki rencana kerji jangka menengah dan rencana kerja tahunan	
95.		/Madrasah memiliki pedoman 'ang mengatur berbagai aspek aan secara tertulis yang mudah dipahami oleh pihak-pihak	
	□ A.	Memiliki pedoman yang mer patur 7 atau lebih aspek pengelolaan secara tertulis	
	□ В.	Memiliki pedoman yang men natur 5 atau 6 aspek pengelolaan secara tertulis	
	□ C.	Memiliki pedoman yang mer ⊣atur 3 atau 4 aspek pengelolaan secara tertulis	
	□ <b>D.</b>	Memiliki pedoman yang menatur 1 atau 2 aspek pengelolaan secara tertulis	
	□ E.	Tidak memiliki pedoman yan mengatur pengelolaan secara tertulis	
96.	Sekolah/ tugas.	'Madrasah memiliki struktur oʻjanisasi dengan kejelasan uraian	
	□ A.	Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang je as	
	□ В.	Memiliki struktur organisasi $\epsilon$ an disertai uraian tugas yang jelas	
	□ c.	Memiliki struktur organisasi ∈ın disertai uraian tugas tetapi tidak jelas	
	□ <b>D</b> .	Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas	
	□ E.	Tidak memiliki struktur organ sasi	

97.	Sekolah/ tahunan	Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
	□ <b>E</b> .	Tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan
98.	Sekolah,	/Madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan.
	□ A.	Melaksanakan 4 atau lebih jenis kegiatan kesiswaan
	□ B.	Melaksanakan 3 jenis kegiatan kesiswaan
	□ c.	Melaksanakan 2 jenis kegiatan kesiswaan
	□ D.	Melaksanakan 1 jenis kegiatan kesiswaan
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan kesiswaan
99.		/Madrasah melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum nbelajaran.
	□ A.	Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ B.	Melaksanakan 3 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ c.	Melaksanakan 2 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ D.	Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran

100.	Sekolah kependi	/Madrasah melaksanakan ;∷ndayagunaan pendidik dan tenaga dikan.
	□ A.	Melaksanakan 4 atau lebi program pengelolaan pendayagunaan pendidik an tenaga kependidikan
	□ B.	Melaksanakan 3 program engelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga keper tidikan
	□ C.	Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
	□ D.	Melaksanakan 1 program engelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kepen idikan
	□ E.	Tidak melaksanakan progran pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kepena dikan
101.	Sekolah	/Madrasah mengelola sarana an prasarana pembelajaran.
	□ A.	Mengelola 4 atau lebih progr m sarana dan prasarana
	□ В.	Mengelola 3 program sarana dan prasarana
	□ C.	Mengelola 2 program sarana lan prasarana
	□ D.	Mengelola 1 program sarana an prasarana
	□ E.	Tidak mengelola program sarana dan prasarana
102.	Sekolah	Madrasah mengelola pembiaya n pendidikan.
	□ A.	Memiliki 4 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ В.	Memiliki 3 program pengelolaa pembiayaan pendidikan
	□ c.	Memiliki 2 program pengelolaa pembiayaan pendidikan
	□ <b>D</b> .	Memiliki 1 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ E.	Tidak memiliki program pengele aan pembiayaan pendidikan

103.		Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan jaran yang kondusif.
	□ A.	Melaksanakan 4 atau lebih kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ B.	Melaksanakan 3 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ C.	Melaksanakan 2 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ D.	Melaksanakan 1 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
104.		Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan embaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
	□ B.	Memiliki 3 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
	□ C.	Memiliki 2 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
	□ D.	Memiliki 1 dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
	□ E.	Tidak memiliki dokumen tentang keterlibatan masyarakat pendukung dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan
105.		n/Madrasah memiliki program pengawasan yang disosialisasikan pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih dokumen program pengawasan
	□ В.	Memiliki 3 dokumen program pengawasan
	□ C.	Memiliki 2 dokumen program pengawasan
	□ <b>D</b> .	Memiliki 1 dokumen program pengawasan
	— E.	Tidak memiliki dokumen program pengawasan

106.	Sekolah	/Madrasah melaksanakan ke iatan evaluasi diri.
	□ <b>A</b> .	Melaksanakan evaluasi diri setidak-tidaknya sekali dalam 1 semester
	□ В.	Melaksanakan evaluasi diri ekali dalam 2 semester
	□ C.	Melaksanakan evaluasi diri .ekali dalam 3 semester
	□ D.	Melaksanakan evaluasi diri : akali dalam 4 semester
	□ E.	Tidak melaksanakan evalua: diri
107.	Sekolah, kependi	/Madrasah melaksanakan eva- asi kinerja pendidik dan tenaga dikan.
	□ A.	Melaksanakan 4 program ev. uasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ В.	Melaksanakan 3 program eva Jasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ c.	Melaksanakan 2 program eva lasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ <b>D</b> .	Melaksanakan 1 program eva asi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ <b>E</b> .	Tidak melakukan program eva iasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
108.	Sekolah	/Madrasah mempersiapkan unsu-unsur pelaksanaan akreditasi.
	□ A.	Mempersiapkan 4 unsur pelaksanaan akreditasi
	□ В.	Mempersiapkan 3 unsur pelaks ≀ 1aan akreditasi
	□ c.	Mempersiapkan 2 unsur pelaksanaan akreditasi
	□ <b>D</b> .	Mempersiapkan 1 unsur pelaksa aan akreditasi
	□ E.	Tidak mempersiapkan 1 unsur p n pelaksanaan akreditasi

- 109. Kepala Sekolah/Madrasah melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kepemimpinan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Melaksanakan 15 - 18 tupoksi kepemimpinan kepala □ A. sekolah/madrasah Melaksanakan 11 - 14 tupoksi kepemimpinan kepala □ B. sekolah/madrasah Melaksanakan 6 – 10 tupoksi kepemimpinan kepala □ C. sekolah/madrasah Melaksanakan 1 – 5 tupoksi kepemimpinan kepala □ D. sekolah/madrasah Tidak melaksanakan tupoksi kepemimpinan kepala □ E. sekolah/madrasah
- 110. Sekolah/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk mendukung administrasi pendidikan. Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas dan petugas □ A. khusus Memiliki sistem informasi dan memiliki fasilitas tetapi tidak □ B. memiliki petugas khusus Memiliki sistem informasi dan memiliki petugas khusus □ C. tetapi tidak memiliki fasilitas Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas □ D. dan/atau petugas khusus □ E. Tidak memiliki sistem informasi

### VII. STANDAR PEMBIAYAAN

_		
111.		/Madrasah memiliki catatan tanunan berupa dokumen investasi dan prasarana secara menyelauh.
	□ A.	Memiliki catatan tahunan be upa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara meny∵ uruh selama 3 tahun terakhir
	□ B.	Memiliki catatan tahunan be upa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara meny∙ uruh selama 2 tahun terakhir
	□ C.	Memiliki catatan tahunan be upa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menye uruh selama 1 tahun terakhir
	□ <b>D</b> .	Memiliki catatan tahunan be ipa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak $\circ$ enyeluruh selama 1 (satu) tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki catatan tahunun berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana
112.	dan tena	/Madrasah membelanjakan bia a untuk pengembangan pendidik nga kependidikan berdasarkan encana Kerja dan Anggaran (Madrasah (RKA-S/M).
	□ A.	Membelanjakan biaya sebany k $76\%-100\%$ dari anggaran pengembangan pendidik dan anaga kependidikan dalam RKAS/M
	□ <b>B</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengembangan pendidik dan enaga kependidikan dalam RKA- S/M
	□ <b>c</b> .	Membelanjakan biaya sebany: < 26% — 50% dari anggaran pengembangan pendidik dan t⊕naga kependidikan dalam RKA- S/M
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanya 11% — 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tanaga kependidikan dalam RKA-S/M
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah/Madrasah memiliki modal kerja sebesar yang tertuang dalam RKA-S/M untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 91% - 100% modal □ A. kerja Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 81% — 90% modal □ B. keria Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 71% — 80% modal □ C. kerja Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan kurang dari 70% □ D. modal keria □ E. Sekolah/Madrasah tidak dapat merealisasikan modal keria 114. Sekolah/Madrasah membayar gaji, honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain pendidik pada tahun berjalan. Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatankegiatan sekolah, insentif, dan tunjangan lain bagi pendidik □ A. pada tahun berjalan Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan-□ B. kegiatan sekolah, dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan honor □ C. kegiatan-kegiatan sekolah tetapi tidak membayar insentif dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji tetapi tidak D. membayar honor kegiatan-kegiatan sekolah, insentif dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun berjalan

Tidak mengeluarkan dana untuk gaji, honor kegiatan-kegiatan

sekolah, insentif, dan tunjangan lain bagi pendidik pada tahun

berjalan sesuai yang direncanakan

□ E.

115.		/Madrasah membayar gaji, onor kegiatan-kegiatan sekolah, dan tunjangan lain tenaga ependidikan pada tahun berjalan.
	□ A.	Mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji, honor kegiatan- kegiatan sekolah, insentif dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun terjalan
	□ В.	Mengeluarkan dana untuk embayaran gaji, honor kegiatan- kegiatan sekolah, dan inse tif, tetapi tidak mengeluarkan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
	□ C.	Mengeluarkan dana untuk embayaran gaji dan honor kegiatan-kegiatan sekolah etapi tidak membayar insentif dan tunjangan lain bagi tenaga ependidikan pada tahun berjalan
	□ D.	Mengeluarkan dana untuk embayaran gaji tetapi tidak membayar honor kegiatan egiatan sekolah, insentif dan tunjangan lain bagi tenaga ependidikan pada tahun berjalan
	□ <b>E</b> .	Tidak mengeluarkan dana a pun bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan
116.	Sekolah	/Madrasah membelanjakan baya untuk menunjang pelaksanaan
110.	,	pembelajaran untuk satu tar ın terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya seban ak 76% — 100% dari alokasi

117.		Madrasah membelanjakan dana untuk kegiatan kesiswaan atu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan dana sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
	□ В.	Membelanjakan dana sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
	□ C.	Membelanjakan dana sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
	□ D.	Membelanjakan dana sebanyak $1\%-25\%$ dari alokasi anggaran kegiatan kesiswaan
	□ E.	Tidak membelanjakan alokasi dana anggaran kegiatan kesiswaan
118.		Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat tulis untuk pembelajaran selama satu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
	□ <b>c</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan alat tulis
	□ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya pengadaan alat tulis
119.		/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai egiatan pembelajaran selama satu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
	□ B.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
	□ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan bahan habis pakai

Tidak membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai

selama satu tahun terakhir

□ E.

120.		Madrasah membelanjakar biaya pengadaan alat habis pakai giatan pembelajaran selar a satu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya seli inyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan alat nabis pakai
	□ В.	Membelanjakan biaya seb∉nyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan alat habis pakai
	□ C.	Membelanjakan biaya seb⊘nyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan alat abis pakai
	□ D.	Membelanjakan biaya seb∂nyak 1% — 25% dari alokasi anggaran pengadaan alat nabis pakai
	□ E.	Tidak memberanjakan alok si biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun te akhir

121.	Sekolah/Madrasah membelanjakan bi ya pengadaan kegiatan r selama satu tahun terakhir.	
	□ A.	Membelanjakan biaya sebar 'ak 76% — 100% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan repat selama satu tahun terakhir
	□ В.	Membelanjakan biaya seban ak 51% — 75% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan repat selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rajat selama satu tahun terakhir
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi biaya pengadaan kegiatan rapat seama satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya ti aya pengadaan kegiatan rapat

122.		/Madrasah membelanjakan biay pengadaan transport dan an dinas selama satu tahun ter∉khir.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanya 76% — 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyai. 51% — 75% dari anggaran pengadaan transport dan perja anan dinas
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanya- 26% — 50% dari anggaran pengadaan transport dan perja⊨ nan dinas
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak $1\%-25\%$ dari anggaran pengadaan transport dan perjalahan dinas
	□ <b>E</b> .	Tidak membelanjakan biaya pengadaan transport dan perjalanan dinas

123.	Sekolah/Madrasah membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.	
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
	□ <b>c</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian
	□ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian
124.		/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan daya dan jasa satu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak $1\%-25\%$ dari alokasi anggaran pengadaan daya dan jasa
	□ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya pengadaan daya dan jasa

125.		Madrasah membelanjakan anggaran untuk mendukung operasi tidak langsung untuk satu tahun terakhir.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung
	□ E.	Tidak membelanjakan alokasi biaya untuk mendukung kegiatan operasi tidak langsung

126.	Biaya operasi sekolah digunakan uktuk: (1) kesejahteraan warga sekolah/madrasah, (2) pengembankan guru dan tenaga kependidikan, (3) sarana prasarana, (4) pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, dan (5) kegiatan keratausahaan.				
	□ A.	Selama setahun terakhir ∈ gunakan untuk 4 — 5 pos			
	□ В.	Selama setahun terakhir c gunakan untuk 3 pos			
	□ C.	Selama setahun terakhir digunakan untuk 2 pos			
	□ D.	Selama setahun terakhir di junakan hanya untuk 1 pos			
	□ E.	Selama setahun terakhir bilum digunakan			
127.	Sekolah,	/Madrasah memungut biaya endidikan.			
	□ A.	Seluruh siswa tidak dipung t biaya pendidikan			
	□ B.	Sebanyak 1% — 25% siswa dipungut biaya pendidikan			
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 26% — 50% sisv 3 dipungut biaya pendidikan			
	□ D.	Sebanyak 51% — 75% sis» ı dipungut biaya pendidikan			
	□ E.	Sebanyak 76% — 100% sis ra dipungut biaya pendidikan			
128.	Siswa di	kenakan biaya pendaftaran u ng setiap awal tahun pelajaran.			
	□ A.	Tidak ada seorangpun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahu pelajaran			
	□ <b>B</b> .	Sebanyak 1% — 25% siswa ikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahu. pelajaran			
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% siswe dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran			
	□ D.	Sebanyak 51% — 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran			
	□ <b>E</b> .	Sebanyak 76% — 100% sisw dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran			

129.		h/Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa mampu.
	□ A.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 90% siswa kurang mampu
	□ B.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 80 — 89% siswa kurang mampu
	□ C.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 70 — 79% siswa kurang mampu
	□ D	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu
	□ E.	Tidak melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
130.		h/Madrasah melakukan pungutan biaya personal lain di samping ekolah/madrasah.
	□ A	Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ B	Melakukan 1 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ c	Melakukan 2 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ <b>D</b>	Melakukan 3 jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ E	Melakukan 4 jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
131.	menar penye komite	mbilan keputusan sekolah/madrasah untuk menarik atau tidak ik dana dari masyarakat dilakukan dengan melibatkan unsur: (1) lenggara pendidikan/ yayasan, (2) kepala sekolah/madrasah, (3) e sekolah/madrasah, (4) perwakilan guru, dan (5) perwakilan a kependidikan.
	□ A	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 4 unsur yang terkait atau lebih
	□В	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 3 unsur yang terkait
	□ C	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan 2 unsur yang terkait
	□ D	Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan hanya 1 unsur yang terkait
	□ E	Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan · sekolah/madrasah lainnya

132.	Pengelo akuntab	laan dana dilakukan secara istematis, transparan, efisien, dan el.
	□ A.	Dilakukan secara sistema 3, transparan, efisien, dan akuntabel
	□ B.	Dilakukan secara sistemat ;, transparan, dan efisien, tetapi tidak akuntabel
	□ C.	Dilakukan secara sistemat dan transparan tetapi tidak efisien dan akuntabel
	□ D.	Dilakukan secara sistemat etetapi tidak transparan, efisien, dan akuntabel
	□ E.	Tidak sistematis, transpar 1, efisien, dan akuntabel
133.		/Madrasah memiliki pedoma pengelolaan keuangan sebagai alam penyusunan RKA-S/M.
	□ A.	Memiliki pedoman pengelo: an keuangan selama 4 tahun terakhir secara berturut-tu ut
	□ В.	Memiliki pedoman pengelo an keuangan selama 3 tahun terakhir secara berturut-tu at
	□ C.	Memiliki pedoman pengelo an keuangan selama 2 tahun terakhir secara berturut-tur it
	□ <b>D</b> .	Memiliki pedoman pengelol an keuangan selama 1 tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan
134.	Sekolah	'Madrasah memiliki pembuku∘n biaya operasional.
	□ A.	Memiliki pembukuan biaya rerasi secara menyeluruh selama 3 tahun terakhir secara ber rut-turut
	□ в.	Memiliki pembukuan biaya operasi secara menyeluruh selama 2 tahun terakhir secara berti rut-turut
	□ <b>c</b> .	Memiliki pembukuan biaya o erasi secara menyeluruh selama 1 tahun terakhir
	□ D.	Memiliki pembukuan biaya oderasi secara tidak menyeluruh selama 1 tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki pembukuan b aya operasional

135. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan A. dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 tahun terakhir Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan □ B. dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 tahun terakhir Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan C. dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 tahun terakhir Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan □ D. selama 1 tahun terakhir. Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan □ E.

keuangan

## VIII. STANDAR PENILAIAN

_			
136.	Guru menginformasikan rancangan an kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada semester yang berjalan.		
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% g ru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepa a siswa	
	□ В.	Sebanyak 51% — 75% gu u menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepa a siswa	
	□ C.	Sebanyak 26% — 50% go u menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepacu siswa	
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa	
	□ E <sub>+</sub>	Tidak ada guru yang meng iformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa	

137.	Teknik penilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).			
	□ A.	Sebanyak 96% — 100% s bus memuat teknik penilaian yang sesuai dangan indikat a pencapaian KD		
	□ В.	Sebanyak 91% — 95% sila us memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		
	□ c.	Sebanyak 86% — 90% sila us memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indika: pericapaian KD		
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 81% — 85% silal us memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikat percapaian KD		
	□ <b>E</b> .	Kurang dari 81% silabus menuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		

- 138. Guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilajan sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian. Sebanyak 86% — 100% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik □ A. penilaian Sebanyak 71% — 85% guru mengembangkan instrumen □ B. dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian Sebanyak 56% — 70% guru mengembangkan instrumen □ C. dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian Sebanyak 41% — 55% guru mengembangkan instrumen □ D. dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian Kurang dari 41% guru mengembangkan instrumen dan □ E. pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian
- 139. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian. Sebanyak 86% — 100% guru melakukan penilaian dengan □ A. menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian Sebanyak 71% — 85% guru melakukan penilaian dengan □ B. menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian Sebanyak 56% — 70% guru melakukan penilaian dengan □ C. menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian Sebanyak 41% — 55% guru melakukan penilaian dengan □ D. menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian Kurang dari 41% guru melakukan penilaian dengan □ E. menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian

- 140. Guru mengolah hasil penilaian untak mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belaiar siswa. Sebanyak 86% — 100% juru mengolah hasil penilaian □ A. untuk mengetahui kemai an hasil belajar dan kesulitan belajar siswa Sebanyak 71% — 85% guru mengolah hasil penilaian untuk □ B. mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar Sebanyak 56% — 70% g ru mengolah hasil penilaian untuk □ C. mengetahui kemajuan ha I belajar dan kesulitan belajar Sebanyak 41% — 55% giru mengolah hasil penilaian untuk □ D. mengetahui kemajuan hali belajar dan kesulitan belajar Kurang dari 41% guru m∈ golah hasil penilaian untuk O E. mengetahui kemajuan hasi belajar dan kesulitan belajar siswa
- 141. Guru mengembalikan hasil pemerik aan pekerjaan siswa disertai balikan/ komentar yang mendidik. Sebanyak 86% — 100% q ru mengembalikan hasil A. pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik Sebanyak 71% - 85% guru mengembalikan hasil □ B. pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik Sebanyak 56% - 70% gur, mengembalikan hasil □ C. pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik Sebanyak 41% — 55% guru mengembalikan hasil □ D. pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik Kurang dari 41% guru mengembalikan hasil pemeriksaan □ E. pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik

142.	Guru me	emanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
	□ В.	Sebanyak 71% — 85% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
	□ E.	Kurang dari 41% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk
		perbaikan pembelajaran
		perbaikan pembelajaran
143.	Guru me	elaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir er kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan belajar siswa.
143.	Guru me	elaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir er kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan
143.	Guru me semeste prestasi	elaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir er kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan belajar siswa.  Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi
143.	Guru me semeste prestasi	elaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir er kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan belajar siswa.  Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah  Sebanyak 95% — 99% guru melaporkan hasil penilaian
143.	Guru me semeste prestasi	elaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir er kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan belajar siswa.  Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah  Sebanyak 95% — 99% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah  Sebanyak 90% — 94% guru melaporkan hasil penilaian

144.	Guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.		
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama	
	□ В.	Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama	
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama	
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama	
	□ E.	Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama	

- 145. Guru melaporkan hasil penilaian kapribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan seba ai informasi untuk menentukan nilai akhir semester. Sebanyak 86% — 100% uru melaporkan hasil penilaian □ A. kepribadian siswa kepada puru Pendidikan Kewarganegaraan Sebanyak 71% — 85% g ru melaporkan hasil penilaian □ B. kepribadian siswa kepada juru Pendidikan Kewarganegaraan Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian □ C. kepribadian siswa kepada juru Pendidikan Kewarganegaraan Sebanyak 41% — 55% g. ru melaporkan hasil penilaian D. kepribadian siswa kepada uru Pendidikan Kewarganegaraan Kurang dari 41% guru me aporkan hasil penilajan kepribadian □ E. siswa kepada guru Pendid an Kewarganegaraan
- 146. Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaika kelas. Sekolah/Madrasah mengkordinasikan ulangan tengah semester, akhir semester, an kenaikan kelas melalui rapat □ A. yang dihadiri oleh guru mata pelajaran, guru kelas, dan kepala sekolah Sekolah/Madrasah mengkor rdinasikan ulangan tengah, □ B. akhir semester, dan kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri oleh guru kelas, din kepala sekolah Sekolah/Madrasah mengkogrdinasikan ulangan tengah. akhir semester, dan kenaik in kelas melalui rapat yang dihadiri oleh sebagian guru dan kepala sekolah Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah. □ D. akhir semester, dan kenaikan kelas tanpa melalui rapat Sekolah/Madrasah tidak mengkoordinasikan ulangan tengah □ E. dan akhir semester

147.	Sekolah,	/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.
	□ A.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri kepala sekolah, guru kelas, dan guru mata pelajaran
	□ В.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat yang dihadiri kepala sekolah dan guru kelas tanpa guru mata pelajaran
	□ <b>c</b> .	Menentukan kriteria kenaikan kelas melaui rapat yang dihadiri kepala sekolah dan sebagian guru
	□ <b>D</b> .	Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh kepala sekolah tanpa melalui rapat
	□ E.	Tidak ada kriteria kenaikan kelas secara jelas
148.	estetika	/madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, sehatan.
	□ A.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas
	□ В.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru kelas tanpa guru mata pelajaran
	□ c.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan sebagian guru
	□ D.	Menentukan nilai akhir oleh guru mata pelajaran tanpa melalui rapat
	□ E.	Ditetapkan oleh guru
149.		n/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian.
	□ A.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan guru kelas
	□ В.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran
	□ C.	Menentukan nilai akhir melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah dan sebagian guru
	□ D.	Menentukan nilai akhir oleh guru mata pelajaran tanpa melalui rapat
	□ E.	Ditetapkan oleh guru

150.	Sekolah/Madrasah melaporkan ha il penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan pendidikan.						
	Laporan hasil penilaian s tiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekola /madrasah dan wali kelas kepada orang tua/wali siswa dar siswa yang bersangkutan						
	Ģ В.	Laporan hasil penilaian se iap akhir semester dengan 8. penjelasan kepala sekolar 'madrasah dan wali kelas kepada orang tua/wali siswa tan: siswa yang bersangkutan					
Laporan hasil penilaian se ap akhir semester tanpa penjelasan umum kepala akolah/madrasah tetapi langsu dari wali kelas kepada ore g tua/wali siswa dan siswa yar bersangkutan							
	□ D.	Laporan hasil penilaian set ap akhir semester tanpa penjelasan umum kepala si kolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan					
	□ E.	Tidak melaporkan hasil per aian langsung kepada siswa					
151.		Madrasah melaporkan penca aian hasil belajar siswa kepada ndidikan Kabupaten/Kota.					
	□ A.	Melaporkan pencapaian hasi belajar siswa kurang dari 20 hari setelah akhir semester					
	□ В.	Melaporkan pencapaian hasii belajar siswa antara 21 $-$ 40 hari setelah akhir semester					
	□ C.	Melaporkan pencapaian hasılı pelajar siswa antara 41 — 60 hari setelah akhir semester					
	□ <b>D</b> .	Melaporkan pencapaian hasil $^{\vee}$ elajar siswa antara 61 $-$ 80 hari setelah akhir semester					
	□ E.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa lebih dari 80 hari setelah akhir semester					
152.	Sekolah/	Madrasah menentukan kelulusen siswa dari satuan pendidikan.					
	□ A.	Menentukan kelulusan melalui rapat yang dihadiri guru kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah/madrasah					
	□ В.	Menentukan kelulusan melalui rapat yang dihadiri guru kelas dan kepala sekolah/madrasah, tanpa guru mata pelajaran					
	□ c.	Menentukan kelulusan melalui rapat dihari oleh perwakilan guru dan kepala sekolah/madrasah					
	□ D.	Menentukan kelulusan tanpa melalui rapat					
	□ <b>E</b> .	Tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan					

153.	Sekolah, UASBN.	/Madrasah menentukan nilai rata-rata sebagai kriteria kelulusan
	□ A.	Lebih besar dari 6,00
	□ В.	Antara 5,01 — 6,00
	□ <b>c</b> .	Antara 4,01 — 5,00
	□ <b>D</b> .	Antara 3,01 — 4,00
	□ E.	Lebih kecil dari 3,01
154.		/Madrasah menentukan nilai minimal mata pelajaran sebagai kelulusan UASBN.
	□ A.	Lebih besar dari 5,00
	□ в.	Antara 4,01 — 5,00
	□ <b>c</b> .	Antara 3,01 — 4,00
	□ <b>D.</b>	Antara 2,01 — 3,00
	□ E.	Lebih kecil dari 2,01
155.	Hasii Uji	/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan an Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) setiap siswa engikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).
	□ A.	Kurang dari 7 hari setelah pengumuman hasil ujian
	□ В.	Antara 8 $-$ 14 hari setelah pengumuman hasil ujian
	□ c.	Antara 15 $-$ 21 hari setelah pengumuman hasil ujian
	□ <b>D</b> .	Antara 22 — 28 hari setelah pengumuman hasil ujian
	□ E.	Lebih dari 28 hari setelah pengumuman hasil ujian
156.	Sekolah telah lu	/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang Ilus.
	□ A.	Kurang dari 7 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ B.	Antara 8 — 14 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ c.	Antara 15 — 21 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ D.	Antara 22 — 28 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ E.	Lebih dari 28 hari setelah blangko ijazah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandenag

157.	Sekolah/Madrasah menerima siswa paru dengan menggunakan berbagai pertimbangan.		
	□ A.	penerimaan siswa baru hanya mempertimbangkan usia	
	□ В.	penerimaan siswa baru $\sigma^-$ mpertimbangkan usia dan jarak tempat tinggal	
	□ c.	penerimaan siswa baru menpertimbangkan usia dan tes masuk	
	□ D.	penerimaan siswa baru m∈ npertimbangkan unsur usia, jarak tempat tinggal, dan ∋rtifikat tamat TK/RA	
	□ E.	penerimaan siswa baru tid. mempertimbangkan persyaratan apa pun	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TD.

AMBANG SUDIBYO

#### **PERATURAN** MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

#### NOMOR 12 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

### KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAW!YAH (SMP/MTs)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan keterituan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan:
  - b bahwa dalam rangka pelaksariaari ketentuari Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAN-S/M telah merumuskan kriteria dari perangkat akreditasi sekolah/madrasah dan telah meridapatkan pertimbangan dari Badari Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dari huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);

- Mengingat 1 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008:

- 4. Keputusan Presiden Dmor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapii kali diubah erakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 200
- Peraturan Menteri Penc dikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Eadan Akredita Nasional Sekolah/Madrasah:
- Peraturan Menteri Penc likan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Pe angkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 7. Keputusan Menteri Per lidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan unggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan adar Akreditasi Nasional Pendidikan Nonforma:

#### MEMUTUS AN:

Menetapkar | PERATURAN MENTERI | NDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PER IGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MA RASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs).

#### Pasal 1

- (1) Kriteria dan perangkat akreditasi sek ah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) me puti instrume akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengump lan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan perinnglatan hasil akreditasi.
- (2) Kriteria dan perangkat altreditasi seba simana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan se olah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) yang diakreditasi.
- (3) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolih menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) sebagaimana dima sud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV Peraturan Menter

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggili ditetapkan.

Diteta : an di Jakarta pada langgal 4 Maret 2009

MENT RI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMB, 1G SUDIBYO

#### INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs)

# PETUNJUK UMUM

- Periksalah kelengkapan Perangkat Akreditasi SMP/MTs yang terdiri atas:
  - Instrumen Akreditasi SMP/MTs.
  - Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi SMP/MTs.
  - Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP/MTs, dan
  - d. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi SMP/MTs.

Keempat dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, sebelum memilih jawaban pada butir-butir pernyataan instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi dan mengisi Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi.

- Isilah instrumen akreditasi SMP/MTs dengan cara memberi tanda ceklis (✓) 2. pada kotak opsi jawaban yang sesuai yaitu "A", "B", "C", "D", atau "E" pada butir instrumen yang meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan:
  - Komponen standar isi nomor 1 = 17. a.
  - Komponen standar proses nomor 18 29. h.
  - Komponen standar kompetensi lulusan nomor 30 49.
  - d. Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan nomor 50 - 75.
  - Komponen standar sarana dan prasarana nomor 76 103.
  - f. Komponen standar pengelolaan nomor 104 - 123.
  - Komponen standar pembiayaan nomor 124 148. q.
  - Komponen standar penilaian nomor 149 169. h\_

- Jawablah semua butir secara obyek f dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ada di sekolah/mac asah Saudara.
- 4. Siapkanlah seluruh bukti fisik yang d persyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi SMP/MTs dan Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP MTs yang akan digunakan oleh Tim Asesor pada saat melakukan klarifikan, verifikasi, dan validasi.
- Sebelum mengisi Instrumen Akredita: SMP/MTs ini, isilah terlebih dahulu (a) pernyataan kepala sekolah/madra ah; dan (b) data identitas sekolah/madrasah.

# PERNYATAAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di ba	wah ini,		
Nama :			
Nama sekolah/madrasah :			_
Alamat sekolah/madrasah:			
Dengan ini menyatakan bah	ıwa:		
1. Data yang diberikan da	alam dokumen ini	adalah benar dan sesuai de	engan
keadaan sesungguhnya	a.		
2. Saya bertanggung jawa	ab atas jawaban d	lan pernyataan yang diberi	kan
dalam dokumen ini.			
Demikian pernyataan ini sa	ya buat dengan se	esungguhnya dan penuh ra	sa
tanggung jawab.			
Pernyataan ini dibuat pada	tanggal	, 20	
Di			
Kepala sekolah/madrasah,			
Matauri			
Materai Rp.6000,-			
(	1		
,			
Catalan			

#### Catatan:

- 1. Tanda tangan harus mengenai materai.
- 2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

# DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1.	Nama Sekolah/Madrasah	: _	_		_		
2.	Nomor Statistik Sekolah/Madrasa (NSS/M)	h :_					
3.	Alamat Sekolah/Madrasah	:	_				
	Kecamatan	: .					
	Kab/Kota (coret salah satu)	: _	_				
	Provinsi						
	Kode Pos	:	-				
	Telepon dan Faksimil	: _	_	_			
	E-mail	: .		_			
5.	Status Sekolah/Madrasah	:	$\Gamma$	leger	i,	☐ Swasta	
6.	Nama Yayasan	: .		_			
7.	No Akte Pendirian Terakhir	: ,	_	_			
8.	Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah	: .	_	-	_		
9.	Status Akreditasi/Tahun	:,	_	1	_	/	
10.	Visi Sekolah/Madrasah	;					
		_	_	+	H		_
		_	_	+	۰		_
		_	_	+	+		-
		_	_	+	+		_
		_		+	+		

## I. STANDAR ISI

1.		/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan muatan m Tingkat Satuan Pendidika (KTSP).
	□ A.	Melaksanakan kurikulum bi rdasarkan 8 muatan KTSP
	□ в.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 muatan KTSP
	□ c.	Melaksanakan kurikulum be dasarkan 6 muatan KTSP
	□ D.	Melaksanakan kurikulum be dasarkan 5 atau kurang muatan KTSP
	□ E.	Tidak melaksanakan KTSP
2.		/Madrasah mengembangkan kurikulum bersama-sama pihak erpedoman pada panduan pel yusunan kurikulum yang disusun NP.
	□ A.	Mengembangkan kurikulum ersama seluruh guru mata pelajaran, konselor, dan kore te sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pen- dikan
	□ в.	Mengembangkan kurikulum ersama perwakilan guru mata pelajaran, konselor, dan kon te sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pene dikan
	□ c.	Mengembangkan kurikulum ersama perwakilan guru mata pelajaran dan komite sekolah madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan
	□ D.	Mengembangkan kurikulum b-rsama perwakilan guru mata pelajaran tanpa melibatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga penc dikan
	□ E.	Tidak mengembangkan kurikulum
3.		Madrasah mengembangkan kutikulum dengan menggunakan engembangan KTSP.
	□ A.	Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan 7 prinsip pengembangan KTSP
	□ в.	Mengembangkan kurikulum de $\cdot$ gan menggunakan 5 — 6 prinsip pengembangan KTSP
	□ c.	Mengembangkan kurikulum de $\uppha$ gan menggunakan 3 — 4 prinsip pengembangan KTSP
	□ D.	Mengembangkan kurikulum dengan menggunakan $1-2$ prinsip pengembangan KTSP

	□ E.	Tidak mengembangkan kurikulum		
4.	Sekolah/Madrasah melaksanakan pengembangan kurikulum melalui mekanisme penyusunan KTSP.			
	☐ A.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 7 kegiatan pokok		
	□ в.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 5 — 6 kegiatan pokok		
	□ c.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 3 — 4 kegiatan pokok		
	□ D.	Mekanisme penyusunan kurikulum dilakukan melalui 1 $\overline{}$ 2 kegiatan pokok		
	□ E.	Tidak mengembangkan kurikulum		
5.		Madrasah melaksanakan kurikulum dalam bentuk pengajaran rkan prinsip pelaksanaan kurikulum.		
	□ A.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 7 prinsip pelaksanaan		
	□ в.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 5 — 6 prinsip pelaksanaan		
	□ c.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 3 — 4 prinsip pelaksanaan		
	□ D.	Melaksanakan kurikulum berdasarkan 1 — 2 prinsip pelaksanaan		
	□ E.	Tidak melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip dimaksud		
6.	Sekolah/Madrasah menyusun silabus mata pelajaran muatan lokal dengan melibatkan pihak: (1) kepala sekolah/madrasah, (2) guru, (3) komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, (4) dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kandepag, dan (5) instansi terkait di daerah.			
	□ A.	melibatkan 4 — 5 pihak		
	□ в.	melibatkan 3 pihak		
	□ c.	melibatkan 2 pihak		
	□ D.	melibatkan 1 pihak		
	□ E.	Tidak menyusun silabus mata pelajaran		

7.		Madrasah melaksanakan pogram pengembangan diri dalam egiatan ekstrakurikuler.
	□ A.	Melaksanakan 4 jenis atac lebih program ekstrakurikuler
	□ в.	Melaksanakan 3 jenis program ekstrakurikuler
	□ c.	Melaksanakan 2 jenis program ekstrakurikuler
	□ D.	Melaksanakan 1 jenis program ekstrakurikuler
	□ E.	Tidak melaksanakan program ekstrakurikuler
8.		Madrasah melaksanakan pr⊕gram pengembangan diri dalam egiatan layanan konseling.
	□ A.	Melaksanakan 4 jenis kegia an layanan konseling
	□ в.	Melaksanakan 3 jenis kegiatan layanan konseling
	□ c.	Melaksanakan 2 jenis kegia: an layanan konseling
	□ D.	Melaksanakan 1 jenis kegia an layanan konseling
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiat n layanan konseling
9.		'Madrasah menjabarkan Stan: ar Kompetensi (SK) dan ensi Dasar (KD) ke dalam indi-ator-indikator untuk setiap mata n.
	□ A.	Sebanyak 10 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ в.	Sebanyak 7 — 9 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ c.	Sebanyak 4 — 6 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ D.	Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran telah sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran yang sesuai antara SK, KD, dan indikator-indikatornya

10.	ketentua	Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan n beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas 2 Tahun 2006.
	□ A.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas dan menyelenggarakan program pengayaan
	□ в.	Menerapkan 3 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ c.	Menerapkan 2 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	□ D.	Menerapkan 1 ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
	☐ E.	Tidak menerapkan ketentuan beban belajar sesuai dengan Permendiknas
11.	mandiri t	ta pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan idak terstruktur untuk mencapai kompetensi yang diberikan iswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
	□ E.	Tidak ada guru mata pelajaran memberikan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
12.		oangan KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan yang kutan atau Kanwil Depag/Kandepag.
	□ A.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 10 atau lebih silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
	□ в.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 7 — 9 silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
	□ c.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag dan sebanyak 4 — 6 silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
	□ D.	KTSP telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Kanwil Depag/

		Kandepag dan sebanyak $1-3$ silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya
	□ E.	KTSP tidak disahkan oleh [ nas Pendidikan atau Kanwil Depag/ Kandepag
13.		Madrasah mengembangkan ilabus mata pelajaran dengan nakan 7 langkah pengemban an silabus.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% silabus mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 lar $\circ$ kah pengembangan silabus
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% sila≀us mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 lan kah pengembangan silabus
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% sila sis mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 lan kah pengembangan silabus
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% silabu mata pelajaran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus
	□ E.	Tidak ada silabus mata pelajeran dikembangkan dengan menggunakan 7 langkah pengembangan silabus
14.	Dalam m	nengembangkan KTSP, guru reanyusun silabus sendiri.
4.7.	☐ A.	Sebanyak 76% — 100% gur, menyusun silabus sendiri
	☐ B.	Sebanyak 51% — 75% guru -nenyusun silabus sendiri
	☐ c.	Sebanyak 26% — 50% guru inenyusun silabus sendiri
	☐ D.	Sebanyak 1% — 25% guru menyusun silabus sendiri
	□ E.	Tidak ada guru menyusun silabus sendiri
15.		Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk ata pelajaran melalui rapat dewan guru.
	□ A.	Sebanyak 4 atau lebih mata r⊛lajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
	□ в.	Sebanyak 3 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
	□ c.	Sebanyak 2 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
	□ D.	Sebanyak 1 mata pelajaran dengan KKM 75,00 atau lebih
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran dendan KKM 75,00 atau lebih
16.	mempe	n/Madrasah menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan erhatikan: (1) karakteristik siswa, (2) karakteristik mata an, dan (3) kondisi sekolah/madrasah.
	□ A.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru
	□ в.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 2 unsur melalui rapat dewan guru

	□ c.	Menentukan KKM dengan memperhatikan 1 unsur melalui rapat dewan guru	
	□ D.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur melalui rapat dewan guru	
	□ E.	Menentukan KKM tanpa memperhatikan 3 unsur dan tidak melalui rapat dewan guru	
17.	. Sekolah/Madrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur pada kalender pendidikan yang dimiliki.		
	A. Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara ri		
	□ в.	Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara rinci	
	□ c.	Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara kurang rinci	
	□ D.	Menyusun kalender pendidikan sekolah/madrasah secara tidak rinci	
		Tidely many value belonder and dillion calculab /maduscab	

## II. STANDAR PROSES

18.	lainnya	/Madrasah mengembangkan ⊊ abus secara mandiri atau cara berdasarkan standar isi, stan∈r kompetensi lulusan, dan n penyusunan KTSP.
	□ A.	Mengembangkan silabus me alui kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah
	□ в.	Mengembangkan silabus secara mandiri
	□ c.	Mengembangkan silabus secera kelompok dari beberapa sekolah/madrasah
	□ D.	Mengembangkan silabus der an mengadopsi contoh yang sudah ada
	□ E.	Tidak mengembangkan silab 5
19.		nata pelajaran memiliki Rencar Pelaksanaan Pembelajaran ng dijabarkan dari silabus.
	□ A.	Sebanyak 10 atau lebih mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ в.	Sebanyak 7 — 9 mata pelaja n memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ c.	Sebanyak 4 — 6 mata pelajar n memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ D.	Sebanyak 1 — 3 mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran mer iliki RPP yang dijabarkan dari silabus
20.	keterpad	n RPP disusun oleh guru berdasarkan prinsip keterkaitan dan luan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan jaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% RPP dik embangkan berdasarkan prinsip di atas
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas

	□ E.	Tidak ada RPP dikembangkan berdasarkan prinsip di atas
21.	Dalam m	nengembangkan KTSP, guru menyusun RPP.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% RPP disusun oleh guru
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% RPP disusun oleh guru
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% RPP disusun oleh guru
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% RPP disusun oleh guru
	□ E.	Tidak ada RPP disusun oleh guru
22.		/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan ihi persyaratan yang ditentukan.
	□ A.	Memenuhi 4 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ в.	Memenuhi 3 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ c.	Memenuhi 2 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ D.	Memenuhi 1 persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
	□ E.	Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
23.		embelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah pembelajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ D.	Sebanyak $1\% - 25\%$ guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
	□ E.	Tidak ada guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai

24.	Sekolah/Madrasah melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran.			
	□ A.	A. Sebanyak 76% — 100% gur melakukan penilaian hasil belaja untuk memperbaiki proses $\rho$ mbelajaran		
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% guru nelakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses $\rho$ mbelajaran		
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% guru melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran		
	□ D.	Sebanyak 1% 25% guru n elakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran		
	□ E.	Tidak melakukan penilaian hasil belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran		
25.	madrasa	uan proses pembelajaran dilak kan oleh kepala sekolah/ h mencakup tiga tahapan yaitu (1) tahap perencanaan, (2) laksanaan, dan (3) tahap peniman hasil pembelajaran.		
	□ A.	Mencakup 3 tahap pemantaua serta dilakukan diskusi hasil pemantauan		
	□ в.	Mencakup 3 tahap pemantaué tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan		
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Mencakup 2 tahap pemantaua		
	□ D.	Mencakup 1 tahap pemantauan		
	□ E.	Tidak pernah melakukan pemar tauan		
26.	dengan e	i proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah empat cara yaitu: (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) a, dan (4) konsultasi.		
	□ A.	Melakukan supervisi proses per belajaran melalui 4 cara		
	□ в.	Melakukan supervisi proses penibelajaran melalui 3 cara		
	□ c.	Melakukan supervisi proses pempelajaran melalui 2 cara		
	□ D.	Melakukan supervisi proses pempelajaran melalui 1 cara		
	□ E.	Tidak melakukan supervisi		

27.	Evaluasi terhadap guru dalam proses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah, dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) evaluasi pembelajaran, dan (4) rencana tidak lanjut.		
	□ A.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek	
	□ в.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek	
	□ c.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek	
	□ D.	Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan 1 aspek	
	□ E.	Tidak melakukan evaluasi	
28.	. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan hasil pengawasan proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan.		
	□ A.	Hasil pengawasan disampaikan kepada guru yang bersangkutan, dewan guru, pengawas sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah	
	□ в.	Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah	
	□ c.	Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan dan dewan guru	
	□ D.	Hasil pengawasan disampaikan kepada yang bersangkutan saja	
	□ E.	Tidak menyampaikan hasil pengawasan	
29.	. Kepala sekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran.		
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti	
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindaklanjuti	
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir ditindak lanjuti	
$\square$ D. Sebanyak $1\% = 25\%$ hasil pengawasan selama satu tah terakhir ditindaklanjuti			

E. Tidak ada hasil pengawasan ditindaklanjuti				
ш. :	STANDAR	KOMPETENSI LULUSAN		
30.		emperoleh pengalaman belajur untuk menunjukkan kemampuan logis, kritis, kreatif, dan Inovalif dalam pengambilan keputusan.		
	□ A.	Rata-rata nilai ketuntasan bajar kelompok mata pelajaran iptek 75,00 atau lebih		
	□ в.	Rata-rata nilai ketuntasan be ajar kelompok mata pelajaran iptek 70,00 — 74,99		
	□ c.	Rata-rata nilai ketuntasan be ajar kelompok mata pelajaran iptek 65,00 — 69,99		
	□ D.	Rata-rata nilai ketuntasan bajar kelompok mata pelajaran iptek 60,00 64,99		
	□ E.	Rata-rata nilai ketuntasan be ajar kelompok mata pelajaran iptek kurang dari 60,00		
31.	Siswa m	emperoleh pengalaman belaja yang dapat menganalisis gejala n sosial.		
	□ A.	Sekolah/Madrasah melaksan (an 4 atau lebih kegiatan yang dapat menganalisis gejala alan dan sosial		
	□ в.	Sekolah/Madrasah melaksana an 3 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dar sosial		
	□ c.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial		
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial		
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial		
32.	untuk me	emperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan encari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber elama satu tahun pelajaran terakhir.		
	□ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan 10 kali atau lebih kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar		
	□ в.	Sekolah/Madrasah menjalankarı 7 — 9 kali kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar		
	□ c.	Sekolah/Madrasah menjalanka: 4 — 6 kali kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut		

		gai sumber belajar
☐ <b>D</b> .	pembiasaa	adrasah menjalankan 1 — 3 kali kegiatan n untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut gai sumber belajar
□ E.		adrasah tidak menjalankan kegiatan pembiasaan cari informasi/pengetahuan lebih lanjut dari berbagai lajar
33.	meman	nemperoleh pengalaman belajar yang mampu faatkan lingkungan secara produktif dan Igung jawab.
	<u></u> А.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 jenis atau lebih kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	В.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	c.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 jenis kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
	E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang dapat memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
34.		nemperoleh pengalaman mengekspresikan diri kegiatan seni dan budaya.
	 A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 kali atau lebih kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
	В.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
	C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir
		Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 kali kegiatan untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan

D.	seni dan bu aya dalam satu tahun terakhir
□ E.	Sekolah/Maurasah tidak memfasilitasi kegiatan untuk mengi kspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya dalam satu tahun terakhir

35.	kegiata	nemperoleh peng laman belajar melalui jenis n pada kelompok nata pelajaran kewarganegaraan pribadian.
		Sekolah/Madesah melaksanakan 4 atau lebih jenis kegiatar kelompok mata pelajaran kewarganega san dan kepribadian
	<u></u> В.	Sekolah/Madr sah melaksanakan 3 jenis kegiatan kelo- pok mata pelajaran kewarganega- an dan kepribadian
	С.	Sekolah/Madr sah melaksanakan 2 jenis kegiatan kelor pok mata pelajaran kewarganegar an dan kepribadian
	□ D.	Sekolah/Madra ah melaksanakan 1 jenis kegiatan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
	E.	Sekolah/Madra: ah tidak melaksanakan kegiatar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dar kepribadian

36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkembangkan		
	зікар реі	rcaya diri dan tanggung jawab.	
	□ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 4 jenis dan/atau 4 kali atau lebih dalam satu tahun terakhir	
	□ в	Sekolah/Madrasah menjalanka^ kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap ercaya diri dan tanggung jawab sebanyak 3 jenis dan/atau 3 k $\epsilon$ i dalam satu tahun terakhir	
	□ c.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 2 jenis dan/atau 2 kan dalam satu tahun terakhir	
	□ D.	Sekolah/Madrasah menjalankar kegiatan kesiswaan guna menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab sebanyak 1 jenis dan/atau 1 ka dalam satu tahun terakhir	
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak menjal nkan kegiatan kesiswaan guna	

menumbuhkembangkan sikap percaya diri dan tanggung jawab Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 4 jenis dan/atau 4 kali atau lebih dalam satu tahun terakhir Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-∩ в. aturan sosial sebanyak 3 jenis dan/atau 3 kali dalam satu tahun terakhir Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturan-C. aturan sosial sebanyak 2 jenis dan/atau 2 kali dalam satu tahun terakhir Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan penegakan aturanaturan sosial sebanyak 1 jenis dan/atau 1 kali dalam satu tahun terakhir Sekolah/Madrasah tidak menjalankan kegiatan penegakan □ E. aturan-aturan sosial 38. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 atau lebih kegiatan yang □ A. mampu menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kegiatan yang mampu Эв. menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kegiatan yang mampu ⊃ c. menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kegiatan yang mampu □ D. menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan yang mampu ☐ E. menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil terbaik 39. Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI. Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara

1		demokratis dalam satu tahun terakhir
	□ в.	Sekolah/Madrasah mela+ anakan 3 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisip si siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangs , dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir
	□ c.	Sekolah/Madrasah melak unakan 2 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipa siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangs dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipas siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak m- aksanakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam satu tahun terakhir
40.	Siswa m	remperoleh pengalaman belaja untuk membentuk karakter,
		buhkan rasa sportivitas, dan ke persihan lingkungan.
	□ A.	Sekolah/Madrasah melaksan kan 4 kali atau lebih kegiatan untuk membentuk karakter, nenumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan de am satu tahun terakhir
	□ в.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menumpuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun terakhir
	□ c.	Sekolah/Madrasah melaksana an 2 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menum: uhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam : atu tahun terakhir
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanak in 1 kali kegiatan untuk membentuk karakter, menumt ihkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam $\mathbf{s}\cdot$ tu tahun terakhir
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan untuk membentuk karakter, menumbahkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan dalam saau tahun terakhir
41.		emperoleh pengalaman belajar untuk dapat menjalankan ajaran lan akhlak mulia yang bersifat afektif.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 jenis atau lebih kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir

□ в.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
□ c.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
□ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 jenis kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama dalam satu tahun terakhir
□ <b>ε</b> .	Sekolah/Madrasah tidak pernah melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan ajaran agama

42.	Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.		
	□ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir	
	□ в.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir	
	□ c.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 2 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir	
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 1 kali kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir	
	□ ε.	Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global dalam satu tahun terakhir	

43.		nemperoleh pengalaman be jar dalam pembentukan akhlak mulia pembiasaan dan pengamal n.
	□ A.	Sekolah/Madrasah setiap ninggu melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan pembentuk n akhlak mulia melalui program pengembangan diri
	□ в.	Sekolah/Madrasah setiap inggu melaksanakan 3 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
	□ c.	Sekolah/Madrasah setiap r inggu melaksanakan 2 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui program pengembangan diri
	□ D.	Sekolah/Madrasah setiap n nggu melaksanakan 1 kali kegiatan pembentukan akhlak mulia nelalui program pengembangan diri
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak me aksanakan kegiatan pembentukan akhlak mulia melalui progre n pengembangan diri
44.	Siswa m untuk m lain.	emperoleh pengalaman belaja melalui program pembiasaan enghargai perbedaan pendapa, dan berempati terhadap orang
44.	untuk m	emperoleh pengalaman belaja melalui program pembiasaan enghargai perbedaan pendapa dan berempati terhadap orang Sebanyak 76% — 100% kegratan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kei mpok, dan persaingan sehat
44.	untuk m lain.	enghargai perbedaan pendapa, dan berempati terhadap orang Sebanyak 76% — 100% kegistan pembelajaran menggunakan
44.	untuk m lain.	Sebanyak 76% — 100% kegistan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kel mpok, dan persaingan sehat Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan
44.	untuk mlain.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan
44.	untuk m lain.  A.  B.  C.	Sebanyak 76% — 100% kegistan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kel mpok, dan persaingan sehat  Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kela mpok, dan persaingan sehat  Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kela mpok, dan persaingan sehat  Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat  Sebanyak 1% — 25% kegiatan pembelajaran menggunakan
44.	untuk m lain.  A.  B.  C.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Sebanyak 1% — 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelampok, dan persaingan sehat Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan
44.	untuk m lain.  A. B. C. D. E.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelumpok, dan persaingan sehat Sebanyak 51% — 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelumpok, dan persaingan sehat Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelumpok, dan persaingan sehat Sebanyak 26% — 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelumpok, dan persaingan sehat Sebanyak 1% — 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelumpok, dan persaingan sehat Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan

□ в.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
□ c.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
□ <b>D</b> .	Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 kali kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir
□ Е.	Sekolah/Madrasah tidak memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok dalam satu tahun terakhir

46.	Siswa memperoleh pengalaman keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.	
	□ A.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal
	□ в.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan, dan majalah dinding
	□ c.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisata/studi lapangan
	□ D.	Sekolah/Madrasah menyediakan kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak menyediakan kumpulan karya tulis siswa

 Siswa memperoleh pengalaman keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.

I	□ A.	Sekolah/M	ladrasah menghas kan 4 atau lebih karya siswa
l	□ в.	Sekolah/M	ladrasah menghasi kan 3 karya siswa
l	□ c.	Sekolah/M	ladrasah menghas kan 2 karya siswa
l	□ D.	Sekolah/M	ladrasah menghas kan 1 karya siswa
	□ E.	Sekolah/M	ladrasah tidak mer hasilkan karya siswa
	48.		memperoleh penga man belajar dalam mbangkan iptek sa ing dengan perkembangannya.
I		 A.	Sekolah/Madr iah melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan iengembangan iptek
l		В.	Sekolah/Madr. ah melaksanakan 3 kali kegiatan pengembangar iptek
		C.	Sekolah/Madræ ah melaksanakan 2 kali kegiatan pengembanga iptek
		D.	Sekolah/Madra ah melaksanakan 1 kali kegiatan pengembangar iptek
			Sekolah/Madra ah tidak melaksanakan kegiatan

49.	mengu	nemperoleh pengalarnan belajar dan mampu asai pengetahuan uruk melanjutkan ke jenjang kan yang lebih tingga.
	 A.	Sekolah/Madra: h melaksanakan 4 kali atau lebih kegiatan y ng mampu menguasai pengetahuan ur uk melanjutkan ke jenjang pendidikan yanc lebih tinggi
	В.	Sekolah/Madrasah melaksanakan 3 kali kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan kelanjang pendidikan yang lebih tinggi
	c.	Sekolah/Madrasan melaksanakan 2 kali kegiatan yang mampu manguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke ⊇njang pendidikan yang lebih tinggi
	D.	Sekolah/Madrasan melaksanakan 1 kali kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke janjang pendidikan yang lebih

1	tinggi
E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah melaksanakan kegiatan yang mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

## IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

50.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).	
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru berpendidikan D-IV atau S1
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% guru berpendidikan D-IV atau S1
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% guru berpendidikan D-IV atau S1
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru berpendidikan D-IV atau S1
	□ E.	Tidak ada guru berpendidikan D-IV atau S1

51.	Guru mata pelajaran mengajar ses ii dengan latar belakang pendidikannya.		
	□ A.	Sebanyak 76 % — 100% $\S$ ru mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata $\wp$ ajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya	
	□ 8.	Sebanyak 51% — 75% gulu mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang perdidikannya	
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% gara mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata perajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya	
	□ b.	Sebanyak 1% — 25% gura mata pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yana diajarkan dengan latar belakang pendidikannya	
	□ E.	Tidak ada guru mata pelaja an memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diajar an dengan latar belakang pendidikannya	
52.		miliki kesehatan jasmani da rohani untuk menjalankan tugas r dan tugas lairnya.	
	□ A.	Rata-rata kehadiran guru 9 % — 100% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lannya	
	□ в.	Rata-rata kehadiran guru 🤄 % — 95% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas 🗀 nnya	
	□ c.	Rata-rata kehadiran guru 86% — 90% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya	
	□ D.	Rata-rata kehadiran guru 81% — 85% untuk menjalankan tugas mengajar dan tugas lainnya	
	□ E.	Rata-rata kehadiran guru ku ang dari 81% untuk menjalankan tugas mengaja dan tugas la anya	
53.		rencanakan, melaksanakan, on mengevaluasi pembelajaran engan prinsip-prinsip pembela aran.	
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% gur merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelaja an sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran	
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% guru Terencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelaja an sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran	
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% guru merencanakan, melaksanakan,	

		dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% — 25% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
1	□ E.	Tidak ada guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran
54.	Guru me	emiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma
	agama,	hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.  Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,
	□ A.	sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku

Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diberi kesempatan memperbaiki diri dan dilakukan pembinaan Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan lisan Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya diberikan peringatan tertulis Adanya guru yang melanggar norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah dikenai □ E. sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau dikeluarkan

55.	Guru berkomunikasi secara efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat.	
	□ A.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa
	□ в.	Adanya dialog dalam rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah

	□ c.	Adanya dialog dalam ra, it dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/mac asah
	□ D.	Adanya rapat dewan gur
	□ E.	Tidak diadakan rapat
56.		nguasai materi pelajaran 👚 ng diajarkan serta mengembangkan gan metode ilmiah.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% - ıru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konse -, dan pola pikir keilmuan
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% gu u memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konse; . dan pola pikir keilmuan
	□ c.	Sebanyak 26% — 50% go u memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsec dan pola pikir keilmuan
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% guru memiliki penguasaan materi pelajaran, struktur, konsen dan pola pikir keilmuan
	□ E.	Tidak ada guru memiliki pe guasaan materi pelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilre Jan
57.		ekolah/madrasah memiliki kalifikasi akademik minimum sarjana u diploma empat (D-IV).
	□ A.	Memiliki kualifikasi akademi berpendidikan S1 atau D-IV kependidikan atau nonkepe didikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakredita
	□ в.	Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan S1 atau D-IV Kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakri ditasi
	□ c.	Memiliki kualifikasi akademik perpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau nonk pendidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditas
	□ D.	Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan dibawah S1 atau D-IV kependidikan atau nonkependidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak terakreditasi
	□ E.	Tidak memiliki kualifikasi akacemik
58.		ekolah/madrasah berstatus sebegai guru, memiliki sertifikat , dan Surat Keputusan (SK) sebegai kepala sekolah/madrasah.
	□ A.	Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, dan SK sebagai kepala sekolah/madrasah
	□ в.	Berstatus sebagai guru, memiliki sertifikat pendidik, namun tidak memiliki SK sebagai kepata sekolah/madrasah

	□ c.	Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah
	□ D.	Berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik maupun SK sebagai kepala sekolah/madrasah
	□ E.	Tidak berstatus sebagai guru, tidak memiliki sertifikat pendidik maupun SK sebagai kepala sekolah/madrasah
59.		ekolah/madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang- ya 5 tahun  pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah.
	□ A.	Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun atau lebih
	□ в.	Memiliki pengalaman mengajar 3 — 4 tahun
	□ c.	Memiliki pengalaman mengajar 2 — 3 tahun
	□ D.	Memiliki pengalaman mengajar 1 — 2 tahun
	□ E.	Memiliki pengalaman mengajar kurang dari 1 tahun
60.		ekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang kan dengan keberhasilan mengelola siswa.
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% siswa lulus ujian akhir
	□ в.	Sebanyak 51% — 75% siswa lulus ujian akhir
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Sebanyak 26% — 50% siswa lulus ujian akhir
	□ D.	Sebanyak 1% — 25% siswa lulus ujia <b>n a</b> khir
	□ E.	Tidak ada siswa lulus ujian akhir
61.	ditunjuk belajar s	ekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang kan dengan adanya kegiatan kewirausahaan sebagai sumber siswa seperti: (1) koperasi siswa, (2) peternakan/perikanan, (3) n/perkebunan, (4) kantin sekolah, (5) unit produksi dan lain-lain.
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih jenis usaha
	□ в.	Memiliki 3 jenis usaha
	□ c.	Memiliki 2 jenis usaha
	□ D.	Memiliki 1 jenis usaha
	□ E.	Tidak memiliki usaha
62.	Kepala s	sekolah/madrasah melakukan supervisi dan monitoring.
	□ A.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak $76\% = 100\%$ dari kegiatan monitoring

		yang direncanakan dalar RKA-S/M
	□ в.	Melakukan supervisi dan nonitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 5 % — 75% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalan RKA-S/M
	□ c.	Melakukan supervisi dan nonitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 2 % – - 50% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKA-S/M
	□ D.	Melakukan supervisi dan konitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak [ ] — 25% dari kegiatan monitoring yang direncanakan dalam RKA-S/M
1	□ E.	Tidak melakukan superve dan monitoring
63.	Kepala T	enaga Administrasi memili- kualifikasi akademik minimal D-III.
	□ A.	Memiliki kualifikasi akader ik pendidikan minimal D-III
	□ в.	Memiliki kual fikasi akade⊏ik pendidikan D-II
	□ c.	Memiliki kualifikasi akadei ik pendidikan D-I
	□ D.	Memiliki kualıfikasi akader k Pendidikan Menengah
	□ E.	Tidak memiliki kualifikasi — ademik atau memiliki kualifikasi akademik di bawah Pendia kan Menengah atau tidak memiliki Kepala Tenaga Administra
64.	Kepala to	enaga administrasi pada wa u diangkat memenuhi masa kerja
	□ A.	Melebihi masa kerja minim
	□ в.	Memenuhi masa kerja min nal
	□ c.	Kurang 1 tahun dari masa   erja minimal
	□ D.	Kurang 2 tahun dari masa herja minimal
	□ E.	Kurang 3 tahun dari masa 🖟 rja minimal
65.		dministrasi memiliki kualifik i akademik pendidikan menengah g sederajat.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki orang atau lebih tenaga

		administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
	□ в.	Sekolah/Madrasah memiliki 4 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
	□ c.	Sekolah/Madrasah memiliki 3 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki 2 atau 1 orang tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
	☐ E.	Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi berkualifikasi pendidikan menengah atau sederajat
66.		administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai bidang tugasnya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki 5 orang atau lebih tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ в.	Sekolah/Madrasah memiliki 4 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ c.	Sekolah/Madrasah memiliki 3 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki 2 atau 1 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya
67.		erpustakaan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 r pendidikan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan si.
	□ A.	Memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan atau minimal (D-II) Ilmu Perpustakaan dan Informasi
	□ в.	Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV atau S1 dan mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
	□ c.	Memiliki kualifikasi akademik D-IV atau S1, tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
	□ D.	Memiliki kualifikasi akademik dibawah D-IV dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan

68.	Kepala p	erpustakaan pada waktu d ngkat memenuhi masa kerja
	□ A.	Melebihi masa kerja minimal
	□ в.	Memenuhi masa kerja mir mal
	□ c.	Kurang 1 tahun dari masa kerja minimal
	□ D.	Kurang 2 tahun dari masa kerja minimal
	□ E.	Kurang 3 tahun dari masa kerja minimal
69.		perpustakaan memiliki kese: Jaian latar belakang pendidikan Rugasnya sebagai tenaga pe Dustakaan.
	□ A.	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan menengah dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
	□ в.	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan minimal pendidikan meneni ah dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
	□ c.	Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengin dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
	□ D.	Tenaga perpustakaan meni iki latar belakang pendidikan di bawah pendidikan menengan dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perbustakaan
	□ E.	Tidak memiliki tenaga perpustakaan
70.		aboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 guru atau minimal (D-III) dari jalur laboran/teknisi.
	□ A.	Memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat kepala laboratorium
	□ в.	Memenuhi kualifikasi dan ticak memiliki sertifikat kepala laboratorium
	□ c.	Tidak memenuhi kualifikasi tetapi memiliki sertifikat kepala laboratorium
	□ D.	Tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki sertifikat kepala laboratorium
	□ E.	Tidak memiliki kepala laboratorium

71.	Kepala laboratorium pada waktu diangkat memenuhi masa kerja minimal.		
	□ A.	Melebihi masa kerja minimal	
	□ в.	Memenuhi masa kerja minimal	
	□ c.	Kurang 1 tahun dari masa kerja minimal	
	□ D.	Kurang 2 tahun dari masa kerja minimal	
	□ E.	Kurang 3 tahun dari masa kerja minimal	
72.		aboratorium minimal memiliki latar belakang pendidikan sesual sugasnya.	
	□ A.	Memiliki 3 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi	
	□ в.	Memiliki 2 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi	
	□ c.	Memiliki 1 kriteria sesuai standar minimal kualifikasi	
	□ b.	Memiliki salah satu atau lebih kriteria, tetapi tidak memenuhi standar minimal kualifikasi	
	□ E.	Tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kriteria standar minimal	
73.		aboratorium memiliki kualifikasi akademik minimal D-II yang dengan peralatan laboratorium.	
	□ A.	Memiliki kualifikasi akademik minimal D-II	
	□ в.	Memiliki kualifikasi akademik D-I	
	□ c.	Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah	
	□ D.	Memiliki kualifikasi akademik pendidikan dasar	
	□ E.	Tidak memiliki kualifikasi akademik atau tidak memiliki teknisi laboratorium	
74.	Laboran	memiliki kualifikasi akademik minimal D-I.	
	□ A.	Memiliki kualifikasi akademik minimal D-I	
	□ в.	Memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah	
	□ c.	Memiliki kualifikasi akademik SMP/MTs/Paket B	
	□ D.	Memiliki kualifikasi akademik SD/MI/Paket A	

75.	Sekolah	/Madrasah memiliki petugas layanan khusus.
	□ A.	Memiliki 4 jenis atau lebih petugas layanan khusus
	□ в.	Memiliki 3 jenis petugas la anan khusus
	□ c.	Memiliki 2 jenis petugas la anan khusus
	□ D.	Memiliki 1 jenis petugas lavanan khusus
	□ ε.	Tidak memiliki petugas lay nan khusus

Tidak memiliki kualifikasi kademik atau tidak memiliki laboran

## V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

76.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.		
	□ A.	Memiliki lahan seluas 76% — 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal	
	□ в.	Memiliki lahan seluas $51\% - 75\%$ dari ketentuan luas lahan minimal	
	□ c.	Memiliki lahan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas lahan minimal	
	□ D.	Memiliki lahan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas lahan minimal	
	□ E.	Tidak tersedia lahan	
77.	potensi l	ekolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari pahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.	
	potensi l	pahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta	
	□ A.	mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat	
	□ в.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa	
	□ c.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa	
	D	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan	
	□ E.	Tidak berada di lokasi aman	

78.	ganggua	ekolah/madrasah berada di   kasi yang nyaman, terhindar dari an pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta i sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
	□ A.	Berada di lokasi yang nyan an, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemaran udara, dan kebisingan serta memiliki sarana untuk mengkatkan kenyamanan
	□ в.	Berada di lokasi yang nyari an, terhindar dari gangguan pencemaran air, pencemari n udara, dan kebisingan
	□ c.	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air dan kebisis gan
	□ D.	Berada di lokasi yang nyar an, terhindar dari gangguan pencemaran air
	□ E.	Tidak berada di lokasi yang nyaman
79.	,	/Madrasah berada di lokasi y ng sesuai dengan peruntukannya, i status hak atas tanah dan impemanfaatan dari pemegang hak ah.
	memiliki	i status hak atas tanah dan in pemanfaatan dari pemegang hak
	☐ A.	status hak atas tanah dan n pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
	□ в.	Berada di lokasi yang sesue dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegar hak atas tanah
	□ c.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, tetapi tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
	□ D.	Tidak berada di lokasi yang esuai dengan peruntukannya, tetapi memiliki status hak a.as tanah dan memiliki ijin
		pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah

80.	Lantai sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.		
	□ A.	Memiliki lantai bangunan seluas 76% — 100% dari ketentuan luas minimal atau lebih	
	□ в.	Memiliki lantai bangunan seluas 51% — 75% dari ketentuan luas minimal	
	□ c.	Memiliki lantai bangunan seluas 26% — 50% dari ketentuan luas minimal	
	□ D.	Memiliki lantai bangunan seluas 1% — 25% dari ketentuan luas minimal	
	□ E.	Tidak memiliki gedung sendiri	
81.		n sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh engkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.	
	□ A.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir	
	□ в.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran	
	□ c.	Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran	
	□ D.	Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran	
	□ E.	Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir	
82.	Banguna kesehata	n sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan an.	
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan	
	□ в.	Memiliki 3 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan	
	□ c.	Memiliki 2 jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan	

	□ D.	Memiliki 1 jenis sanitasi s pagai persyaratan kesehatan
	□ E.	Tidak memiliki sanitasi selagai persyaratan kesehatan
83.	Banguna yang me	an sekolah/madrasah memil i ventilasi udara dan pencahayaan emadai.
	□ A.	Memiliki ventilasi udara da pencahayaan memadai
	□ в.	Memiliki ventilasi udara m nadai tetapi pencahayaan kurang memadai
	□ c.	Memiliki ventilasi udara ku ang memadal tetapi pencahayaan memadal
	□ D.	Memiliki ventilasi udara da pencahayaan kurang memadai
	□ E.	Tidak memiliki ventilasi udi ra dan pencahayaan
84.		n sekolah/mad asah memil instalasi listrik dengan daya n 1300 watt.
	□ A.	Memiliki instalasi listrik de: an daya 1300 watt atau lebih
	□ в.	Memiliki instalasi listrik den an daya 900 watt
	□ c.	Memiliki instalasi listrik den an daya 450 watt
	□ D.	Memiliki instalasi listrik der an memanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara persama
	□ E.	Tidak memiliki instalasi listi 🤫
85.		/Madrasah memiliki izin ment rikan bangunan dan izin aan bangunan sesuai dengar peruntukannya.
	□ A.	Memiliki izin mendirikan bar junan dan izin penggunaan bangunan sesuai dengan p∈ untukannya sebelum bangunan berdiri
	□ в.	Memiliki izin mendirikan bar unan, dan memiliki izin penggunaan bangunan ses∪ i dengan peruntukannya setelah bangunan berdiri
	□ c.	Memiliki izin mendirlkan dar memiliki izin periggunaan bangunan sementara

	□ D.	Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memiliki izin penggunaan bangunan
	□ E.	Tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan
86.	Sekolah/ berkala.	Madrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara
	□ A.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan
	□ в.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan
	□ c.	Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pernah melakukan pemeliharaan berat
	□ D.	Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat
	☐ E.	Tidak pernah melakukan pemeliharaan
87.		Madrasah memiliki prasarana yang lengkap.
	□ A.	Memiliki 14 atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan
		Manadillal 10 10 Jamin nunnananan canan dinanacanahan
	∪ В.	Memiliki 10 — 13 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	□ c.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	c.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan
	C.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan
88.	C. D. E.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan
88.	C. D. E.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Tidak memiliki prasarana sendiri  /Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan
88.	C. D. E.  Sekolah, sarana s	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Tidak memiliki prasarana sendiri  /Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sesuai ketentuan.  Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai
88.	C. D. E.  Sekolah, sarana s	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Tidak memiliki prasarana sendiri  /Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sesuai ketentuan.  Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
88.	C. D. E.  Sekolah, sarana s	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Tidak memiliki prasarana sendiri  /Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sesuai ketentuan.  Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan  Memiliki ruang kelas dengan 2 unsur di atas sesuai ketentuan
88.	C. D. E.  Sekolah, sarana s  A. B. C.	Memiliki 5 — 9 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Memiliki 1 — 4 jenis prasarana yang dipersyaratkan  Tidak memiliki prasarana sendiri  /Madrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sesuai ketentuan.  Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan  Memiliki ruang kelas dengan 2 unsur di atas sesuai ketentuan  Memiliki ruang kelas dengan 1 unsur di atas sesuai ketentuan  Memiliki ruang kelas dengan 3 unsur di atas tidak sesuai

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang perpustakaan dengan luas dan sarana

	sesuai ketentuan.			
	□ A.	Memiliki ruar g perpustaka in dengan luas dan sarana sesuai dengan keterituan		
	□ в.	Memiliki ruang perpustak: n dengan luas tidak sesuai ketentuan terapi memiliki arana sesuai ketentuan		
	□ c.	Memiliki ruang perpustaka in dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tida i sesuai ketentuan		
	□ D.	Memiliki ruang perpustaka n dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan		
	□ E.	Tidak memiliki ruang perpastakaan		
90.		Madrasah memiliki buku te 🕠 pelajaran yang telah ditetapkan Permendiknas.		
	□ A.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran/siswa		
	□ в.	Memiliki buku teks pelajar + dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 2 — 5 sis∵		
	□ c <sub>v</sub>	Memiliki buku teks pelajar ini dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 6 — 10 sis-a		
	□ D.	Memiliki buku teks pelajaran dengan rasio 1 buku teks/mata pelajaran untuk 11 atau lebih siswa		
	□ E.	Tidak memiliki buku teks		
91.		Madrasah memanfaatkan bulu teks pelajaran yang telah an dengan Permendiknas.		
	□ A.	Sebanyak 10 atau lebih mali pelajaran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ( stapkan dengan Permendiknas		
	□ в.	Sebanyak 7 — 9 mata pelaj ran menggunakan buku teks pelajaran yang telah diteta; an dengan Permendiknas		
	□ c.	Sebanyak 4 — 6 mata pelaj ran menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetap an dengan Permendiknas		
	□ D.	Sebanyak 1 — 3 mata pelaja an menggunakan buku teks pelajaran yang telah ditetap an dengan Permendiknas		
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran menggunakan buku teks mata pelajaran yang telah ditetapaan dengan Permendiknas		
92.		Madrasah memiliki ruang labe atorium IPA yang dapat ung minimum satu rombonga - belajar dengan luas dan sarana etentuan.		
	□ A.	Memiliki ruang laboratorium ³A, yang dapat menampung minimum satu rombongan b∈ajar, dengan luas dan sarana		

		sesuai ketentuan
	□ в.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki ruang laboratorium IPA, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	☐ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium IPA
93.		/Madrasah memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana etentuan.
	□ A.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ в.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki ruang pimpinan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki ruang pimpinan
94. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarar ketentuan.		/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai an.
	□ A.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ в.	Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	☐ E.	Tidak memiliki ruang guru
95.	,	/Madrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana etentuan.
	□ A.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai

		ketentuan
	□ в.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki ruang tata usaha dangan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki ruang tata us ha
96.		'Madrasah memiliki tempat be ibadah bagi warga sekolah/ h dengan luas dan perlengka an sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki tempat beribadah engan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan
	□ в.	Memiliki tempat beribadah cengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapa sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki tempat beribadah angan luas sesuai ketentuan tetap memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan
	□ D.	Memiliki tempat beribadah 📑 angan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan
	□ E.	Tidak memiliki tempat beribadah
97.		/Madrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana etentuan.
	□ A.	Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
	□ в.	Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c.	Memiliki ruang konseling dengan luas sesual ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesual ketentuan
	<ul><li>□ c.</li><li>□ p.</li></ul>	

98. Sekolah/Madrasah memiliki ruang Ur 3/M dengan dengan luas dan

sarana	sesuai ketentuan.
□ A	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana sesuai ketentuan
□ в	Memiliki ruang UKS/M dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
	Memiliki ruang UKS/M dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	Memiliki ruang UKS/M dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
□ E	Tidak memiliki ruang UKS/M
99. Sekola	h/Madrasah memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan
	sesuai ketentuan.
□ A	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana ' sesuai ketentuan
□ B	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan
□ c	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
□ D	Memiliki ruang organisasi kesiswaan dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan
□ E	Tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan
	ah/Madrasah memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana ii ketentuan.
	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan
	B. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan ketentuan
	C. Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	Memiliki jamban dengan jumlah, ukuran, dan sarana tidak sesuai ketentuan
	F Tidak memiliki jamban

101.	Sekolah/ ketentua	/Madrasah mem liki gudang 🕯 ngan luas dan sarana sesuai an.	
	□ A.	Memiliki gudar g dengan lua dan sarana sesuai ketentuan	
	□ в.	Memiliki gudar g dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketes tuan	
	□ c.	Memiliki gudang dengan lua $\epsilon$ sesuai ketentuan tetapi memilik sarana tidak sesuai ketentu $\epsilon$ n	
	□ D.	Memiliki gudar g dengan lu: dan sarana tidak sesuai ketentuan	
	□ E.	Tidak memiliki gudang	
102.		/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas etentuan.	
	□ A.	Memiliki ruang sirkulasi den an luas dan kualitas sesuai ketentuan	
	□ в.	Memiliki ruang sirkulasi den an luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesi ai ketentuan	
	□ c.	Memiliki ruang sirkulasi den an luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak sesu i ketentuan	
	□ D.	Memiliki ruanç sirkulasi den an luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan	
	□ E <sub>+</sub>	Tidak memilik ruang sirkulasi	
103.	Sekolah/Madrasah memiliki tempat $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		
	□ A.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan	
	□ в.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan	
	□ c.	Memiliki tempat bermain/ Perolahraga dengan luas sesuai ketentuan terapi memiliki Parana tidak sesuai ketentuan	
	□ D.	Memiliki tempat bermain/ arolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai ketencan	
	□ E.	Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga	

## VI. STANDAR PENGELOLAAN

104.	selaras dengan visi institusi di atasnya dan sesuai dengan	
	регкет	pangan serta tantangan di masyarakat.
	□ А.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami dan disosialisasikan
	□ в.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, selaras dengan visi institusi di atasnya, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
	□ c.	Merumuskan dan menetapkan visi visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami dan disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapkan visi bersama warga sekolah/madrasah, tidak selaras dengan visi institusi di atasnya mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan
	□ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan visi
105.	Sekolah/Madrasah telah merumuskan dan menetapkan misi lembaga yang sesuai dengan visi.	
	□ а.	Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/ madrasah, sesuai dengan visi dan sering disosialisasikan
	□ в.	Merumuskan dan menetapkan misi bersama warga sekolah/

	□ c.	Merumuskan dan menetapian misi bersama warga sekolah/ madrasah, sesuai dengan asi tetapi tidak disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapk n misi bersama warga sekolah/ madrasah, tidak sesuai den jan visi dan tidak disosialisasikan
	□ E.	Tidak merumuskan dan meretapkan misi
106.	Sekolah,	/Madrasah telalı merumuskan dan menetapkarı tujuan lembaga.
	□ A.	Merumuskan dan menetar in tujuan, mudah dipahami dan disosialisasikan
	□ в.	Merumuskan dan menetap an tujuan, mudah dipahami tetapi tidak pernah (lisosialisasik
	□ c.	Merumuskan dan menetap an tujuan, sulit dipahami dan disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapi an tujuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan
	☐ E.	Tidak merumuskan dan meretapkan tujuan
107.		/Madrasah memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja nenengah dan disosialisasikan kepada warga sekolah/ ah.
	□ A.	Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan sudah disca alisasikan
	□ в.	Memiliki rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah dan salah saturuka sudah disosialisasikan
	□ c.	Memiliki rencana kerja tan nan dan rencana kerja jangka menengah tetapi belum di psialisasikan
	□ D.	Memiliki rencana kerja tari nan atau rencana kerja jangka menengah baik sudah mai bun belum disosialisasikan
	□ E.	Tidak memiliki rencana kera tahunan dan rencana kerja jangka menengah
108.		/Madrasah me niliki pedoman yang mengatur berbagai aspek aan secara tertulis yang muliah dipahami oleh pihak-pihak
	☐ A.	Memiliki 7 atau lebih dokunen aspek pengelolaan secara tertulis
		Marrilla Catara Catalana a sanah manadalan asana bashalia
	□ B.	Memiliki 5 atau 6 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis

	□ D.	Memiliki 1 atau 2 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
	□ E.	Tidak memiliki dokumen aspek pengelolaan secara tertulis
109.	Sekolah tugas.	n/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian
	□ A.	Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas
	□ в.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas
	□ c.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas
	□ D.	Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas
	· E.	Tidak memiliki struktur organisasi
110.	Sekolah, tahunan	/Madrasah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
110.		
110.	tahunan	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
110.	□ A.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
110.	□ A. □ B.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
110.	□ A. □ B. □ C.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
110.	B. C.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
110.	Lahunan A. B. C. D. E.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan
	Lahunan A. B. C. D. E.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan
	tahunan  A. B. C. D. E.	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan
	Lahunan A. B. C. D. E. Sekolah,	Sebanyak 76% — 100% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 51% — 75% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 26% — 50% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Sebanyak 1% — 25% kegiatan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan  Tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan  //Madrasah melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan.  Memiliki 4 atau lebih jenis kegiatan kesiswaan

	□ E.	Tidak memiliki jenis kegiata kesiswaan
112.		/Madrasah melaksanakan kegatan pengembangan kurikulum nbelajaran.
	□ A.	Melaksanakan 4 atau lebih 🗀 giatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ в.	Melaksanakan 3 kegiatan p∈ gembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ c.	Melaksanakan 2 kegiatan p∈ gembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ D.	Melaksanakan 1 kegiatan p∈ gembangan kurikulum dan pembelajaran
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran
113.		/Madrasah melaksanakan pro am pengelolaan pendayagunaan dan tenaga kependidikan.
113.		
113.	pendidik	dan tenaga kependidikan.  Melaksanakan 4 atau lebih   ogram pengelolaan
113.	pendidik	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan Melaksanakan 3 program per gelolaan pendayagunaan
113.	pendidik  A.  B.	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan
113.	pendidik  A.  B.  C.	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pendidikan gelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pendelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pendelolaan pendayagunaan
	pendidik	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
113.	pendidik	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
	pendidik	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
	pendidik  A.  B.  C.  D.  E.	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
	pendidik  A.  B.  C.  D.  E.  Sekolah,	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Mengelola 4 atau lebih program sarana dan prasarana
	pendidik	Melaksanakan 4 atau lebih pogram pengelolaan pendayagunaan pendidik da tenaga kependidikan  Melaksanakan 3 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 2 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Melaksanakan 1 program pergelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Tidak melaksanakan program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan  Madrasah mengelola sarana dan prasarana pembelajaran.  Mengelola 4 atau lebih program sarana dan prasarana  Mengelola 3 program sarana dan prasarana

115.	Sekolah,	/Madrasah mengelola pembiayaan pendidikan.
	□ A.	Memiliki 4 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ в.	Memiliki 3 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ c.	Memiliki 2 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ D.	Memiliki 1 program pengelolaan pembiayaan pendidikan
	□ E.	Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan
116.		/Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan njaran yang kondusif.
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ в.	Memiliki 3 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ c.	Memiliki 2 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ D.	Memiliki 1 kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
	□ E.	Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif
117.		/Madrasah melibatkan masyarakat dan membangun kemitraan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
	□ A.	Memiliki 4 atau lebih dokumen kemitraan
	□ в.	Memiliki 3 dokumen kemitraan
	□ c.	Memiliki 2 dokumen kemitraan
	□ D.	Memiliki 1 dokumen kemitraan
	□ E.	Tidak memiliki dokumen kemitraan
118.		/Madrasah melaksanakan program pengawasan yang disosiali- kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ А.	Melaksanakan 4 atau 5 program pengawasan
	□ в.	Melaksanakan 3 program pengawasan
	□ c.	Melaksanakan 2 program pengawasan
	□ D.	Melaksanakan 1 program pengawasan
	□ E.	Tidak melaksanakan program pengawasan

119.		/Madrasah melaksanakan keg atan evaluasi program kerja /madrasah.
	□ A.	Melaksanakan evaluasi diri - :kurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun
	□ в.	Melaksanakan evaluasi diri 📑 kali dalam 2 tahun
	□ c.	Melaksanakan evaluasi diri 🗉 kali dalam 3 tahun
	□ D.	Melaksanakan evaluasi diri 🗉 kali dalam 4 tahun
	□ E.	Tidak melaksanakan evaluas diri
120.	Sekolah, kependi	/Madrasah melaksanakan ev Jasi kinerja pendidik dan tenaga dikan.
	□ A.	Melaksanakan 4 program $\varepsilon^{\omega}$ luasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ в.	Melaksanakan 3 program ev luasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ c.	Melaksanakan 2 program e luasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ D.	Melaksanakan 1 program e luasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
	□ E.	Tidak melakukan program e aluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
121.	Sekolah,	/Madrasah mempersiapkan up sur-unsur pelaksanaan akreditasi.
	□ A.	Mempersiapkan 4 unsur pelaksanaan akreditasi
	□ в.	Mempersiapkan 3 unsur pela (sanaan akreditasi
	□ c.	Mempersiapkan 2 unsur peli (sanaan akreditasi
	□ D.	Mempersiapkan 1 unsur pelli (sanaan akreditasi
	□ E.	Tidak mempersiapkan unsur pelaksanaan akreditasi
122.		/Madrasah memiliki struktur ⊭ pemimpinan sesuai standar dan tenaga kependidikan.
	□ A <sub>+</sub>	Memiliki kepala sekolah/ma rasah dan wakil kepala sekolah /madrasah yang dipilih mela ui rapat dewan guru dan proses penetapannya dilaporkan ke nstitusi di atasnya
	□ в.	Memiliki kepala sekolah/ma rasah dan wakil kepala sekolah /madrasah yang dipilih melalui rapat dewan guru tetapi proses penetapannya tidak laporkan ke institusi di atasnya

123.		/Madrasah memiliki sistem informasi manajemen untuk ung administrasi pendidikan.
	□ A.	Memiliki sistem informasi, fasilitas, dan petugas khusus
	□ в.	Memiliki sistem informasi, fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus
	□ c.	Memiliki sistem informasi dan petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas
	□ D.	Memiliki sistem informasi tetapi tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus
	□ E.	Tidak memiliki sistem informasi

124.	Sekolah/Madrasah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dengan melibatkan <i>stakeholders</i> .
	Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 4 atau lebih uns

- stakeholders sekolah/madrasah Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 3 unsur stakeholders sekolah/madrasah Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 2 unsur stakeholders sekolah/madrasah
  - Menyusun RKA-S/M dengan melibatkan 1 unsur stakeholders □ p. sekolah/madrasah
- Tidak menyusun RKA-S/M □ E.

125. Sekolah/Madrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyeluruh.

	□ A.	Memiliki catatan tahunan birupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menjaluruh selama 3 tahun terakhir
	□ в.	Memiliki catatan tahunan birupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara menyaluruh selama 2 tahun terakhir
	□ c.	Memiliki catatan tahunan birupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara mer siluruh selama 1 tahun terakhir
	□ D.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen investasi sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh selarna 1 tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki catatan tah an berupa dokumen investasi sarana dan prasarana
126.		Madrasah menibelanjakan bi iya untuk pengernbangan pendidik iga kependidikan berdasark RKA-S/M.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebah /ak 76% — 100% dari anggaran pengembangan pendidik da tenaga kependidikan dalam RKAS/M
	□ в.	Membelanjakan biaya sebar /ak 51% — 75% dari anggaran pengembangan pendidik da tenaga kependidikan dalam RKAS/M
	□ c.	Membelanjakan biaya seban /ak 26% — 50% dari anggaran pengembangan pendidik da tenaga kependidikan dalam RKAS/M
	□ D.	Membelanjakan biaya sebar /ak 1% — 25% cari anggaran pengembangan pendidik da tenaga kependidikan dalam RKAS/M
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya Jntuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
127.		Madrasah memiliki modal ke a sebesar yang tertuang dalam I membiayai seluruh kebutuh n pendidikan.
	□ A.	Sekolah/Madrasah dapat m $^{\circ}$ ealisasikan 91% — 100% modal kerja
	□ в.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 81% — 90% modal kerja
	□ c.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan 71% — 80% modal kerja
	□ D.	Sekolah/Madrasah dapat merealisasikan kurang dari 71% modal kerja
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak dapat merealisasikan modal kerja

128.	Sekolah, lain pen	/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan didik.
	□ A.	Membelanjakan dana sebanyak 91% — 100% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
	□ в.	Membelanjakan dana sebanyak 81% — 90% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
	□ c.	Membelanjakan dana sebanyak 71% — 80% dari anggaran gaji serta tunjangan pendidik
	□ D.	Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan pendidik
	□ E.	Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan pendidik
129.		/Madrasah membayar gaji, insentif, transpor, dan tunjangan aga kependidikan.
	□ A.	Membelanjakan dana sebanyak 91% — 100% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
	□ в.	Membelanjakan dana sebanyak 81% — 90% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
	□ c.	Membelanjakan dana sebanyak 71% — 80% dari anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
	□ D.	Membelanjakan dana sebanyak kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan tenaga kependidikan
	□ E.	Tidak membelanjakan dana untuk gaji dan tunjangan tenaga kependidikan
130.		/Madrasah membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksana- itan pembelajaran.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir

	□ E.	pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir
131.	Sekolah,	/Madrasah membelanjakan ana untuk kegiatan kesiswaan.
	□ А.	Membelanjakan dana sebayak 76% — 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selana satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan dana seba yak 51% — 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan dana seba yak 26% — 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selam satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan dana seb⊫ yak 1% — 25% dari anggaran kegiatan kesi;waan selar⊏ satu tahun terakhir
	☐ E.	Tidak membelanjakan dari dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir
132.		/Madrasah membelanjakan aya pengadaan alat tulis untuk n pembelajaran
	□ A.	Membelanjak in biaya seba yak 76% — 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selami satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya sebaryak 51% — 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selan ≡satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebai yak 26% — 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selania satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya seba yak 1% — 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selana satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biay pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir
133.		/Madrasah membelanjakan baya pengadaan bahan habis pakai egiatan pembelajaran.
	□ A.	Membelanjakan biaya seba yak 76% — 100% dari anggaran pengadaan bahan habis palai selama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya seba yak 51% — 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya seba yak 26% — 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pa ii selama satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya seba 7ak 1% — 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pak il selama satu tahun terakhir

	□ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir
134.		/Madrasah membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai egiatan pembelajaran.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — $100\%$ dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir
135.	Sekolah	/Madrasah mengalokasikan biaya kegiatan rapat.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% — 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir
136.	Sekolah	/Madrasah membelanjakan biaya transpor dan perjalanan dinas
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak $76\%-100\%$ dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% — 75% dari anggaran pengadaan transpor dan perjalanan dinas selama satu tahun terakhir
		Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% dari anggaran

	□ D.	pengadaan transpor dan r rjalanan dinas selama satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan bia pengadaan transpor dan perjalanan di ias selama sau tahun terakhir
137.	Sekolah ulangar	n/Madrasah mer∩belanjakan ⊨aya penggandaan soal-soal n/ujian.
	□ A.	Membelanjakan biaya sebayak 76% — 100% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya seba yak 51% — 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulan jan/ujian selama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya seba yak 26% — 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ular aan/ujian selama satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ular jan/ujian selama satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu hun terakhir
138.	Sekolah	/Madrasah mempelanjakan bi ya pengadaan daya dan jasa.
	☐ A.	Membelanjakan biaya seba $\circ$ ak $76\%-100\%$ dari anggaran pengadaan daya dan jasa s $\circ$ ama satu tahun terakhir
	□ в.	Membelanjakan biaya seban ak 51% — 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa se ama satu tahun terakhir
	□ c.	Membelanjakan biaya sebari ak 26% — 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa sa ama satu tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya seban ak 1% — 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa sa ma satu tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya engadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir
139.		/Madrasah membelanjakan an garan untuk mendukung n operasional tidak langsung.
139.		

	□ c.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% — 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
	□ D.	Membelanjakan biaya sebanyak 1% — 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
140.	sistemat	gan pendidikan atau dana dari masyarakat dikelola secara tis, transparan dan dilaporkan kepada komite /madrasah.
	□ A.	Dikelola secara sistematis, transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
	□ в.	Dikelola secara sistematis, transparan tetapi tidak dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
	□ c.	Dikelola secara sistematis tetapi tidak transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
	□ D.	Dikelola secara sistematis tetapi tidak transparan dan tidak dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah atau orangtua siswa
	□ E.	Tidak dikelola secara sistematis dan tidak transparan
141.		an uang sekolah/madrasah mempertimbangkan kemampuan
		i orangtua siswa.
l	□ A.	sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah
		Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar
	□ A.	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar
	<ul><li>□ A.</li><li>□ B.</li></ul>	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 71% — 80% orangtua siswa mampu membayar
	<ul><li>□ A.</li><li>□ B.</li><li>□ C.</li></ul>	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 71% — 80% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak kurang dari 71% orangtua siswa mampu membayar
142.	<ul><li>□ A.</li><li>□ B.</li><li>□ C.</li><li>□ D.</li><li>□ E.</li></ul>	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 71% — 80% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak kurang dari 71% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Tidak ada orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah //Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa
142.	<ul><li>□ A.</li><li>□ B.</li><li>□ C.</li><li>□ D.</li><li>□ E.</li></ul>	Sebanyak 91% — 100% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 81% — 90% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak 71% — 80% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Sebanyak kurang dari 71% orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah Tidak ada orangtua siswa mampu membayar uang sekolah/madrasah //Madrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa

	□ c.	Melaksanakan subsidi silar untuk membantu 70% — 79% siswa kurang mampu
	□ b.	Melaksanakan subsidi silar untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu
	□ E.	Tidak melaksanakan subsic silang
143.		/Madrasah melakukan punga an biaya personal lain di samping kolah/madrasah.
	□ A.	Tidak melakukan pungutar piaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ в.	Melakukan 1 jenis pungutar biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ c.	Melakukan 2 jenis punguta biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ D.	Melakukan 3 jenis pungutar biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah
	□ E.	Melakukan 4 atau lebih jeri pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/mad isah
144.	dari mas melibatk melibatk tenaga k	bilan keputusan dalam penetanan besarnya dana yang digali syarakat sebagai biaya operas pala dilakukan dengan kan berbagai pihak terkait (kerala sekolah/madrasah kan komite sekolah/madrasah, perwakilan guru, perwakilan kependidikan, perwakilan siswa dan penyelenggara kan/yayasan untuk swasta).
	□ A.	Kepala sekolah/madrasah melibatkan komite sekolah/ madrasah, perwakilan guru, erwakilan tenaga kependidikan, siswa, dan penyelenggara pe didikan/yayasan untuk swasta
	□ в.	Kepala sekolah/madrasah m∈ ibatkan 3 di antara unsur di atas
	□ c.	Kepala sekolah/madrasah melibatkan 2 di antara unsur di atas
	□ D.	Kepala sekolah/madrasah melibatkan 1 di antara unsur di atas
	□ E.	Tidak melibatkan siapapun
145.		aan dana dari masyarakat seba ai biaya personal dilakukan ansparan, dan akuntabel yang iitunjukkan oleh adanya RKA-
	□ A.	Sebanyak 91% — 100% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M
	□ в.	Sebanyak 81% — 90% dana dari masyarakat tercantum

		dalam RKA-S/M
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Sebanyak 71% — 80% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M
	□ D.	Sebanyak kurang dari 71% dana dari masyarakat tercantum dalam RKA-S/M
	☐ E.	Dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKA-S/M
146.		/Madrasah memiliki pedoman pengelolaan keuangan sebagai lam penyusunan RKA-S/M.
	□ A.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 4 tahun terakhir
	□ в.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 3 tahun terakhir
	□ c.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 2 tahun terakhir
	□ D.	Memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 1 tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan
147.	Sekolah	/Madrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
	□ A.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 tahun terakhir
	□ в.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 tahun terakhir
	□ c.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 tahun terakhir
	□ D.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 tahun terakhir
	□ E.	Tidak memiliki pembukuan biaya operasional

148. Sekolah/Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan.

□ A.	Membuat lapcran pertanggi ngjawaban pengelolaan keuangan dan menyamgaikannya keji da pemerintah atau yayasan selama 4 tahun terakhir
□ в.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya ke. da pemerintah atau yayasan selama 3 tahun terakhir
□ c.	Membuat laporan pertangg ngjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kej da pemerintah atau yayasan selama 2 tahun terakhir
□ D.	Membuat laporan pertanggi ngjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya keii da pemerintah atau yayasan selama 1 tahun terakhir
□ E.	Tidak membuat laporan per anggungjawaban pengelolaan keuangan

VIII. STANDAR PENILAIAN

149.	Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus mata pelajaran kepada siswa pada awal semester.			
	□ A.	Sebanyak 76% — 100% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa		
	□ в.	Sebanyak $51\% - 75\%$ guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa		
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Sebanyak 26% — 50% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa		
	□ D.	Sebanyak $1\%-25\%$ guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa		
	☐ E.	Tidak ada guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa		
150.	Teknik p	enilaian yang ada pada silabus telah sesuai dengan indikator ian KD.		
	□ A.	Sebanyak 96% — 100% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		
	□ в.	Sebanyak 91% — 95% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD $$		
	□ c.	Sebanyak 86% — 90% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		
	□ D.	Sebanyak $81\% - 85\%$ silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		
	□ E.	Kurang dari 81% silabus memuat teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD		
151.		engembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan dan teknik penilaian.		
	□ A.	Sebanyak $86\%-100\%$ guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian		
	□ в.	Sebanyak $71\%-85\%$ guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian		
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian		
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian		
	□ E.	Kurang dari 41% guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian		

152.	Guru me	enggunakan berbagai teknik 🦂	enilaian.	
	□ а.	Sebanyak 86% — 100% g menggunakan 4 atau lebih	u melakukan penilaian dengan eknik penilaian	
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% gur menggunakan 4 atau lebih	melakukan penilaian dengan eknik penilaian	
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% gur menggunakan 4 atau lebih	melakukan penilaian dengan eknik penilaian	
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% gur menggunakan 4 atau lebih	melakukan penilaian dengan eknik penilaian	
	□ E.	Kurang dari 41% guru mela- menggunakan 4 atau lebih		
153.		engolah/menganalisis hasil pe ajar dan kesulitan belajar sisy	laian untuk mengetahui kemajuan 1.	
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% gu penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa	ı mengolah/menganalisis hasil emajuan hasil belajar dan	
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% guru penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa	mengolah/menganalisis hasil emajuan hasil belajar dan	
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru penilaian untuk mengetahui k kesulitan belajar siswa	mengolah/menganalisis hasil emajuan hasil belajar dan	
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru penilaian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa	nengolah/menganalisis hasil emajuan hasil belajar dan	
	□ E.		ah/menganalisis hasil penilaian asil belajar dan kesulitan belajar	
154.		engembalikan hasil pemeriksa komentar yang mendidik.	n pekerjaan siswa disertai	
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% gur pemeriksaan pekerjaan siswa mendidik	u mengembalikan hasil a disertai balikan/komentar yang	
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% guru pemeriksaan pekerjaan siswa mendidik	nengembalikan hasil a disertai balikan/komentar yang	
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru pemeriksaan pekerjaan sisw mendidik	nengembalikan hasil a disertai balikan/komentar yang	
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru pemeriksaan pekerjaan siswa mendidik	mengembalikan hasil a disertai balikan/komentar yang	

	□ E.	Kurang dari 41% guru mengembalikan hasil pemeriksaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik				
155.	Guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.					
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran				
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran				
	<ul><li>□ c.</li></ul>	Sebanyak 56% — 70% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran				
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran				
	□ E.	Kurang dari 41% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran				
156.	semeste	laporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir r kepada kepala sekolah/madrasah dalam bentuk laporan belajar siswa.				
	□ A.	Sebanyak 100% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah				
	□ в.	Sebanyak 95% — 99% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah				
	□ c.	Sebanyak 90% — 94% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah				
	□ D.	Sebanyak 85% — 89% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah				
	□ E.	Kurang dari 85% guru melaporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasah				
157.		laporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan ebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester.				
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama				
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama				
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama				
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru pendidikan agama				
	☐ E.	Kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa				

158.	pendidik	laporkan hasil penilaian keprit idian siswa kepada guru an kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan iir semester.
	□ A.	Sebanyak 86% — 100% gur melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada gu u pendidikan kewarganegaraan
	□ в.	Sebanyak 71% — 85% guru nelaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada g∪ pendidikan kewarganegaraan
	□ c.	Sebanyak 56% — 70% guru nelaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada gur pendidikan kewarganegaraan
	□ D.	Sebanyak 41% — 55% guru Pelaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada gur Pendidikan kewarganegaraan
	□ E.	Kurang dari 41% guru melaperkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan
159.		/Madrasah mengkoordinasikan angan tengah semester, akhir semester dan ulangan keralikan kelas.
	□ A.	Sekolah/Madrasah mengkoord nasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas
	□ в.	Sekolah/Madrasah mengkoord nasikan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas
	□ c.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan kenaikan kelas
	□ D.	Sekolah/Madrasah hanya mençikoordinasikan ulangan kenaikan kelas
	□ E.	Tidak pernah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas
160.	Sekolah,	/Madrasah menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat.
	□ A.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah, wali kelas, dan dewan guru
	□ в.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah, wali kelas, dan guru mata pelajaran
	□ c.	Menentukan kriteria kenaikan kelas melalui rapat kepala sekolah/madrasah dan wali kelas

	<ul> <li>D. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh wali kelas tanpa melalui rapat</li> </ul>					
	☐ E.	Tidak menentukan kriteria kenaikan kelas				
161.	agama d	/Madrasah menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran lan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, endidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.				
	☐ A.	Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru				
	□ в.	Menentukan nilai akhir melalui rapat dewan guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru				
	□ c.	Menentukan nilai akhir tanpa melalui rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru				
	□ D.	Menentukan nilai akhir bersama wali kelas saja				
	□ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah				
162.		/Madrasah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester semua orangtua/wali siswa.				
	□ A.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan				
	□ в.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester dengan penjelasan kepala sekolah/madrasah dan wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan				
	□ c.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan				
	□ D.	Laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala sekolah/madrasah tetapi langsung dari wali kelas kepada orangtua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan				
	□ E.	Tidak melaporkan hasil penilaian kepada orangtua/wali siswa				
163.		/Madrasah melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kepada endidikan/Departemen Agama Kabupaten/Kota.				
	☐ A.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa kurang dari 20 hari setelah akhir semester				
	□ в.	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa antara 21 40 hari setelah akhir semester				

	□ c.	Melaporkan pencapaian has belajar siswa antara $41-60$ hari setelah akhir semester
	□ D.	Melaporkan pencapaian has $$ belajar siswa antara 61 — 80 hari setelah akhir semester
	□ E.	Tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari
164.		/Madrasah menentukan keluli san siswa melalui rapat dewan suai kriteria kelulusan.
	□ A.	Menentukan kelulusan siswa melalui rapat dewan guru
	□ в.	Menentukan kelulusan siswa melalui rapat perwakilan guru- guru mata pelajaran
	□ c.	Menentukan kelulusan siswa nelalui rapat wali kelas
	□ D.	Menentukan kelulusan siswa nelalui rapat guru BK
	□ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah
165.		/Madrasah menyerahkan Sura: Keterangan Hasil Ujian Nasional ) setiap siswa yang mengikuti lijian Nasional (UN).
	□ A.	Menyerahkan SKHUN kurang ari 7 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ в.	Menyerahkan SKHUN antara $8-14$ hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ c.	Menyerahkan SKHUN antara $15-21\mathrm{hari}$ setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ D.	Menyerahkan SKHUN antara 22 — 35 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
	□ E.	Menyerahkan SKHUN lebih dari 35 hari setelah diterima dari Dinas Pendidikan/Kandepag
166.		/Madrasah menyerahkan ijazah kepada setiap siswa yang lus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
	□ A.	Menyerahkan ijazah kepada siswa sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan
	□ в.	Menyerahkan ijazah kepada sis⊯a setelah 7 hari dari ketentuan waktu yang ditetap∢an
	□ c.	Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 8 — 14 hari dari

		ketentuan waktu yang ditetapkan
	□ D.	Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 15 — 21 hari dari ketentuan waktu yang ditetapkan
	□ E.	Menyerahkan ijazah kepada siswa setelah 21 hari atau lebih dari ketentuan waktu yang ditetapkan
167.	Nasional Kesetara	/Madrasah menggunakan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar (UASBN) SD/MI atau hasil Ujian Nasional Pendidikan Ian (UNPK) program Paket A sebagai bahan pertimbangan Baan siswa baru.
	□ A.	Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
	□ в.	Menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
	□ c.	Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI dan tes masuk secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
	□ D.	Hanya menggunakan hasil UASBN SD/MI secara transparan sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
	□ E.	Tidak menggunakan hasil UASBN SD/MI atau hasil UNPK program Paket A sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
168.		Madrasah memiliki prestasi hasil UN yang ditunjukkan dengan se tingkat kelulusan tahun terakhir.
	□ а.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 91% — 100%
	□ в.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 81% — 90%
	□ c.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 71% — 80%
	□ D.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan 61% — 70%
	□ E.	Memiliki prestasi hasil UN dengan tingkat kelulusan kurang

169.		/Madrasah memiliki prestasi y ng ditunjukkan dengan rata-rata I tahun terakhir.
	□ A.	Semua mata pelajaran yang $\ensuremath{\mathbb{Q}}$ ujikan lebih tinggi dari rata-rata nasional
	□ в.	Tiga mata pelajaran yang diu kan lebih tinggi dari rata-rata nasional
	□ c.	Dua mata pelajaran yang diu: kan lebih tinggi dari rata-rata nasional
	□ D.	Satu mata pelajaran yang diu kan lebih tinggi dari rata-rata nasional
	□ E.	Tidak ada mata pelajaran yan diujikan lebih tinggi dari rata- rata nasional

MENTERI PENDIDIKAN MASIONAL,

TID.

**BAMBANG SUDIBYO** 

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP. 131661823

SALINAN

# MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

#### NOMOR 52 TAHUN 2008

## **TENTANG**

# KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

#### Menimbang :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), telah dirumuskan criteria dan perangkat akreditasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetaokan oleh Menteri:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perangkat Akreditasi Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

## Mengingat:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008:
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/206 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal:

## MEMUTUSKA

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEN DIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA PERANGKAT AI :EDITASI SEKOLAH ATAS/MADRASAH ALIYAH.

## Pasal 1

- (1). Kriteria dan perangkat akredita il sekolah menerili ah atas/madrasah aliyah meliputi Instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumer: reditasi, Instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi serta teknik pen oran dan pemeringkatan hasil akreditasi.
- (2). Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimann limaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan sekolah menengah atas/mac asah aliyah yang diakreditasi.
- (3). Kriteria dan perangkat akreditusi sekolah meringah atas/madrasah aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampira. II, II dan IV Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada langgal ditetapk

etapi an di Jakarta da ta iggal 18 September 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TIO

II JBANG SUDIBYO

# PERATURAN METERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 52 TAHUN 2008 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2008

#### INSTRUMEN AKREDITASI

# SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

# PETUNJUK UMUM

- 1. Instrumen Akreditasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Akreditasi, oleh karena itu sebelum memilih jawaban pada butir-butir pemyataan instrumen Saudara harus mempelajari/memahami Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
- Instrumen Akreditasi ini terdiri dari:
  - Pernyataan kepala sekolah/madrasah.
  - b. Data identitas sekolah/madrasah.
  - Butir pernyataan instrumen, meliputi 8 (delapan) komponen sesuai dengan standar nasional pendidikan:
    - 1) Komponen standar isi, nomor 1 s.d 15.
    - 21 Komponen standar proses, nomor 16 s.d 25.
    - 3) Komponen standar kompetensi lulusan, nomor 26 s.d 50.
    - 4) Komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, nomor 51 s.d 70.
    - 5) Komponen standar sarana dan prasarana, nomor 71 s.d 100.
    - 6) Komponen standar pengelolaan, nomor 101 s.d 120.
    - 7) Komponen standar pembiayaan, nomor 121 s.d 145.
    - 81 Komponen standar penilaian, nomor 146 s.d 165.
- Semua butir pernyataan pada Instrumen Akreditasi merupakan pernyataan tertutup yang terdiri dari 5 (lima) opsi jawaban yaitu "A", "B", "C", "D", dan "E" yang harus dipilih sesuai dengan bukti seperti dipersyaratkan dalam Juknis Pengisian Instrumen Akreditasi.
- Berilah tanda ceklis (✓) pada kotak jawaban yang telah disediakan.
- Jawablah semua butir pernyataan secara obyektif dan jujur sesuai dengan keadaan 5. sebenarnya yang ada di sekolah/madrasah Saudara.

# PERNYATAAN KIEPALA SE (OLAH/MADRASAH

Yang bertanda tangan di bav	vah ini,				
Nama	:			_	
Nama sekolah/madrasah	:				
Alamat sekolah/madrasah	:				
	-				
Dengan ini menyatakan bahv	wa:				
Data yang diberikan da sesungguhnya.	alam dokumen ir	ni adalah berili d	dan sesuai denga	an keadaan	
Saya bertanggung jaw ini.	ab atas sem 🗚 ji	awaban dan 📗 r	nyataan yang dil	oerikan dalam do	kumen
Demikian pemyataan ini saya	a buat dengan s	esungguhnya :	an penuh rasa ta	nggung jawab.	
Pernyataan ini dibuat pada ta	anogal	. 20			
Di					
Kepala sekolah/madrasah,					
Materai					
Rp.6000,-					
(	)				
Catatan:					
1. Tanda tangan harus men	genai materai.				

2. Bubuhkan stempel sekolah/madrasah Saudara.

# DATA IDENTITAS SEKOLAH/MADRASAH

1.	Nama Sekolah/Madrasah :		
2	Nomor Statistik Sekolah/Madrasah (NSS/M)		
3.	Alamat Sekolah/Madrasah	:	
	Kecamatan	-	
	Kab/Kota (coret salah satu)	:	
	Provinsi	:	
	Kode Pos		
	Telepon dan Faksimil	:	
	E-mail	5	
5.	Status Sekolah/Madrasah	:   Negeri	☐ Swasta
6.	Nama Yayasan		
7.	No Akte Pendirian/Kelembagaan:		
8.	Tahun Berdiri Sekolah/Madrasah 🕆		
9.	Status Akreditasi/Tahun		
10.	Visi Sekolah/Madrasah		
11.	Misi Sekolah/Madrasah		

# I. STANDAR ISI

1.	Sekolah/M	nadrasah melaksanakan Kurikulum Tira kat Satuan Pendidikan (KTSP).
	□ A.	Melaksanakan kuril ulum berdasark。 9 (sembilan) komponen muatan KTSP.
	□ B.	Melaksanakan kuńkulum berdasark 8 (delapan) komponen muatan KTSP.
	□ C.	Melaksanakan kurik ılum berdas <b>ark</b> a- 7 (tujuh) komponen muatan KTSP.
	□ D.	Melaksanakan kurikulum berdasark n 6 (enam) atau kurang komponen muatan KTSP.
	□ E.	Tidak melaksanakan KTSP.
2.		nadrasah mengembangkan kurikulum rsama-sama pihak terkait berpedoman duan penyusunan kurikulum yang dibuat eh BSNP.
	□ A.	Bersama seluruh guru mata ∍lajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggar⊪ ∋mbaga pendidikan.
	□ B.	Bersama representasi guru mata pelajaran, konselor, dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara ∌mbaga pendidikan.
	□ C.	Bersama representas guru mata peli aran dan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara leinbaga pendidik.
	□ D.	Bersama representasi guru mata lajaran tanpa melipatkan komite sekolah/madrasah atau penyelenggara li mbaga pendidikan.
	□ E.	Tidak mengembangkan kunikulum.
3,	Sekolah/M	ladrasah mengembangkan kurikulum mela — mekanisme penyusunan KTSP.
	□ A.	Mengembangkan kurikulum melalui mekanisme yang mencakup 7 (tujuh) tahap penyusunan.
	□ В.	Mengembangkan kurikulum melalui mek sme yang mencakup 5 (lima) atau 6 (enam) tahap penyusunan.
	□ C.	Mengembangkan kurikulum melalui meka isme yang mencakup 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap penyusunan.
	□ D.	Mengembangkan kurikult m melalui meka. Ilime yang mencakup 1 (satu) atau 2 (dua) tahap penyusunan.
	□ E.	Tidak mengembangkan kurikulum.

4_	pembelaja	adrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan ran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta unaan kondisi sosial dan budaya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya.
	□ B.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran, pengayaan layanan pembelajaran, dan pendayagunaan kondisi alam.
	□ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran dan pengayaan layanan pembelajaran.
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan layanan pembelajaran.
	□ E.	Sekolah/Madrasah melaksanakan kurikulum tidak menggunakan prinsip tersebut.
5.	5. Sekolah/Madrasah memiliki kurikulum muatan lokal yang penyusunannya melibatkan beberapa pihak.	
	□ A.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi terkait di daerah.
	□ B.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru, komite sekolah/madrasah atau penyelenggara lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan.
	□ C.	Penyusunan kurikulum muatan lokal melibatkan guru dan komite

40

Penyusunan kurikulum muatan lokal hanya melibatkan guru.

Tidak menyusun kurikulum muatan lokal.

□ D.

□ E.

6.		adrasah memiliki program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling an ekstrakurikuler.
	□ A.	Di samping kegiatan konseling, m aksanakan 4 (empat) jenis atau lebih program ekstrakurikuler.
	□ B.	Di samping kegiatan konseling, elaksanakan 3 (tiga) jenis program ekstrakurikuler.
	□ C.	Di samping kegiatan konseling. əlaksanakan 2 (dua) jenis program ekstrakurikuler.
	□ D.	Di samping kegiatan konseling, relaksanakan 1 (satu) jenis program ekstrakurikuler.
	□ E.	Tidak melaksanakan kegiatan konseli dan kegiatan ekstrakulikuler.

7.		Madrasah memiliki beberapa mata pelajaran yang dilengkapi dokumen standar si (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk setiap mata pelajaran.
	□ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajara atau lebih memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
	□ B.	Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
	□ C.	Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
	□ D.	Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.
	□ <b>E</b> .	Tidak ada satu pun mata pelajaran menaliki dokumen standar kompetensi dan kompetensi dasar.

- 8. Sekolah/Madrasah menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam □ A. pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam □ B. pembelajaran per minggu minimal 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. Satu jam pembelajaran tatap muka selama 45 menit, jumlah jam  $\Box$  C. pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dari jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. Satu iam pembelajaran tatap muka kurang dari 45 menit, jumlah jam □ D. pembelajaran per minggu kurang dari 38 jam, dan jumlah minggu efektif per tahun kurang dari 34 minggu. □ E. Tidak menerapkan ketentuan beban belajar yang ditetapkan Depdiknas.
- 9. Guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur kepada siswa. Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur □ A. kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur □ B. kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur □ C. kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran. Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur □ D. kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelaiaran. Tidak ada seorang pun guru pelajaran memberikan penugasan terstruktur □ E. kepada siswa maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.

	Guru pel tertentu.	ajaran merancang tigas mandiri ti terstruktur untuk mencapai kompetensi
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru p∈ jaran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk n encapai kompe isi tertentu maksima 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru pel aran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompet si tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelaaran.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru pel iran merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mancapai kompel si tertentu maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pel⊲jaran.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran arancang tugas manciri tidak terstruktur untuk mencapai konpetensi terten maksimal 60% dari alokasi waktu tiap mata pelajaran.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru pelajar merancang tugas mandiri tidak terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu
11.		VTCD talah di ahlar alah 2 - Dadidian yang basarahyan alah
	□ A.	angan KTSP telah di ahkan oleh D s Pendidikan yang bersangkutan atau pag/Kandepag.  Sebanyak 13 (tiga belas) silabu mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-aya.
Ī		pag/Kandepag.  Sebanyak 13 (tiga belas) silabu mata pelajaran alau lebih telah
	□ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) silabur mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSF-aya.  Sebanyak 9 (sembilan) sampai deng 12 (dua belas) silabus mata pelajaran
	□ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) silabur mata pelajaran atau lebih telah dikembangkan KTSP-nya.  Sebanyak 9 (sembilan) sampai deng 12 (dua belas) silabus mata pelajaran telah dikembangkan KTSP-nya.  Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) silabus mata pelajaran telah

12.	Dalam me	engembangkan KTSP, guru menyusun s us sendiri.	
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru menyusur ilabus sendiri.	
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru menyusun 🥫 abus sendiri.	
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru menyusun : 1bus sendiri.	
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru menyusun sili bus sendiri.	
	□ E.	Tidak ada seorang pur guru menyusur labus sendiri.	

13.	Sekolah/Madrasah memiliki silabus untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan panduan penyusunan KTSP.	
	□ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) mata pelajaran atau lebih memiliki silabus.
	□ B.	Sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) mata pelajaran memiliki silabus.
	□ C.	Sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) mata pelajaran memiliki silabus.
	□ D.	Sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) mata pelajaran memiliki silabus.
	□ E.	Tidak ada satu pun mata pelajaran memiliki silabus.
14.	Guru meng KTSP.	embangkan silabus sesuai dengan langkah-langkah pada panduan penyusunan
	□ A.	Sebanyak 76%-100% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 7 (tujuh) langkah.
	□ B.	Sebanyak 51%-75% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 6 (enam) langkah.
	□ C.	Sebanyak 26%-50% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 5 (lima) langkah.
	□ D.	Sebanyak 1%-25% silabus mata pelajaran dikembangkan melalui 1 (satu) sampai 4 (empat) langkah.
	□ E.	Tidak mengikuti langkah-langkah pengembangan silabus.
15.		adrasah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran hari libur pada kalender akademik yang dimiliki.
	□ A.	Menjadwaikan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur.
	□ B.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, dan pembelajaran efektif.
	□ C.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran dan minggu efektif.
	□ D.	Menjadwalkan awal tahun pelajaran.
	□ E.	Tidak memiliki kalender akademik.

# II. STANDAR PROSES

16.		adrasah mengembangkan silai is secara mandiri atau cara lainnya an standar isi, standar kompetens lusan, dan panduan penyusunan KTSP.
	☐ A.	Mengembangkan silabus secara nandiri.
	□ B.	Mengembangkan silabus mela kelompok guru mata pelajaran dalam sebuah sekolah/madrasah.
	□ C.	Mengembangkar silabus me lui kelompok guru dari beberapa sekolah/madrasah.
	○ D.	Mengembangkan silabus dengan engadopsi contoh yang sudah ada.
	○ E.	Tidak mengembangkan silabus.

17.	17. Setiap mata pelajaran memiliki RPP yang dijaba kan dari silabus.	
	□ A.	Sebanyak 13 (tiga belas) mata 🖽 lajaran atau lebih memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
	□ B.	Sebanyak 9 (sembilan) sampai 12 dua belas) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
	□ C.	Sebanyak 5 (lima) sampai 8 (dela; an) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
	□ D.	Sebarıyak 1 (satu) sampai 4 (emp3t) mata pelajaran memiliki RPP yang dijabarkan dari silabus.
	○ E.	Tidak ada satu pun mata pelajaran n miliki RPP yang dijabarkan dari silabus.

- Penyusunan RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa, mendorong 18 partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebanyak 76% - 100% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu □ A. siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Sebanyak 51% - 75% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu □ B. siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebanyak 26% - 50% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaari individu  $\Box$  C. siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebanyak 1% - 25% RPP sudah memerhatikan prinsip perbedaan individu □ D. siswa, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Tidak ada satu pun RPP memerhatikan prinsip perbedaan individu siswa,  $\cap$  E. mendorong partisipasi aktif siswa, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
- 19. Sekolah/Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
  A. Memenuhi 4 (empat) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
  B. Memenuhi 3 (tiga) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
  C. Memenuhi 2 (dua) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
  D. Memenuhi 1 (satu) persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.
  E. Tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran.

_		
20.	Proses pe pembelaja	embelajaran di sekc ah/madrasah ( ksanakan sesuai dengan langkah-langkah aran.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru ni ksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembela an.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru me (sanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembela, in.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru me sanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembela in.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mel sanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajan.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru melakun akan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
21.		ran proses pembelajaran dilakukan ah kepala sekolah/ madrasah mencakup ancanaan, tahap pelaksanaan, dan terap perilaian hasil pembelajaran.
	□ A.	Mencakup 3 (tig∄) tahap per lauar serta dilakukan diskusi hasil pemantauan.
	□ B.	Mencakup 3 (tiga) tahap pema auan tanpa dilakukan diskusi hasil pemantauan.
	□ C.	Mencakup 2 (dua) tahap pemantau
	□ D.	Mencakup 1 (satu) tahap pemantaua
	□ E.	Tidak pernah melakukan pemantauan
22.		proses pembelajaran dilakukan olel kepala sekolah/madrasah dengan cara contoh, diskusi, pelatihan, dan konsur si.
	□ A.	Melakukan supervisi proses pembel∉ran melalui 4 (empat) cara.
	□ B.	Melakukan supervisi proses pembel⊱ ran melalui 3 (tiga) cara.
	□ C.	Melakukan supervisi proses pembela ran melalui 2 (dua) cara.
	□ D.	Melakukan supervisi proses pembel a ran melalui 1 (satu) cara.
	□ E.	Tidak melakukan su rervisi.

23.	Evaluasi p	oroses pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah.
	□ A.	Dengan memerhatikan 2 (dua) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran dan kinerja guru.
	□ B.	Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu proses pembelajaran.
	□ C.	Dengan memerhatikan 1 (satu) aspek evaluasi yaitu kinerja guru.
	□ D.	Evaluasi dilakukan tetapi tidak memerhatikan kedua aspek evaluasi.
	○ E.	Tidak ada proses evaluasi.
24.	•	sekolah/madrasah melaporkan pengawasan proses pembelajaran kepada u kepentingan.
	□ A.	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan, dewan guru, dan pengawas sekolah/madrasah.
	□ B.	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan dan dewan guru.
	□ <b>C</b> .	Pengawasan dilaporkan kepada yang bersangkutan saja.
	□ <b>D</b> .	Tidak dilaporkan.
	O E.	Tidak melakukan pengawasan.
25.	Kepala se pembelaja	ekolah/madrasah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses aran.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
	□ В.	Sebanyak 51% - 75% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% hasil pengawasan selama satu tahun terakhir dilakukan tindak lanjut.
	□ E.	Tidak ada satu pun hasil pengawasan ditindaklanjuti.

## III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

26.		emperoleh pengalaman belajar un menunjukkan kemampuan berpikir logis, tif, dan inovatif dalam pengambilan kabutusan.
	C) A	Rata-rata nilai ketuntasan belaja: ata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 75,0 atau lebih.
	CI B.	Rata-rata nilai ke untasan belajar - ata pelajaran kelompok iptek ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
	□ C.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar — ita pelajaran kelompok iptek diteta <b>pkan</b> 65,0 sampai 69,9.
	□ D_	Rata-rata nilai ketuntasan belajar in ta pelajaran kelompok iptek ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
	□ E.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar aata pelajaran kelompok iptek ditetapkan kurang dari 60.
27.		iibat dalam kegiatan belajar yang ter aitan dengan analisis dan pemecahan nasalah kompleks.
	□ A.	Sekolah/Madrasah nienjalankan keg in siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kong iks sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu te un terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu lahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kompleks sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegiata: siswa yang dapat menganalisis dan memecahkan masalah-masalah komple: s sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah menjalankan kegiatan siswa yang dapat menganalisis dan memacahkan masalah nasalah kompleks.

- Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menganalisis gejala alam dan sosial. 28. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 75,0 □ A. atau lebih. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 70,0 □ B. sampai 74,9. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 65,0 □ C. sampai 69.9. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan 60,0 □ D. sampai 64.9. Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran IPA dan IPS ditetapkan kurang □ E. dari 60.
- 29. Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kelompok mata pelajaran iptek secara efektif. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan □ A. memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, laboratorium, dan internet, Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan □ B. memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, perpustakaan, dan laboratorium. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kediatan siswa dengan memanfaatkan dan □ C. memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar, buku teks, dan perpustakaan. Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa dengan memanfaatkan dan □ D. memfungsikan sumber belajar meliputi bahan ajar dan buku teks. Sekolah/Madrasah tidak pemah memfasilitasi kegiatan siswa dengan sumber □ E. belajar.

30.		emperoleh pengalaman belajar ni alui program pembiasaan untuk mencan pengetahuan lebih kenjut dari berbagi sumber belajar.
	□ A.	Sekolah/Madrasat menjalankan egiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjul ari berbagai sumber belajar sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kana ebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan egiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetah uan lebih lanjut iri berbagai sumber belajar sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atat 3 (tiga) kali da satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan ngiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut ni berbagai sumber belajar sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dala satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan giatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut in berbagai sumber belajar sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalan satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah idak pernah majalankan kegiatan pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih njut cari berbagai sumber belajar.

31.		emperoleh pengalaman belajar yang nampu memanfaatkan lingkungan secara dan bertanggung jawab.
	□ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan keg tan pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali au lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan keg an pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara prod tif dan bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalan satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegi an pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara producif dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam atu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegia in pembelajaran yang mampu memanfaatkan lingkungan secara produ if dan bertanggung jawab sebanyak 1 satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalan satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak pemah menilankan kegiatan pembelajaran yang mampu memanfaatkan Ingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

32.	Siswa men	nperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun.
	O E.	Sekolah/Madrasah tidak pernah memfasilitasi siswa untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

33.	Siswa men	peroleh pengalaman mengapresiasikan karya seni dan budaya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
	○ E.	Sekolah/Madrasah tidak pemah memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya.

34.		mperoleh pengalaman belajar untu menumbuhkan dan mengembangkan sikap ri dan bertanggung jawab.
	□ A.	Sekolah/Madrasan menjalankan giatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengemban(kan sikap perca diri dan bertanggung jawab sebanyak 4 (empat) jenis dan atau 4 (empat) atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasat menjalankan giatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percadiri can bertanggung jawab sebanyak 3 (tiga) jenis dan/ata i 3 (tiga) kali dai n satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan jiatar kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percay diri dan bertanggung jawab sebanyak 2 (dua) jenis dan/atan 2 (dua) kali dai n satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah menjalankan k iatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percay. Jiri dan bertanggung jawab sebanyak 1 (satu) jenis dan/atan 1 (satu) kali da n satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak pemah renjalankan kegiatan kesiswaan guna menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab.

35.	. Siswa memperoleh pengalaman pelajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.	
	□ A.	Sekolah/Madrasah menjalankan keg tan penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah menjalankan keg an penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah menjalankan kegi an penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua kali dalam satu tahun terakhir.
	□ <b>D</b> .	Sekolah/Madrasah menjalankan kegi in penegakan aturan-aturan sosial sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu kali dalam satu tahun terakhir.
	□ <b>E</b> .	Sekolah/Madrasah tidak pernah menjaia kan kegiatan penegakan aturan-aturan sosial.

36.	Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap kompetitif untuk mendapatkan hasil terbaik.	
	□ A.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, juara kelas, dan juara mata pelajaran.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah, juara jurusan, dan juara kelas.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah dan juara kelas.
	□ <b>D</b> .	Sekolah/Madrasah memberikan penghargaan bagi juara sekolah/madrasah.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak memberikan penghargaan bagi juara.
37.		mperoleh pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk kan hasil terbaik.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak pemah memberikan layanan pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap sportif untuk mendapatkan hasil terbaik.

- Siswa memperoleh pengalaman belajar ya a dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan pemegara secara demokratis dalam wadah NKRI. Sekolah/Madrasah menjalankar kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupa permasyarakat, berbangsa, dan bernegara DA secara demokratis sebanyak 4 mpat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah menjalankan tegia an pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa, dan bernegara CI B secara demokratis sebanyak 3 (liga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah menjalankan egiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan ermasyarakat, berbangsa, dan bernegara CIC secara demokratis sebanyak 2 (1113) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasali menjalankan egiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa calam kehidupan ermasyarakat, berbangsa, dan bernegara DD. secara demokratis sebanyak 1 s. ) jen s dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah tidak pemah lenjalankan kegiatan pembelajaran yang □ E. melibatkan partisir asi siswa dalari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara secara (lemokratis.
- 39. Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk membentuk karakter siswa, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan. Sekolah/Madrasah melaksanakan ogram bagi siswa untuk membentuk karakter, menumbuhkan rasa surtivitas, dan kebersihan lingkungan □ A. sebanyak 4 (empat) ienis dan/atau 4 empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah melaksanakan pogram bagi siswa untuk membentuk □ B. karakter, menumbuhkan rasa si tivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir Sekolah/Madrasah melaksanakan pogram bagi siswa untuk membentuk □ C. karakter, menumbuhkan rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (du:) kali dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah melaksanakan program bagi siswa untuk membentuk  $\Box$  D karakter, menumbuhkan rasa sperivitas, dan kebersihan lingkungan sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir. Sekolah/Madrasah tidak melaksai kan program bagi siswa untuk □ E. membentuk karakter, menumbuhki rasa sportivitas, dan kebersihan lingkungan.

- 40. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Sebanyak 76% - 100% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan □ A. Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Sebanyak 51% - 75% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan □ B. Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Sebanyak 26% - 50% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan □ C. Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Sebanyak 1% - 25% silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan □ D. Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Tidak ada satu pun silabus khususnya mata pelajaran Pendidikan □ E. Kewarganegaraan dan IPS memuat kegiatan pembelajaran dalam kemampuan memahami hak dan kewajiban orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- 41. Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 4 (empat) jenis atau lebih kegiatan □ A. pembiasaan dan pengamalan ajaran agama. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 3 (tiga) jenis kegiatan pembiasaan dan □ B. pengamalan ajaran agama. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 2 (dua) jenis kegiatan pembiasaan dan □ C. pengamalan ajaran agama. Sekolah/Madrasah memfasilitasi 1 (satu) jenis kegiatan pembiasaan dan □ D. pengamalan ajaran agama. Sekolah/Madrasah tidak melaksanakan kegiatan pembiasaan dan pengamalan O E. ajaran agama.

42.		mperoleh pengalarnan belajar untu menghargai keberagaman agama, bangsa, dan golongan sosial ekonomi dalam ngkup global.
	□ A <sub>=</sub>	Sekolah/Madrasan melaksanakan egiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, sularas, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global senanyak 4 (empal) kali atau lebih dalam satu tahun rerakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasal melaksanakar agiatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman aga na, bangsa, suk ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 3 (tiga) je s dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah melaksanakan giatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agarna, bangsa, suku as, can golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 2 (dua) jer dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah melaksanakan ingilatan pembelajaran untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku as, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global sebanyak 1 (satu) jen dan/atau 1 (satu) kal dalam satu tahun terakhir.
	□ E.	Tidak ada kegiatar pembelajaran ntuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sos ekonomi dalam lingkup global.
43.		emperoleh pengalaman belajar dala pembentukan akhlak mulia melalui In dan pengamalan.
	□ A.	Ada kegiatan pembentukan akhlak mura melalui program pengembangan diri sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih setiap minggu.
	□ B.	Ada kegiatan pembentukan akhlak mulim melalui program pengembangan diri sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga kali setiap minggu.
	□ <b>C</b> .	Ada kegiatan pembentukan akhlak mul melalui program pengembangan diri sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali setiap minggu.

Ada kegiatan pembentukan akhlak muli melalui program pengembangan diri

Tidak ada kegiatan pembentukan akhla mulia melalui program pengembangan

sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (saiii) kali setiap minggu.

□ D.

□ E.

diri.

	□ A.	Sebanyak 76% - 100% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% - 25% kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
	□ E.	Tidak ada kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan diskusi, kerja kelompok, dan persaingan sehat.
45.	Siswa me kelompok.	mperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun

45.	Siswa mer kelompok.	nperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun
	□ A.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak pemah memfasilitasi kegiatan siswa untuk menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok.

46.	Siswa mer efektif dan	mperoleh pengalaman dalam ber munikasi baik lisan maupun tulisan secara santun.
	C A	Sekolah/Madrasah memfasilitas egiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tu isan secara ete if dan santun sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih alam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasa: memfasilitasi agiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara ef∈ tif dan santun sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu ta iin terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi k giatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulikan secara efek f dan santun sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tah n terakhir.
	□ 0.	Sekolah/Madrasah memfasilitasi k iatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efeki dan santun sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tar in terakhir.
	O E	Sekolah/Madrasah t dak memfasilit: kegiatan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif da santun.

47.	Siswa me estetis.	mperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan
	□ A.	Tersedianya kumpulan karya tulis sisva baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata tudi lapangan, majalah dinding, dan buletin siswa internal sekolah/madrasa
	□ B.	Tersedianya kumpulan karya tulis siswa baik dari penugasan maupun lomba, laporan hasil kunjungan karya wisata/sia ti lapangan, dan majalah dinding.
	□ C.	Tersedianya kumpulan karya tulis siswa ⊃aik dari penugasan maupun lomba, dan laporan hasil kunjungan karya wisal istudi lapangan.
	□ <b>D</b> .	Tersedianya kumpulan karya tulis siswa aik dari penugasan maupun lomba.
	□ <b>E</b> .	Tidak tersedia kumpular karya tulis sisw

48.		nperoleh keterampilan menyimak, membaca, menulis, dari berbicara baik dalam onesia maupun Bahasa Inggris.
	□ A.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 75,0 atau lebih.
	□ B.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 70,0 sampai 74,9.
	□ C.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 65,0 sampai 69,9.
	□ D.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan 60,0 sampai 64,9.
	□ E.	Rata-rata nilai ketuntasan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditetapkan kurang dari 60.

49.	Siswa mer perkembari	mperoleh pengalaman belajar dalam mengembangkan iptek seiring dengan gannya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu tahun terakhir.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memberikan layanan dalam pengembangan iptek sebanyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir.
	□ <b>E</b> .	Sekolah/Madrasah tidak pemah memberikan layanan dalam pengembangan iptek.

Siswa memperoleh pengalaman belajar ag menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sekolah/Madrasan melakukan ke iatan untuk menghadapi ujian akhir dan A. seleksi masuk perguruan tinggi sebanyak 4 (empat) jenis dan/atau 4 (empat) kali atau lebih dalam satu lemester. Sekolah/Madrasan melakukan ki atan untuk menghadapi ujian akhir dan □ B seleksi masuk perguruan tinggi sanyak 3 (tiga) jenis dan/atau 3 (tiga) kali dalam satu semester. Sekolah/Madrasalı melakukan kı stan untuk menghadapi ujian akhir dan □ C. seleksi masuk perguruan tinggi soo inyak 2 (dua) jenis dan/atau 2 (dua) kali dalam satu semes ler. Sekolah/Madrasah melakukan ke tan untuk menghadapi ujian akhir dan □ D. seleksi masuk perguruan tinggi : anyak 1 (satu) jenis dan/atau 1 (satu) kali dalam satu semester. Sekolah/Madrasah tidak melakuk kegratan untuk menghadapi ujian akhir □ E. dan seleksi masuk perguruan tinggi

## IV. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

51.	Oura mom	inki kualinkasi akademik minimum sarjana (01) atau diploma empat (0114).
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% - 25% guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru berpendidikan minimum S1 atau D-IV.
52.	Guru pelaj	aran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% - 25% guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru pelajaran memiliki kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikannya.
53.	Guru seha	it jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% - 25% guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru hadir untuk menjalankan tugas mengajar dalam satu semester terakhir.

54.		encanakan, melal sanakan, dan engevaluasi pembelajaran sesuai dengan nsip pembelajaran.
	□ A	Sebanyak 76% – 100% g. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesu dengan prinsip-prinsip pembelajaran.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% gur merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pen belajaran sesua engan prinsip-prinsip pembelajaran.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai engan prinsip-prinsip pembelajaran.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25 % guru merenca: ıkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip rinsip pembelajaran.
	□ E.	Tidak ada seorang puri guru mereri nakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsiµ insip pembelajaran.

55.	Guru memiliki integritas kepribadian dan bertind s sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlak	
	□ A.	Semua guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
	□ B.	Ada guru yang melanggar norma agan a, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan telah o tenai sanksi yang sepadan seperti dibebastugaskan dari mengajar atau di aluarkan.
	□ C.	Ada guru yang melanggar norma agan , hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun diber kesempatan memperbaiki din dan dilakukan pembinaan.
	□ D.	Ada guru yang melanggar norma agama hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun hanya dit arikan peringatan tertulis.
	○ E.	Ada guru yang melanggar norma agam , hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku namun tidak diba kan sanksi apa pun.

56.	Guru berk dan orang	omunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, tua siswa.
	□ <b>A</b> .	Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, guru dan komite sekolah/madrasah, serta pertemuan antara guru dan orangtua siswa.
	□ B.	Adanya rapat dewan guru, rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah, serta guru dan komite sekolah/madrasah.
	□ C.	Adanya rapat dewan guru serta rapat antara guru dan kepala sekolah/madrasah.
	□ D.	Adanya rapat dewan guru.
	□ E.	Tidak pemah diadakan rapat.
57.	Guru mer ilmiah.	nguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metod
	□ A.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata di atas 9 tahun.
	□ B.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 7 sampai dengan 9 tahun.
	□ C.	Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata antara 4

sampai dengan 6 tahun.

pelajaran yang diampu.

kurang.

□ D.

O E.

Adanya kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata

pelajaran yang diampu dengan pengalaman mengajar rata-rata 3 tahun atau

Tidak ada kesesuaian antara latar belakang kompetensi guru dengan mata

58.		kolah/madrasah berstatus sebaga juru, memiliki sertifikat pendidik, dan Surat n (SK) sebagai kepala sekolah/macrah.
	□ A.	Berstatus sebagai guru, memiliki —rtifikat pendidik, dan memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
	□ B	Berstatus sebaga guru, tidak menliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasal
	□ C <sub>2</sub>	Berstatus sebagai guru, memiliki s tifikat pendidik, tetapi tidak memiliki SK sebagai kepala sekolah/madrasah.
	□ D.	Tidak berstatus sebagai guru, tidak nemiliki sertifikat pendidik, tetapi memiliki SK sebagai kepala sekolah/ madrain.
	□ E.	Tidak berstatus s∌bagai guru, titi k memiliki sertifikat pendidik, dan tidak memiliki SK sebagai kepala sekolar nadrasah.
59.	Kepala sel empat (D-	xolah/madrasah memiliki kualifikasi ak ≡lemik minimum sarjana (S1) atau diploma ∀).
	□ A.	Memiliki kualifikasi akademik m mum S1 atau D-IV kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi le: reditasi.
	□ B.	Memiliki kualifikasi akademik min num S1 atau D-IV Kependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tida terakreditasi.
	□ <b>C</b> .	Memiliki kualifikasi akademik minir im S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tera editasi.
	□ D.	Memiliki kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV nonkependidikan dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak erakreditasi.
	□ E.	Tidak memiliki kualifikasi akademik mir num yang dipersyaratkan.
60.	Kepala sel	kolah/madrasah memiliki pengalaman m∈ gajar sekurang-kurangnya 5 tahun.
	□ A.	Memiliki pengalaman mengajar 5 (lima) shun atau lebih.
	□ B.	Memiliki pengalaman mengajar 3 (tiga) - mpai dengan 4 (empat) tahun.
	□ C.	Memiliki pengalaman mengajar 2 (dua) mpai dengan 3 (tiga) tahun.
	□ D.	Memiliki pengalaman mengajar 1 (satu) impai dengan 2 (dua) tahun.
	□ E.	Memiliki pengalaman mengajar kurang ≕ i 1 (satu) tahun.

- 61. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa. Sebanyak 76% - 100% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada  $\Box$  A. dua tahun terakhir. Sebanyak 51% - 75% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada □ B. dua tahun terakhir. Sebanyak 26% - 50% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada □ C. dua tahun terakhir. Sebanyak 1% - 25% lulusan diterima di perguruan tinggi terakreditasi pada □ D. dua tahun terakhir Tidak ada seorang pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi terakreditasi □ E. pada dua tahun terakhir.
- 62. Kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai sumber belajar siswa. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara □ A. mandiri sebanyak 76% - 100% dari dana ekstrakunkuler dalam Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M). Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara □ B. mandiri sebanyak 51% - 75% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara □ C. mandiri sebanyak 26% - 50% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. Mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara □ D. mandiri sebanyak 1% - 25% dari dana ekstrakurikuler dalam RKS/M. Tidak mampu menggalang dana pengembangan kegiatan ekstrakurikuler □ E. secara mandiri

63.	Kepala sel	tolah/madrasah m⊮akukan superv dan monitoring.
	□ A.	Melakukan supervisi dan monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
	□ B.	Melakukan supen isi dan monitori secara terencana dengan implementasi sebanyak 51% - 75% dari kegi: n monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
	□ C.	Melakukan supervisi dan moniton: secara terencana dengan implementasi sebanyak 26% - 50% dari kegiali 1 monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
	□ D.	Melakukan supervisi dan monitoring secara terencana dengan implementasi sebanyak 1% - 2.1% dari kegiat: monitoring yang direncanakan dalam RKS/M.
	□ E.	Tidak melakukan supervisi dan mor aring.

64.	Tenaga ad yang seder	dministrasi minimum memiliki kualifik≣ i akademik pendidikan menengah atau rajat.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% tenaga adm nistrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang seda njat.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% tenaga admi strasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang seder iat.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% tenaga admi strasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang seder at.
	□ <b>D</b> .	Sebanyak 1% - 25% tenaga admir trasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sedera at.
	○ E.	Tidak ada seorang pun tenaga ada sistrasi memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sedera t.

65.	Tenaga ad	ministrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ E.	Tidak ada seorang pun tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
66.	Tenaga po yang sede	erpustakaan minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau rajat.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
	□ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
	□ <b>D</b> .	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-I).
	□ <b>E</b> .	Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.
67.	Tenaga p	erpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
	□ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
	□ <b>D</b> .	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
	□ <b>E</b> .	Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

68.	Tenaga 🗟	boratorium memiliki kualifikasi yang persyaratkan.
	□ A.	Sekolah/Madrasai memiliki tena a laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memeriuhi kualifikasi Dii oma satu (D-I).
	□ B.	Sekolah/Madrasah memiliki tenag; aboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualif asi Diploma satu (D-i).
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga aboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu 0-l).
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga aboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma atu (D-I).
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak memiliki te ga laboratorium.
69.	Tenaga la	boratorium memiliki latar belakang per dikan sesuai dengan tugasnya.
	□ A.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
	□ B.	Sekolah/Madrasah n emiliki tenaga 🗁 pratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya setuai dengan tuganya.
	□ C.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
	□ D.	Sekolah/Madrasah memiliki tenaga la oratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
	□ E.	Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaça laboratorium.
70.	Sekolah/N	ładrasah memiliki tenaga layanan khusus
	□ A.	Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tena 3 layanan khusus.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khu sus.
	□ C.	Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan kh. sus.
	□ D.	Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus.
	□ <b>E</b> .	Tidak memiliki satupun tenaga layanan k usus.

## V. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

71.	Lahan sekolah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.	
	□ A.	Memiliki lahan seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas lahan minimal.
	□ B.	Memiliki lahan seluas 51% - 75% dari ketentuan luas lahan minimal.
	□ C.	Memiliki lahan seluas 26% - 50% dari ketentuan luas lahan minimal.
	□ <b>D</b> .	Memiliki lahan seluas 1% - 25% dari ketentuan luas lahan minimal.
	□ E.	Tidak tersedia lahan.
72.	menganca	tolah/madrasah berada di lokasi yang aman, terhindar dari potensi bahaya yang Im kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan daan darurat.
	□ <b>A</b> .	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	□ B.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, tetapi tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	□ C.	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	□ <b>D</b> .	Berada di lokasi aman, terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan jiwa, tetapi tidak terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa, serta tidak memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
	□ E.	Tidak berada di lokasi aman.

73.	pencemara	kolah/madrasah berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan an air, kebisingan dan pencem an udara serta memiliki sarana untuk kan kenyamanan.
	□ A.	Berada di lokasi yang nyaman, terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran dara serta memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
	□ B.	Berada di lokasi yang nyaman, te hindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pancemaran uda , tetapi tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kenyamanan.
	□ C.	Berada di lokasi yang nyaman, terhadar dari gangguan pencemaran air dan kebisingan, tetapi tidak terhindar dari gangguan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkan kenyamanan.
	□ D.	Berada di lokasi yang nyaman, ten ndar dari gangguan pencemaran air, tidak terhindar dari gangguan kebisin an dan pencemaran udara, serta tidak memiliki sarana untuk meningkatkan anyamanan.
	O E.	Tidak berada di lokasi yang nyaman

74.		ladrasah berada di lokasi yang sesuai d⊡igan peruntukannya, memiliki status hak a dan ijin pemanfaatan dan pemegang ha∷atas tanah.
	□ A.	Berada di lokasi yang sesuai dengan p₃ untukannya, memiliki status hak atas tanah dan ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
	□ B.	Berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan memiliki status hak atas tanah, tetapi tidak memiliki ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
	□ C.	Berada di lokasi yang sesuai dengan eruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah, tetapi memiliki ijin penantan dari pemegang hak atas tanah.
	□ D.	Berada di lokasi yang sesuai dengan eruntukannya, tidak memiliki status hak atas tanah dan tidak memiliki ijin penanfaatan dan pemegang hak atas tanah.
	□ E.	Tidak berada di lokasi susuai dengan pantukannya.

75.	Lantai sek	olah/madrasah memenuhi ketentuan luas minimal.
	□ A.	Memiliki lantai seluas 76% - 100% atau lebih dari ketentuan luas minimal.
	□ 8.	Memiliki lantai seluas 51% - 75% dari ketentuan luas minimal.
	□ C.	Memiliki lantai seluas 26% - 50% dari ketentuan luas minimal.
	□ <b>D</b> .	Memiliki lantai seluas 1% - 25% dari ketentuan luas minimal.
	○ E.	Tidak memiliki gedung sendiri.
76.		sekolah/madrasah memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi stem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
	□ A.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
	□ B.	Memiliki struktur yang stabil dan kokoh tetapi tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
	□ C.	Memiliki struktur yang stabil tetapi tidak kokoh dan tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
	□ <b>D</b> .	Memiliki struktur yang tidak stabil dan tidak kokoh tetapi dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran.
	□ <b>E</b> .	Tidak memiliki struktur yang stabil dan kokoh serta tidak dilengkapi dengan sistem pencegahan bahaya kebakaran dan petir.
77.	Bangunan	sekolah/madrasah memiliki sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
	□ A.	Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
	□ C.	Memiliki 2 (dua) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
	□ <b>D</b> .	Memiliki 1 (satu) jenis sanitasi sebagai persyaratan kesehatan.
	○ E.	Tidak memiliki sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan.

78.	Bangunan sekolah/madrasah memiliki ventilas udara dan pencahayaan yang memadai.	
	□ A	Memiliki ventilasi udara memada n pencahayaan memadai.
	□ B.	Memiliki ventilasi udara yang kurar memadai tetapi pencahayaan memadai.
	□ C.	Memiliki ventilasi udara kurang me adai dan pencahayaan kurang memadai.
	□ D.	Tidak memiliki ventilasi udara te pi memiliki pencahayaan yang kurang memadai.
	□ E.	Tidak memiliki vent lasi udara dan pulicahayaan.
79.	Bangunan	sekolah/madrasah mɨmiliki instalasi 🕕 ik dengan daya minirnum 1300 Watt.
	□ A.	Memiliki instalasi list ik dengan daya 300 Watt atau lebih.
	□ <b>B</b> .	Memiliki instalasi list⊪k dengan daya = 0 W∈tt.
	□ C.	Memiliki instalasi listrik dengan daya 4 0 Watt.
	□ D.	Memiliki instalasi listrik dengan m∈ ıanfaatkan sumber daya lain yang digunakan secara bersama.
	□ E.	Tidak memiliki instalasi listrik.
80.		adrasah memiliki izin mendirikan bang nan dan izin penggunaan bangunan gan peruntukannya.
	□ <b>A</b> .	Memiliki izin mendirikan bangunan dar izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya sebelum bangur n berdiri.
	□ B.	Memiliki izin mendirikan bangunan, dan nemiliki izin penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya setelah bargunan berdiri.
	□ C.	Memiliki izin mendirikan dan memiliki izin enggunaan bangunan sementara.
	□ D.	Memiliki izin mendirikan tetapi tidak memil i izin penggunaan bangunan.
	□ <b>E</b> .	Tidak memiliki izin mendi ikan bangunan 📉 n izin penggunaan bangunan.

0.4	0-1-1-1-1	and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and
81.	Sekolan/M	adrasah melakukan pemeliharaan terhadap bangunan secara berkala.
	□ A.	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan secara berkala sesuai ketentuan.
	□ <b>B</b> .	Melakukan pemeliharaan ringan dan berat terhadap bangunan, tetapi melebihi waktu dalam ketentuan.
	□ C.	Melakukan pemeliharaan ringan tetapi melebihi waktu yang sesuai ketentuan, dan tidak pemah melakukan pemeliharaan berat.
	□ D.	Melakukan pemeliharaan terhadap bangunan, jika sudah ada bagian bangunan yang rusak berat.
	□ E.	Tidak pemah melakukan pemeliharaan.
82.	Sekolah/M	ladrasah memiliki prasarana yang lengkap.
	□ A.	Memiliki 15 (lima belas) atau lebih jenis prasarana yang dipersyaratkan.
	□ B.	Memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 14 (empat belas) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
	□ C.	Memiliki 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
	□ D.	Memiliki 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenis prasarana yang dipersyaratkan.
	□ E.	Tidak memiliki prasarana sendin.
83.	Sekolah/M ketentuan.	ladrasah memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesua
	□ A.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki ruang kelas dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang kelas dengan ukuran, jumlah, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	O E.	Tidak memiliki ruang kelas atau gedung sendiri

84_	Sekolah/M	ladrasah memiliki uang perpustak n dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	O A	Memiliki ruang perpustakaan ngar luas dan sarana sesuai dengan ketentuan.
	□В	Memiliki ruang perpustakaan di i <b>gan luas tidak sesuai ketentuan tetapi</b> memiliki sarana sesuai ketentuan
	□ c	Memiliki ruang p∌rpustakaan de⊨ an luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ Ď.	Memiliki ruang perpustakaan der յ ո luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang perpustakaa
85.		ladrasah memiliki n ang laboratoriu biologi yang dapat menampung minimum ongan belajar dengan luas dan saran sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki ruang laboratorium biolog yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas da sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang lab ratorium biolog yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	O C	Memiliki ruang laboratorium biolog ang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas sauai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	O D.	Memiliki ruang laboratorium biologi, /ang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium biol:gi.
86.		adrasah memiliki ruang laboratorium fisa a yang dapat menampung minimum satu n belajar dengan luas dan sarana sesuaa setentuan.
	□ A.	Memiliki ruang laboratorium fisika, y g dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan s rana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang laboratorium fisika, y g dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidik sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki ruang laboratorium fisika, ya ya dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas ses ii ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan
	□ <b>D</b> .	Memiliki ruang laboratorium fisika, yan tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dar sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang la∋oratorium fisika

87.		Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum pongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.		
	O A	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.		
	□ B.	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.		
	□ <b>c</b> .	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ <b>D</b> .	Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.		
88.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratonium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.			
	□ A.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.		
	□ <b>B</b> .	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.		
	□ <b>c</b> .	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ D.	Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.		
89.		Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum ongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.		
	□ A.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.		
	□ B.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.		
	□ <b>c</b> .	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ D.	Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.		
	□ E.	Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa		

90.	Sekolah/M	ladrasah memiliki ruang pimpinan engan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	O A	Memiliki ruang ç∔mpinan denga⊹ ⊥as dan sarana sesuai ketentuan.
	() B.	Memiliki ruang pimpinan dengan uas idak sesuai kelentuan tetapi memiliki sarana sesuai kelentuan.
	□ c.	Memiliki ruang pimpinan dengan as sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang pimpinan dengan sa dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang pimpinan.
91.	Sekolah/M	ladrasah memiliki ru∉ng guru denga⊫ as dan sarana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki ruang guru dengan luas d⊚ sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang guru dengan luas idak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai keter tuan.
	□ C.	Memiliki ruang guru dengan luas s suai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang guru dengan luas dar arana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang guru.
92.	Sekolah/M	adrasah memiliki ruang tata usaha dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas an sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas dak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang tata usaha dengan luas ∈ 1 sarana tidak sesua⊨ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang tata usaha.

93.		Madrasah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah/ madrasah dengan luas ngkapan sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki tempat beribadah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki tempat beribadah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki tempat beribadah dengan luas dan perlengkapan tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki tempat beribadah.
94_	Sekolah/N	nadrasah memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang konseling dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki ruang konseling dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang konseling dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang konseling.
95.		dadrasah memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan dengan karana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

96.	Sekolah/N ketentuan	fadrasah memiliki ruang organisa≔ kesiswaan dengan luas dan sarana sesuai
	□ A.	Memiliki ruang organisasi ke: vaan dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
	□ B,	Memiliki ruang organisasi kesisi an dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai keteli uan,
	C) G.	Memiliki ruang organisasi kesisy an dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai kelerilian.
	□ <b>D</b> .	Memiliki ruang organisasi kesisw in dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki ruang organisasi ke swaan.
97.	Sekolah/N	tadrasah memiliki jamban dengan jumah, ukuran, dan sarana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki jamban dengan jumlah, ukan, dan sarana sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki jamban cengan jumlah din ukuran tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai dengan keteruan.
	□ <b>c</b> .	Memiliki jamban dengan jumlah dan ukuran sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ <b>D</b> .	Memiliki jamban dengan jumlah, uk⊞n, dan sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki jamban.
98.	Sekolah/M	adrasah memiliki gudang dengan luas an sarana sesuai ketentuan.
	□ A.	Memiliki gudang dengan luas dan sa na sesuai ketentuan.
	□ B.	Memiliki gudang dengan luas tidak e suai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
	□ C.	Memiliki gudang der gan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
	□ D.	Memiliki gudang dengan luas dan sarar a tidak sesuai ketentuan.
	□ E.	Tidak memiliki gudan j.

99.	Sekolah/Madrasah memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.		
	□ A.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas sesuai ketentuan.	
	□ В.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas sesuai ketentuan.	
	□ c.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki kualitas tidak ketentuan.	
	□ D.	Memiliki ruang sirkulasi dengan luas dan kualitas tidak sesuai ketentuan.	
	□ E.	Tidak memiliki ruang sirkulasi.	
100.	Sekolah/ ketentua	Madrasah memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai n.	
	□ <b>A</b> .	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.	
	□ B.	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.	
	□ <b>c</b> .	Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.	

Memiliki tempat bermain/berolahraga dengan luas dan sarana tidak sesuai

Tidak memiliki tempat bermain/berolahraga.

□ D.

□ E.

ketentuan.

## VI. STANDAR PENGELOLAAN

	□ A.	Merumuskan dan menetar an visi, mudah dipahami dan serin disosialisasikan.
	□ B.	Merumuskan dan menetap n visi, mudah dipahami dan pemal disosialisasikan.
	□ C.	Merumuskan dan menetapi า visi, mudah dipahami tetapi tidal disosialisasikan
	□ D.	Merumuskan dan menetapkan 🤟 i, sul t dipahami dan tidak disosialisasikan
	□ E.	Tidak merumuskan dan menetali an visi.
02.	Sekolah/N	Madrasah telah merumuskan dan remetapkan misi lembaga.
02.	Sekolah/M	Aadrasah telah merumuskan dan re retapkan misi lembaga. Merumuskan dan menetapka mis⊩ mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
02.		Merumuskan dan menetapkai misi mudah dipahami dan sering
02.	□ A.	Merumuskan dan menetapkar misi mudah dipahami dan sering disosialisasikan.  Merumuskan dan menetapkar misi, mudah dipahami dan pemah
02.	□ <b>A</b> .	Merumuskan dan menetapkar misi mudah dipahami dan sering disosialisasikan.  Merumuskan dan menetapkar misi, mudah dipahami dan pemah disosialisasikan.  Merumuskan dan menetapkan misi, mudah dipahami tetapi tidal

103.	Sekolah/M	fadrasah telah merumuskan dan men- apkan tujuan lembaga.
	□ A.	Merumuskan dan menetapkan luan, mudah dipahami dan sering disosialisasikan.
	□ B.	Merumuskan dan menetapkan lulan, mudah dipahami dan pemah disosialisasikan.
	□ C.	Merumuskan dan menetapkan tu an, mudah dipahami tetapi tidak disosialisasikan.
	□ D.	Merumuskan dan menetapkan iuan, sulit dipahami dan tidak disosialisasikan.
	□ E.	Tidak merumuskan dan menetapkan uan.

104.	Sekolah/Madrasah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) dan rencana kerja tahunan.		
	□ A.	Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.	
	□ B.	Memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.	
	□ C.	Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan dan sudah disosialisasikan oleh pimpinan.	
	○ D.	Memiliki rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja tahunan tetapi belum disosialisasikan oleh pimpinan.	
	O E.	Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.	
105.	Sekolah/N	Tidak memiliki rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan.  Adrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secar ng mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.	
105.	Sekolah/N	Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secar	
105.	Sekolah/N tertulis ya	Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secar ng mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.  Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara	
105.	Sekolah/M tertulis ya	Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secar ng mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.  Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.	
105.	Sekolah/M tertulis ya  A.	Madrasah memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secar ng mudah dipahami oleh pihak-pihak terkait.  Memiliki 7 (tujuh) atau 8 (delapan) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.  Memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) dokumen aspek pengelolaan secara tertulis.	

106.	Sekolah/Madrasah memiliki struktur organisasi dengan kejelasan uraian tugas.		
	□ <b>A</b> .	Memiliki struktur organisasi yang dipajang di dinding dan disertai uraian tugas yang jelas.	
	□ B.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas yang jelas.	
	□ C.	Memiliki struktur organisasi dan disertai uraian tugas tetapi tidak jelas.	
	□ <b>D</b> .	Memiliki struktur organisasi tetapi tidak ada uraian tugas.	
	O E.	Tidak memiliki struktur organisasi.	

107.	Sekolah/M	Madrasah melaksanakan kegiatan Pasua dengan rencana kerja tahunan.	
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% ke tan dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.	
	□ В.	Sebanyak 51% - 75% kegiatan 🌎 aksanakan sesuai rencana kerja tahunan.	
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% kegiatan 🕕 aksariakan sesuai rericana kerja tahunan.	
	□ C.	Sebanyak 1% - 25% kegiatan d sanakan sesuai rencana kerja tahunan.	
_	□ É.	Tidak melaksan: kan kegiatan samai rencana kerja tahunan.	
108.	Sekolah/Madrasah melaksan skan kegiatan k swaan.		
	□ A.	Memiliki 4 (empa) atau 5 (lima) 🖒 umer kegiatan kesiswaan.	
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiata esiswaan	
	□ C.	Memiliki 2 (dua) dukumen kegiata esiswaan.	
	O D.	Memiliki 1 (satu) d xumen kegia:a esisv/aan.	
	O E.	Tidak memiliki dokumen kegiatar Hariswaan.	
109.	Sekolah/M	tadrasah melaksanakan kegiatan pengilimbangan kurikulum dan pembelajaran.	
	☐ A.	Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) doku en kegiatan kurikulurn dan pembelajaran.	
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen kegiatan 🖾 kulum dan pembelajaran.	
	□ C.	Memiliki 2 (dua) dokumen kegiatan kun kulum dan pembelajaran.	
	□ D.	Memiliki 1 (satu) dokumen kegiatan ku-kulum dan pembelajaran.	
	□ E.	Tidak memiliki dokumen kegiatan kurik um dan pembelajaran.	
440	0-1-1-1-1	didit de base la constitución de	
110.		ladrasah melaksanakan pendayagunaan endidik dan tenaga kependidikan.  Melaksanakan 4 (empat) atau 5 (lima program pendayagunaan pendidik	
	□ A.	dan tenaga kependidikan.	
	□ B.	Melaksanakan 3 (tiga) program per ayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
	□ C.	Melaksanakan 2 (dua) program pen iyagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
	□ D.	Melaksanakan 1 (satu.) program pen yagunaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
	□ E.	Tidak melaksanakan program pera yagunaan pendidik dan tenaga	

<ul> <li>B. Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana.</li> <li>C. Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana.</li> <li>D. Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana.</li> </ul>	☐ A. Mengelola 4 (empat) atau 5 (lima) program sarana	dan prasarana
	☐ B. Mengelola 3 (tiga) program sarana dan prasarana.	
☐ D. Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana.	☐ C. Mengelola 2 (dua) program sarana dan prasarana	
	☐ D. Mengelola 1 (satu) program sarana dan prasarana	
☐ E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana.	☐ E. Tidak mengelola program sarana dan prasarana.	

∪ A.	wemiliki 4 (empat) program pengelolaan pembayaan pendidikan.
□ B.	Memiliki 3 (tiga) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
□ C.	Memiliki 2 (dua) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
□ D.	Memiliki 1 (satu) program pengelolaan pembiayaan pendidikan.
○ E.	Tidak memiliki program pengelolaan pembiayaan pendidikan.

113.	Sakolah/N	Madrasah menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang
110.	kondusif.	nadrasan menepiakan suasana, ikim, dan iligkungan pembelajaran yang
	□ A.	Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
	□ C.	Memiliki 2 (dua) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
	□ D.	Memiliki 1 (satu) kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.
	○ E.	Tidak memiliki kegiatan menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

114.		Madrasah melibaikan masyarakai dan membangun kemitraan dengan lembaga relevan dalam pengelolaan pengi an.
	O A	Memiliki 4 (empat) atau lebih de umer tentang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan deng i lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen tentar kete libatan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga in yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
	□ c.	Memiliki 2 (dua) dokumen tentan keter batan masyarakat dan membangun kemitraan dengan lembaga n yang relevan dalam pengelolaan pendidikan.
	C) D.	Memiliki 1 (satu) dokumen ∍ntang keterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan denga lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan pen∉lidikan.
	O E	Tidak memiliki dokumen tentang (eterlibatan masyarakat dan membangun kemitraan dengar lembaga lain ya 👍 relevan dalam pengelolaan pendidikan.
115.		Madrasah memiliki program pengawa an yang disosialisasikan kepada pendidik ga kependidikan.
	□ A.	Memiliki 4 (empat) atau 5 (lima) dor nen program pengawasan.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) dokumen program p ngawasan.
	□ C.	Memiliki 2 (dua) dokumen program pangawasan.
	□ D.	Memiliki 1 (satu) dokumen program programan
	□ E.	Tidak memiliki dokumen program pen lawasan.
116.	Sekolah/M	ladrasah melaksanakan kegiatan evalua diri.
	□ A.	Melaksanakan evaluasi diri setidak-tida nya sekali dalam 1 (satu) semester.
	□ B.	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalar 2 (dua) semester.
	□ C.	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalar 3 (tiga) semester.
	□ <b>D</b> .	Melaksanakan evaluasi diri sekali dalar 4 (empat) semester.
	□ <b>E</b> .	Tidak melaksanakan e raluasi diri.

117.	Sekolah/N	Madrasah melaksanakan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ A.	Melaksanakan 4 (empat) atau lebih program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ B.	Melaksanakan 3 (tiga) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ C.	Melaksanakan 2 (dua) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
	□ D.	Melaksanakan 1 (satu) program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
	○ E.	Tidak melakukan program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.
118.	Sekolah/I	Madrasah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk akreditasi.
	□ A.	Memiliki 4 (empat) bahan persiapan akreditasi.
	□ B.	Memiliki 3 (tiga) bahan persiapan akreditasi.
	□ C.	Memiliki 2 (dua) bahan persiapan akreditasi.
	□ D.	Memiliki 1 (satu) bahan persiapan akreditasi.
	□ E.	Tidak memiliki persiapan bahan akreditasi.
119.	Sekolah/l kependid	Madrasah memiliki struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenag iikan.
	□ A.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 3 (tiga) atau lebih wakil kepal sekolah/madrasah.
	□ B.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 2 (dua) wakil kepala sekolah/madrasah.
	□ C.	Memiliki kepala sekolah/madrasah dan 1 (satu) wakil kepala sekolah/madrasah.
	□ D.	Memiliki kepala sekolah/madrasah tetapi tidak memiliki wakil kepala sekolah/madrasah.
	□ E.	Tidak memiliki kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah/madrasah.

120.	Sekolah/li pendidika	Aadrasah meniiliki sistem infc⊕ asi manajemen untuk mendukung administras n.
	□ <b>A</b> .	Memiliki sistem informasi dan emiliki fasilitas dan petugas khusus.
	□ B.	Memiliki sistem informasi dari emiliki fasilitas tetapi tidak memiliki petugas khusus.
	□ C.	Memiliki sistem informasi dan i emiliki petugas khusus tetapi tidak memiliki fasilitas.
	□ <b>D</b> .	Memiliki sistem informasi teta tidak memiliki fasilitas dan/atau petugas khusus.
	□ E.	Tidak memiliki astem informas

## VII. STANDAR PEMBIAYAAN

121.		dadrasah memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan secara menyeluruh.
	□ A.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	□ B.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 2 (dua) tahun terakhir.
	□ C.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
	□ D.	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara tidak menyeluruh hanya selama 1 (satu) tahun terakhir.
	□ E.	Tidak memiliki catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana.
122.		Aadrasah membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M).
	□ A.	Membelanjakan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengembangar pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
	□ В.	Membelanjakan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengembangar pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
	□ C.	Membelanjakan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengembangar pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
	□ <b>D</b> .	Membelanjakan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengembangar pendidik dan tenaga kependidikan dalam RKA-S/M.
	□ E.	Tidak membelanjakan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
123.		Madrasah memiliki modal kerja untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikar atu tahun terakhir.
	□ A.	Memiliki modal kerja sebanyak 76% – 100% untuk membiayai seluru kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
	□ B.	Memiliki modal kerja sebanyak 51% - 75% untuk membiayai seluru kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
	□ C.	Memiliki modal kerja sebanyak 26% - 50% untuk membiayai seluru kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir.
	□ <b>D</b> .	Memiliki modal kerja sebanyak 1% - 25% untuk membiayai seluruh kebutuha pendidikan selama satu tahun terakhir.
	O. =	Tidel, accountly and delicate accordable

124.	Sekolah/i tahun ber	Madrasah memb∋yar gaji, insen≔ transport, dan tunjangan lain bagi guru pada jalan.
	□ A.	Mengeluarkan dana untuk pe ⊢ayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru⇒ada tahun berj ⊫n.
	□ B.	Mengeluarkan dana untuk pen ayaran gaji, insentif, dan transport bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana unjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
	□ c.	Mengeluarkan dana untuk pemiliyaran gaji, dan insentif bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana transport dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
	□ D.	Mengeluarkan dana untuk ∺mba⊬aran gaji bagi guru, tetapi tidak mengeluarkan dana insentif, tra port dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.
	□ E.	Tidak mengeluarkan dana apap bagi guru pada tahun berjalan.
125.		Madrasah membayar gaji, insentil transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kan pada tahun beralan.
	□ A.	Mengeluarkan d∄na untuk pem∷ ⁄aran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi tenaga kependidikan p⊕ + tahun berjalan.
	□ B.	Mengeluarkan dana untuk pemtaran gaji, insentif, dan transport, tetapi tidak mengeluarkan turjangan lain barasaga kependidikan pada tahun berjalan.
	□ C.	Mengeluarkan dana untuk pa bayaran gaji dan insentif, tetapi tidak mengeluarkan transport dan tu ingan lain bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.
	□ D.	Mengeluarkan daria untuk pembaran çaji, tetapi tidak mengeluarkan insentif, transport dan tun angan lain bagi anaga kependidikan pada tahun berjalan.

126.		ladrasah mengalokasikan biaya ntuk menunjang pelaksanaan kegiatan ran selama tiga tahun terakhir.
	☐ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak i% - 100% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajara selama tiga tahun terakhir.
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 75% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
	□ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak % - 50% dan anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir.
	□ <b>D</b> .	Mengeluarkan biaya sebanyak % - 25% dari anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran elama tiga tahun terakhir.
	□ E.	Tidak mengeluarkan biaya dari an jaran penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selan a tiga tahun teranir.

Tidak mengeluarkan dana apa  ${\bf m}$ n bagi tenaga kependidikan pada tahun berjalan.

C E.

127.	Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk kegiatan kesiswaan.		
	□ A.	Mengeluarkan dana sebanyak 76% = 100% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.	
	□ B.	Mengeluarkan dana sebanyak 51% - 75% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.	
	□ C.	Mengeluarkan dana sebanyak 26% - 50% dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.	
	□ D.	Mengeluarkan dana sebanyak $1\%$ - $25\%$ dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.	
	□ E.	Tidak mengeluarkan dana dari anggaran kegiatan kesiswaan selama satu tahun terakhir.	
128.	Sekolah/N	Aadrasah mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran.	
	□ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.	
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.	
	□ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% + 50% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.	
	□ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.	
	□ E.	Tidak mengeluarkan biaya pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir.	
129.	Sekolah/l pembelaj	Madrasah menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai untuk kegiatan aran.	
	□ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.	
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.	
	□ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.	
	□ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir.	

Tidak menyediakan biaya pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun

□ E.

terakhir.

130.	Sekolah/l pembelaj	Madrasah menyedakan <mark>biaya</mark> p gadaan alat habis pakai untuk kegiatan aran.
	O A	Mengeluarkan baya sebanyak 3% - 100% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
	□ B.	Mengeluarkan $\text{Diaya}$ sebanyak 1% - 75% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun te khir.
	□ C.	Mengeluarkan tijaya sebanyak 3% - 50% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama satu tahun telikhir.
	□ D.	Mengeluarkan baya sebanyak 🎼 – 25% dari anggaran pengadaan alat habis pakai selama sa u tahun terakhi:
	□ E.	Tidak menyedia an biaya pen aan alat habis pakai selama satu tahun terakhir.
131.	Sekolah/N	Madrasah menyediak <b>an b</b> ia <b>ya p</b> eng ilan kegiatan rapat.
	□ A.	Mengeluarkan baya sebanyak 6% – 100% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat se ama satu tahuri rakhir.
	□ B.	Mengeluarkan bir ya sebanyak 5 - 75% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
	□ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
	□ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
	□ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.
132.	Sekolah/M	nadrasah menyediakan biaya pengadan transport dan perjalanan dinas.
	□ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 75% - 100% dari anggaran pengadaan transport dan perjalanan dinas sela a satu tahun terakhir.
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan transport

133.	Sekolah/M	ladrasah menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian.
	□ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran penggandaan soal- soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% + 75% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
	□ C.	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
	□ D.	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% = 25% dari anggaran penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
	□ E.	Tidak menyediakan biaya penggandaan soal-soal ulangan/ujian selama satu tahun terakhir.
134.	Sekolah/M	nadrasah menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa.
	□ A.	Mengeluarkan biaya sebanyak 76% - 100% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
	□ B.	Mengeluarkan biaya sebanyak 51% - 75% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
	□ <b>c</b> .	Mengeluarkan biaya sebanyak 26% - 50% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
	□ <b>D</b> .	Mengeluarkan biaya sebanyak 1% - 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
	□ E.	Tidak menyediakan biaya pengadaan daya dan jasa selama satu tahun terakhir.
135.		Aadrasah menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak selama tiga tahun terakhir.
	□ A.	Memiliki biaya sebanyak 76% - 100% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
	□ <b>B</b> .	Memiliki biaya sebanyak 51% - 75% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
	□ <b>c</b> .	Memiliki biaya sebanyak 26% - 50% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.
	□ D.	Memiliki biaya sebanyak 1% - 25% untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir

Tidak memiliki biaya untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir.

□ E.

136.	Sumbangan pendidikan atau dana dari majarakat digunakan untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah/macrajih.		
	[] A	Digunakan untuk kesejahteraali warga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, arana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan per belajaran, serta agiatan ketatausahaan.	
	C  B,	Digunakan untuk kesejahteraan varga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan sarana prasarana, dan pengembangan kurikulum dan kegiatan pem Hajaran, tetapi tidak untuk kegiatan ketatausahaan.	
	C  C <sub>1</sub>	Digunakan untuk kesejahteraan arga sekolah/madrasah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, in serana prasarana, tetapi tidak untuk pengembangan kurikulum dan ketatausahaan.	
	□ D.	Digunakan untuk kesejahteran warga sekolah/madrasah serta pengembangan guru dan tenaga pendidikan, tetapi tidak untuk sarana dan prasarana, pengembangan kurik im dan pembelajaran, serta kegiatan ketatausahaan.	
	□ E.	Hanya digunakan untuk kesejahtera n warga sekolah/ madrasah.	

137.	Penetapar siswa.	uang sekolah/madrasah mempertirn angkan kemampuan ekonomi orangtua
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
	□ C,	Sebanyak 26% - 50% siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% siswa dari eluarga tidak mampu mendapatkan keringanan.
	□ <b>E</b> .	Tidak ada seorang pu≒ siswa mendap≅ √an keringanan.

138.	Siswa dike	nakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
	□ A.	Tidak ada seorang pun siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
	□ B.	Sebanyak 1% - 25% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
	□ C.	Sebanyak 26% = 50% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
	□ D.	Sebanyak 51% - 75% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.
	□ E.	Sebanyak 76% - 100% siswa dikenakan biaya pendaftaran ulang pada setiap awal tahun pelajaran.

139.	Sekolah/M.	adrasah melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu.
	□ A.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 4 (empat) tahun terakhir.
	□ B.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	□ C.	$\label{eq:Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 2 (dua) tahun terakhir.}$
	□ D.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu minimal 90 persen siswa kurang mampu selama 1 (satu) tahun terakhir.
	□ E.	Tidak melaksanakan subsidi silang.

140.	Sekolah/M sekolah/m	, , ,
	□ A.	Tidak melakukan pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
	□ B.	Melakukan 1 (satu) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
	□ <b>c</b> .	Melakukan 2 (dua) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
	□ D.	Melakukan 3 (tiga) jenis pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.
	□ <b>E</b> .	Melakukan 4 (empat) jenis atau lebih pungutan biaya personal lain di samping uang sekolah/madrasah.

141.		ilan keputusan dalam penetapan di na dari masyarakat sebagai biaya personal dengan melibatkan berbagai pihak irkait.
	() A	Melibatkan penyelenggara peni tikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, pe zakilan guru, dan perwaklian tenaga kependidikan.
	□ B.	Melibatkan penyelenggara per: ikan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan palakilan guru.
	C) G.	Melibatkan penyalenggara pendi kan/yayasan, kepala sekolah/madrasah, dan komite sekolah/madrasah.
	CJ D_	Melibatkan penye enggara pendic n/yayasan dan kepala sekolah/madrasah.
	DE.	Hanya melibatkan «epala sekolah » idrasah.
142.		an dana dari masyarakat sebagai ti ira personal dilakukan secara sistematis, n, efisien, dan akuntabel.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% dana dari n yarak at tercantum dalam RKA-S/M.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% dana dari mas arakat tercantum dalam RKA-S/M.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50 % dana dari mas i rakai tercantum dalam RKA-S/M.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% dana dan masya akat tercantum dalam RKA-S/M
	○ E.	Tidak tercantum dalam RKA-S/M,
143.		ladrasah memiliki pedoman pengelo an keuangan sebagai dasar dalam an RKA-S/M.
	□ A.	Memiliki pedoman pengelolaan keuantan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 4 (empat) tahun teraknir.
	□В	Memiliki pedoman pengelolaan keuan∶an sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 3 (tiga) tahun terakhir
	□ C.	Memiliki pedoman pengelolaan keua in sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 2 (dua) tahun terakhi
	□ <b>D</b> .	Memiliki pedoman pengelolaan keuan n sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M selama 1 (satu) tahun terakh
	□ E.	Tidak memiliki pedoman pengelola keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-S/M.

144.	Sekolah/M	ladrasah memiliki pembukuan biaya operasional.
	□ A.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 4 (empat) tahun terakhir.
	□ B.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 3 (tiga) tahun terakhir.
	□ C.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 2 (dua) tahun terakhir.
	□ D.	Memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 (satu) tahun terakhir.
	○ E.	Tidak memiliki pembukuan biaya operasional.
145.		Madrasah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Paikannya kepada pemerintah atau yayasan.
	□ A.	Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 4 (empat) tahun terakhir.
		Membuat laporan pertanggungiawahan pengelolaan keuangan dan

□ B.

□ C.

□ D.

□ E.

terakhir.

terakhir.

terakhir.

menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 3 (tiga) tahun

Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 2 (dua) tahun

Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan

menyampaikannya kepada pemerintah atau yayasan selama 1 (satu) tahun

Tidak membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

146.		nginformasikan rancangan dan kir ria penilaian yang ada dalam silabus mata kepada siswa pada semester yang rjalar.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru nenginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru enginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru in Inginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mengin - masikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru men; formasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa.
147.	Silabus m teknik pen	iata pelajaran dilengkapi dengan inc tor pencapalan kompetensi dasar (KD) dan ilaian.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% silabu mata pelajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dar teknik penilaian.
	□ В.	Sebanyak 51% - 75% silabus mata 🔝 lajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% silabus mata pelajaran dilengkapi incikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25 % silabus mata pajaran dilengkapi indikator pencapaian KD dan teknik penilalan.
	□ E.	Tidak ada satu pun silabus dilen api indikator pencapaian KD dan teknik penilaian.
148.	Guru mer teknik pen	ngembangkan instrumen dan pedoma penilaian sesuai dengan bentuk dan alaian.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru meng nbangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan binik penilaian.
	□ B.	Sebanyak 51% – 75% guru meng∈ ibangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan t∈ nik penilaian.
	□ <b>c</b> .	Sebanyak 26% - 50% guru meng∈ bangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan te nik penilaian.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru menger rangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan tel iik penilaian.

Tidak ada seorang pun guru men; mbangkan instrumer dan pedoman

penilaian.

□ E.

- 149. Guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain dalam menilai siswa. Sebanyak 76% - 100% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, □ A. pengamatan, penggasan terstuktur, penggasan mandiri, dan/atau bentuk lain, Sebanyak 51% - 75% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, □ B. pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. Sebanyak 26% - 50% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes. □ C. pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. Sebanyak 1% - 25% guru menggunakan teknik penilaian berupa tes, □ D. pengamatan, penugasan terstuktur, penugasan mandiri, dan/atau bentuk lain. □ E. Tidak ada seorang pun guru melaksanakan penilaian.
- 150. Guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Sebanyak 76% - 100% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui □ A. kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Sebanyak 51% - 75% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui □ B. kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Sebanyak 26% - 50% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui □ C. kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Sebanyak 1% - 25% guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui □ D. kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Tidak ada seorang pun guru mengolah hasil penilaian untuk mengetahui  $\cap$  F kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa.
- 151. Guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. Sebanyak 76% - 100% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan □ A. siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. Sebanyak 51% + 75% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan B. siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. Sebanyak 26% - 50% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan  $\Box$  C. siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. Sebanyak 1% - 25% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan  $\cap$  D siswa disertai balikan/komentar yang mendidik. Tidak ada seorang pun guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan € E. siswa.

152.	Guru me	manfaatkan hasil penilaian untuk penbalajaran.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru n - ıanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru m∈ anfaatkan hasil penilaian untuk perbalkan pembelajaran.
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru me anfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru me infaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
	□ E.	Tidak ada seo ing pun guru mantaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
153.		laporkan hasil pendaian mata perajan pada setiap akhir semester kepada kepala nadrasah dalam bentuk laporan presasi belajar siswa.
	□ A.	Sebanyak 76% = 100% guru   ∋laporkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kupala sekolah/m∃ asah
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru mel parkar hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasa
	□ C.	Sebanyak 26% - 50% guru meii parkar hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasari
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mela urkan hasil penilaian prestasi belajar siswa kepada kepala sekolah/madrasai
	□ E.	Tidak ada seorang pun guru meli porkan hasil penilaian prestasi belajar siswa.
154.	penilaian	laporkan hasil penilaian akhlak si a kepada guru pendidikan agama dan hasil kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi enentukan nilai akhir semester.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% guru me ⊃orkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan ha penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
	□ B.	Sebanyak 51% - 75% guru mel⊪ orkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikar Agama dan ha⊪ penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
	□ c.	Sebanyak 26% - 50% guru mela orkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% guru mela urkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan ha penilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
	O E.	Tidak seorang pun guru melapa an hasil penilaian akhlak siswa kepada guru Pendidikan Agama dan hasil enilaian kepribadian siswa kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.

155.		adrasah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran at dewan guru.
	□ A.	Sebanyak 76% - 100% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
	□ B.	Sebanyak 50% - 75% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
	□ C.	Sebanyak $26\% \pm 50\%$ mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
	□ D.	Sebanyak 1% - 25% mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
	□ E.	Tidak ada satu pun mata pelajaran ditentukan KKM-nya melalui rapat dewan guru.
156.	Sekolah/N semester.	nadrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester dan ulangan akhii
	□ A.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester.
	□ B.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan akhir semester saja.
	□ C.	Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester saja.
	□ D.	Tidak tentu.
	□ E.	Tidak pemah.
157.		Jadrasah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran stem Kredit Semester/SKS) melalui rapat.
	□ A.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dewan guru.
	□ B.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
	□ <b>c</b> .	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat dengan wali kelas saja.
	□ D.	Menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran melalui rapat pimpinan sekolah.
	□ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.

158.		Madrasah menentuk∄n nilai akhir kompok mata pelajaran agama dan akhlak warganegaraan dan kepribadian, iz∞estetika, serta jasmani, olahraga, dan n.
	ПΑ	Menentukan nikii akhir mel; I rapat dewan guru dengan mempertimbangk n hasil penilaia oleh yuru.
	□ B.	Menentukan nilai a hir melalui rapat ewar guru tanpa mempertimbangkan hasil penilaian oleh guru.
	□ C.	Menentukan nilai akhir tanpa elalu rapat dewan guru tetapi mempertimbangkan hasil penilaiar ileh guru.
	□ D.	Menentukan nilai ak i⊮ bersama wali ⊬ las saja.
	() E.	Hanya ditetapkan ol∌h kepala sekolar madrasah.
159.		fladrasah menyelenggarakan ujian sek≔ h/madrasah dan menentukan kelulusan uai dengan kriteria yang ∍erlaku.
	□ A.	Lebih tinggi dari 1,1 at₃u lebih di atas kr⊤ria yang berlaku.
	□ B.	Lebih tinggi dari 0,6 sampai 1,0 di atas ki ∍ria yang berlaku.
	□ c.	Lebih tinggi dari 0,1 sa npai 0,5 di atas karia yang berlaku.
	□ D.	Sama dengan kriteria yang berlaku.

160.		Madrasah melaporkan hasii penilaian setiap akhir semester kepada orang tua/wali am bentuk buku laporan hasil belajar siswa.
	□ A.	Diawali dengan penjelasan umum kecala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas diingan masing-masing orang tua/wali siswa dan siswa yang bersangkutan.
	□ B.	Diawali dengan penjelasan umum kepala sekolah/madrasah dilanjutkan penjelasan wali kelas dengan masing-masing orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
	□ C.	Diawali dengan penjelasan umum kepali sekolah/madrasah tetapi langsung dan wali kelas ke masing-masing orang sa/wali siswa dengan siswa yang bersangkutan.
	□ D.	Tanpa diawali dengan penjelasan umu kepala sekolah/ madrasah tetapi langsung dari wali kelas ke masing-masini orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan.
	O E.	Tidak melaporkan hasil penilaian langsun papada siswa.

Tidak menyelenggarakan ujian sekolahi adrasah.

□ E.

101.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kanwil Depag.	
	□ A.	Kurang dari 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
	□ B.	Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah akhir semester.
	□ C.	Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
	□ D.	Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah akhir semester.
	□ E.	Lebih dari 1 (satu) semester.
162.	Sekolah/N	Madrasah menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan.
	□ A.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dewan guru.
	□ B.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan perwakilan guru-guru mata pelajaran.
	□ C.	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat dengan wali kelas saja.
	□ <b>D</b> .	Menentukan kelulusan siswa sesuai kriteria kelulusan melalui rapat pimpinan sekolah.
	□ E.	Hanya ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah.
163.	Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap siswa yang mengikuti Ujian Nasional (UN).	
	□ A.	Kurang dari 1 (satu) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
	□ B.	Antara 1 (satu) sampal 2 (dua) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
	□ C.	Antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
	□ <b>D</b> .	Antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.
	□ E.	Lebih dari 4 (empat) minggu setelah pengumuman hasil ujian.

- 164. Sekolah/Madrasah menerbitkan dan menyelahkan ijazah kepada setiap siswa yang telah lulus. Kurang dari 1 (satu) minggu sellah biangko ijazah diterima dari Dinas □ A. Pendidikan/Kandepag. Antara 1 (satu) sampai 2 (dua) m qu setelah blangko ijazah diterima dari □ B. Dinas Pendidikan/Handepag. Antara 2 (dua) sanipai 3 (tiga) minc. u setelah blangko ijazah diterima dari O C. Dinas Pendidikan/Kandepag. Antara 3 (tiga) samrai 4 (empat) mina u selelah blangko ijazah diterima dari  $\bigcap D$ . Dinas Pendidikan/Kandepag. Lebih dari 4 (empat) minggu setan blangko ijazah diterima dari Dinas □ E. Pendidikan/Kandepa;
- 165. Sekolah/Madrasah menggunakar hasil Ujian Na: nal (UN) SMP/MTs/ Paket B sebagai salah satu peneritu penerimaan sis va baru. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/P et B secara transparan sebagai □ A. penentu penenmaan siswa baru. Menggunakan hasil LN SMP/MTs/Palit B dan seleksi masuk secara □ B. transparan sebagai pen intu penerimaan swa baru. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Paker 3 dan seleksi masuk secara tidak □ C. transparan sebagai penentu penerimaan wa baru. Menggunakan hasil UN SMP/MTs/Pake: secara tidak transparan sebagai  $\cap$  D. penentu penerimaan siswa baru. Tidak menggunakan UN SMP/MTs/Paket sebagai penentu penerimaan siswa O.E. baru.

## **CURRICULUM VITAE**



BASUKI, Lahir di kota Ponorogo tanggal 10 Oktober 1972. Menikah dengan Siti Hamidatin, S,Ag asal Jember dan dikaruniai tiga orang putri yang diberi nama Afiya Ulin Nuha Annafi'ah (2000), Alifa Mustafidah Azzahrah (2007), dan Aliya Rizgy Addasugy (2009).

Dia mengawali pendidikannya di SDN Totokan I tanah kelahiran, dan meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah Aliyah "Al-Islam" Joresan Mlarak Ponorogo diselesaikan tahun 1990. Pendidikan S-1 diselesaikan di STAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi program studi Pendidikan Agama Islam tahun 1999. Pada tahun 2001 dia berhasil menyelasaikan program pendidikan S-2 di Universitas Islam Malang dengan mengambil konsentrasi pendidikan Islam dengan predikat cumlaude. Dan pada tahun 2011 telah memperoleh gelar Doktor di PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dia mengawali karirnya menjadi guru di Ponpes Qomarul Hidayah Tugu Trenggalek selama satu tahun (1991/1992) dan Pondok Pesantren Modern 'Al-Kautsar' Muncar Banyuwangi mulai tahun 1992/1993 s.d 2002/2003. Di tengah-tengah pengabdiannya di pondok tersebut, dia berhasil menyelasikan pendidikan S-1 dan S-2. Setelah selsai S-2 dia menyempatkan diri untuk mengawali karirnya sebagai dosen pada PTAI Almamater, yaitu STAI Ibrahimiy

dengan membina Metodolog Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, setelah memi ki kualifikasi ijazah S-2, dia juga menyempatkan diri sebag i dosen STAI "Zainul Hasan" Genggong Probolinggo (2001-003) dengan membina Mata Kuliah IPI, MPAI, Filsafat Pend dikan Islam, dan Metodologi Penelitian. Selain menjadi Posen STAI Zainul Hasan, menyempatkan diri setiap muggu sekali, sebagai Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Baha a Arab di STAIN Jembar (2003-2004) sekaligus pulang Pember di mana Istri dan anak bertempat tinggal.

Pada tahun 2004, dia dian kat menjadi dosen negeri di STAIN Ponorogo. Di STAIN Ponorogo dia mengawali karirnya dengan diangkat menj di divisi penelitian P3M STAIN Ponorogo (2004-2005), Letua Program Studi PAI STAIN Ponorogo (2006 s.d 2010). Di samping itu, juga membinamata kuliah: Ilmu Pendid kan Islam, Pengembangan Kurikulum, Metodologi Penelitian Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Filsafat Pendidikan, Filsafat Pendidikan lislam. Di sore harinya, dia juga menyempatkan diri setiap seminggu sekali untuk menjalin silaturrahmi dengan civitas akademika INSURI Ponorogo dan ISID Gontor sebagai Dosen Luar Biasa dengan membina Mata Kuliah Profesi Pendidik.

Di sela-sela kesibukannya di STAIN Ponorogo, dia juga dipercaya oleh beberapa Sekolah/Madrasah di kabupaten ponorogo dan sekitarnya sebagai konsultan RSSN, RSKM, dan RSBI. Sejak tahun 2009, dia diangkat menjadi Assesor portofolio Pengawas di Lingkungan Depag Propinsi Jawa Timur NIA: 9841960003, dan pada tahun yang sama dia juga lulus sebagai Master Trainer Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional SK Nomor: 1570 J/F/KP/2009. berikut adalah beberapa catatan kegiatan ilmah dan karir, mulai tahun 2004 – 2010.



## universitas islam negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo - Jawa Timur - Indonesia



Untuk mewujudkan Visi dan menjalankan Misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.





